



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Lasarus, S.Sos., M.Si (F-PDIP) – Ketua Komisi V DPR RI
Acara :
1. Evaluasi penyelenggaraan proses tender
2. Membahas pemberdayaan penyedia jasa konstruksi di daerah untuk proyek-proyek infrastruktur
3. Lain-lain
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
31 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
7 dari 12 orang Anggota
1. Lasarus, S.Sos., M.Si.
2. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H.
3. Ir. Sudjadi
4. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
5. Sri Rahayu
6. Harvey B. Malaihollo
7. Djenri Alting Keintjem, SH., M.H.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
3 dari 8 orang Anggota
1. Ir. Ridwan Bae
2. Drs. Hamka B Kady, M.S.
3. Ilham Pangestu
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
4 dari 7 orang Anggota
1. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E.,
M.Si.

2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.
 4. Drs. H. Mulyadi, M.MA.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
4 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 4. Sri Wahyuni
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Lasmi Indaryani, S.E.
 4. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Ir. H. Sigit Sosiantomo
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
0 dari 4 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR RI (Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:
KETUA RAPAT / F-PDIP (LASARUS, S.Sos, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Direktorat Jenderal,
Yang saya hormati Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR beserta jajarannya yang menghadirkan juga seluruh Kepala Balai P2JK seluruh Indonesia yang hadir secara *hybrid*.

Bapak, Ibu sekalian.

Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Rapat pada siang hari ini dengan jadwal dan agenda yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Sekretariat telah hadir 25 Anggota dari 7 unsur fraksi yang berbeda, maka rapat ini dinyatakan kuorum. Oleh karena itu, sebagai ketentuan yang diatur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang tata tertib, izinkanlah kami membuka Rapat Dengar Pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI pada hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Kami ucapkan terima kasih kepada Dirjen Bina Konstruksi beserta seluruh jajaran dan seluruh Kepala Balai P2JK seluruh Indonesia yang hadir secara *hybrid* yang telah memenuhi undangan kami pada rapat siang hari ini.

Pimpinan dan Anggota Komisi V, Dirjen Bina Konstruksi beserta jajaran yang kami hormati dan yang kami banggakan.

Sebagaimana kita ketahui pertama, agenda Rapat Dengar Pendapat hari ini adalah evaluasi penyelenggaraan proses tender dan pemberdayaan penyedia jasa konstruksi di daerah untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari APBN.

Sesuai dengan amanat Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pasal 1 ketentuan umum angka 1 telah dinyatakan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan barang atau jasa oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Oleh karena itu pengadaan barang atau jasa memiliki porsi atau presentase yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besarnya porsi anggaran tersebut berpotensi untuk menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan proses tender, pelanggaran bisa berbentuk berbagai hal termasuk di antaranya adalah kesepakatan dan pelaksanaan tender yang dilakukan baik antar penyedia jasa konstruksi maupun penyedia jasa ataupun panitia P2JK yang bertujuan mengatur penentuan pemenang tender dimaksud. Akibat dari pelanggaran ini selain menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit juga berakibat antara lain menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan konstruksi, dapat menghambat laju pembangunan, infrastruktur, serta berpotensi mengesampingkan keikutsertaan para penyedia jasa konstruksi lokal di daerah-daerah untuk proyek-proyek infrastruktur berskala nasional, berdasarkan pengawasan dilakukan oleh Komisi V DPR RI terdapat sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Perlu peningkatan pengawasan terhadap setiap tahapan proses tender dalam mewujudkan pelaksanaan tender yang lebih transparan dan akuntabel.
2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penawaran harga yang tidak wajar, yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia jasa konstruksi.
3. Perlu peningkatan keterlibatan penyedia jasa konstruksi lokal utamanya untuk proyek strategis nasional di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Saudara-saudara yang kami hormati,

Demikianlah pengantar rapat ini, selanjutnya sesuai dengan Agenda yang sudah kami sampaikan dan materi yang akan kita bahas di rapat ini, saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada Dirjen Bina Konstruksi untuk menyampaikan bahan paparannya sesuai dengan agenda rapat kita hari ini. Saya persilakan Pak Yudha.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR beserta wakil dan para Anggota Komisi V DPR RI.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Dalam kesempatan ini kami hadir lengkap Pak Ketua, jadi dengan Ketua LPJK Pak Taufik di sebelah saya kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal dan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi serta seluruh Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK seluruh Indonesia ini hadir pada kesempatan ini secara *offline*. Kalau diperkenankan ini kami akan memperkenalkan satu-satu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, *sorry* Pak, tadi saya lupa Bapak tolong memperkenalkan juga seluruh balai P2JK yang ada di daerah, ini ada permintaan dari teman-teman, saya persilakan Pak.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Baik, pertama-tama adalah Kepala Balai BP2JK Aceh Pak Suryadi silakan berdiri. Kemudian, Kepala Balai BP2JK Sumatera Utara Pak Enriko ya dan BP2JK Sumatera Barat Pak Siwi Subekti, kemudian Kepala Balai BP2JK Riau Pak Hamka Lubis, Kepala BP2JK Kepulauan Riau Pak Fani Dhuha dan Kepala Balai BP2JK Jambi ini Bu Kamsiah Tarigan. Kemudian Kepala BP2JK Bengkulu Pak Iqbal, Kepala BP2JK Sumatera Selatan Pak Antonius Widiatmoko, Kepala BP2JK Bangka Belitung Pak Rubi Kurniawan dan Kepala BP2JK Lampung Pak Roni Adriandi, serta Kepala Balai BP2JK Banten Pak Hamdi, Kepala BP2JK DKI Jakarta Pak Deki Rahardian Firdiansyah, kemudian Kepala BP2JK Jawa Barat Pak Edi Irwanto ini baru pindahan dari DJKW Surabaya, kemudian Kepala BP2JK Jawa Tengah Pak Yanuar Munlait, ini juga pindahan dari Yogya, Kepala BP2JK Yogyakarta Pak Aditya Anwar ini yang bersangkutan pindahan dari Kalimantan Utara, Kepala Balai dari Kaltara.

Kemudian, BP2JK Jawa Timur Pak Agus Kurniawan sebelumnya bertugas di Sumatera Utara dan Kepala BP2JK Bali Pak Rian Ciptadi. Kemudian, Kepala BP2JK Nusa Tenggara Barat Pak Sofyan ini sebelumnya di Maluku serta Pak Endio Raharjo Kepala BP2JK Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya Sulawesi Barat. Kepala BP2JK Kalimantan Utara Pak Agus Raharjo, ini sebelumnya bertugas di Bengkulu. Kemudian, Kepala BP2JK Kalimantan Barat Bu Marthalia Isnaini ini sebelumnya dari pusat baru jadi Kepala BP2JK di Kalbar. Kemudian, Kepala BP2JK Kalimantan Tengah Pak Cok Bagus Purnawarman ini beliau sebelumnya dari Bali, Kepala BP2JK Bali rotasi ke Kalimantan Tengah. Kemudian, Kepala BP2JK Kalimantan Selatan Pak Husnan Tajri dan juga Kepala BP2JK Kalimantan Timur Pak Joko Ahmad Salim. Kemudian, BP2JK Plt BP2JK Gorontalo Pak Agus Pujiono ini dirangkap oleh Kasubdiv, kepala balai yang sebelumnya mengundurkan diri untuk Gorontalo, kemudian Kepala BP2JK Sulawesi Utara ini juga Plt karena Kepala Balai yang sebelumnya mengundurkan diri karena alasan Kesehatan, sementara ini Plt nya adalah Pak Edison Rombe.

Kemudian, Kepala BP2JK Sulawesi Barat Pak Budiarto Kusmawardono dan untuk BP2JK Sulawesi Tengah Pak Adriagus, Kepala BP2JK Sulawesi Selatan ini mungkin sudah banyak yang cukup kenal, sudah cukup lama ini

Beliau Bu Asra Rahim dan Kepala BP2JK Sulawesi Tenggara Pak Muhammad Hasbi. Kemudian, Kepala BP2JK Maluku Utara Pak Widiyanto Sumaga ini juga baru kemarin rotasi, kemudian BP2JK Maluku Pak Indra Sulistio ini juga baru menggantikan yang lama kita lakukan demosi dan Kepala BP2JK Papua Barat Pak Wijayanto serta terakhir Kepala BP2JK Papua Pak Sahdim Husein ini juga baru pindah Kepala Balai yang lama mengundurkan diri karena alasan keluarga.

Kemudian, ini hadir juga Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah *online* ya, ada tujuh Kepala Balai DJKW yang hadir secara *online* Pak, jadi yang untuk BP2JK semua hadir secara *offline*, mungkin itu yang dapat kami perkenalkan dan Rekan-rekan ini yang bekerja sebagai ujung tombak dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di daerah dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Tadi disampaikan ada *online*, lebih bagus tidak usah Pak, aturan kita di sini harus *offline*.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ya silakan. Masih ada yang *online*? Ya sudah ok, baik, jadi.. tapi tergantung ya kalau internal kita *offline* Pak tetapi kalau untuk eksternal masih bisa *online*, itu informasi dari Sekretariat tetapi kalau memang yang *offline*-nya kita stop ya kita stop *offline* nya, tergantung yang lain bagaimana permintaan Pak Hamka yang *online* kita stop? Kita *offline* semua ya? Baik, kalau *gitu* di sana mesti putus ya, *online* nya diputus, kita *offline*. *Gitu* Pak ya? Ini harus setuju semua ini, karena kita masih membolehkan *online*, baik saya ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan. Lanjut Pak Yudha.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Baik Pak, jadi yang *offline* ini sesuai dengan surat undangan ke kami, jadi BP2JK yang hadir secara *offline*, kalau yang 7 (tujuh) DJKW tidak diminta hadir secara *offline*.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat,

Izinkan kami dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan paparan sesuai dengan topik RDP pada hari ini sesuai dengan surat yang disampaikan kepada kami. Jadi, ada beberapa hal yang kami sampaikan, yang pertama adalah evaluasi penyelenggaraan proses PBJ, kemudian implementasi e-katalog sektoral. Yang ketiga adalah pemberdayaan penyedia jasa konstruksi di daerah untuk proyek infrastruktur serta upaya perbaikan proses pelaksanaan PBJ.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang kami hormati,

Progres pelaksanaan tender seleksi Tahun 2023 sampai dengan 6 April 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket di Kementerian PUPR dengan status sudah terkontrak sebanyak 45,25% atau 1.167 paket, sudah SPPBJ atau Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket, serta 35,13% atau 906 paket dalam proses lelang dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah Berita Acara Hasil Pemilihan atau BAHP dan 105 paket sudah penetapan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembangunan IKN progres pelaksanaan tender seleksi atau paket khusus IKN Tahun 2022, 2023 sebagai berikut.

Sampai saat ini terdapat 158 total paket IKN pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan senilai 51,38 triliun dengan status sudah terkontrak sebanyak 63,92% atau 101 paket dengan nilai 26,8 triliun, paket tender sebanyak 9,49% yaitu 15 paket dengan rincian sudah penetapan sebanyak 5 paket dengan nilai 0,085 triliun, belum penetapan sebanyak 10 paket senilai 1,86 triliun. Sedangkan yang belum lelang atau seleksi sebanyak 26,58% atau 42 paket dengan nilai 22,5 triliun dikarenakan belum lengkapnya *Readiness Criteria* atau RC dan dokumen-dokumen pendukung proses lelang.

Bapak, Ibu yang saya hormati.

Berdasarkan data pelaksanaan tender seleksi 2022 yang telah dilaksanakan sebelumnya, kami mencoba melakukan inventarisasi keterlibatan penyedia jasa lokal dalam pelaksanaan pekerja konstruksi dan di sini seperti yang kami sampaikan juga sesuai dengan Perka LKPP No.12 Tahun 2021 bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme subkontrak untuk pekerjaan dengan segmentasi besar, mekanisme sub kontrak dan KSO untuk segmentasi menengah serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmen kecil.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan tender yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022 terdapat total 872 paket atau sekitar 82% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan sepenuhnya oleh penyedia jasa lokal serta hanya 180 paket atau sekitar 17% dari total 1.062 paket pekerjaan konstruksi yang pengerjaannya dilaksanakan oleh penyedia jasa dari luar provinsi setempat. Ini kalau kita melihat dari pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi dari total 1.062 paket terdapat 36 paket pekerjaan konstruksi atau sekitar 3% nya mengalami putus kontrak karena beberapa alasan, sisanya sebanyak 805 paket atau sekitar 76% paket pekerjaan konstruksi dapat diselesaikan hingga masa akhir kontrak pekerjaan, ini catatan kalau untuk paket putus kontrak dikarenakan penyedia lalai, cedera dalam melaksanakan kewajibannya, tidak dapat memenuhi capaian progres atau penyedia tidak akan mampu menyelesaikan usulan pekerjaan karena permasalahan *cashflow*, tidak sanggup melaksanakan pengadaan MPK (Material Peralatan Konstruksi) ataupun manajemen Internal yang sangat buruk.

Untuk implementasi elektronik katalog sektoral ini Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat, sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo perlu dilakukan percepatan pengembangan sistem untuk *e-procurement* dan penerapan *e-purchasing* yang berbasis e-katalog yang dituangkan dalam Inpres No.1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang ataupun Jasa Pemerintah, sejalan dengan hal tersebut Menteri PUPR menginstruksikan jajarannya untuk menggunakan e-katalog, beliau menyatakan bahwa e-katalog bertujuan untuk mengamankan dan menyamankan PUPR dalam pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog pengadaan barang dan jasa bisa lebih cepat dan transparan, jadi artinya proses pemilihannya tidak lebih dari seminggu dan harga sesuai dengan pasaran yang ditayang pada *dashboard* dari e-katalog LKPP.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Hingga tanggal 26 Februari 2023 total e-katalog sektoral Kementerian PUPR adalah sebanyak 28 etalase yang terdiri dari 139 kategori produk dan digunakan oleh 1.086 penyedia, e-katalog yang sudah ada ini meliputi 4 bidang yaitu Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan, juga dilihat dari jumlah etalase atau komoditas yang tayang, bidang yang memiliki jumlah etalase paling banyak adalah Cipta Karya akan tetapi dari segi kategori produk Bina Marga memiliki jumlah kategori produk yang paling banyak dan hal ini sudah dibuktikan dalam belanja e-katalognya.

Disini Bapak, Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa saat ini nilai rupiah yang telah dibelanjakan melalui e-katalog sektoral telah mencapai kurang lebih 10,2 triliun, sebagian besar pembelanjaan dilakukan oleh Kementerian PUPR sendiri melalui balai-balai pelaksana di daerah, sementara itu sisanya oleh instansi lain. Sebanyak 10,2 triliun dana APBN maupun APBD tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur seperti alat berat OP, SDA, pipa *mobile* yang oleh Cipta Karya *mobile* PAM, sementara untuk Bina Marga adalah preservasi jalan, kemudian kendaraan sanitasi, kemudian jembatan gantung dan bangunan MCK serta

jembatan rangka baja yang oleh Bina Marga preservasi jembatan dan berbagai kebutuhan lainnya. Kami juga terus berharap harga nilai transaksi belanja melalui e-catalog ini akan semakin meningkat ke depannya dan selalu mendorong agar semua instansi pemerintah dapat menggunakan e-catalog dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Bapak, Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati.

Ini perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini ada kurang lebih 80 instansi diluar Kementerian PUPR yang telah melakukan pengadaan barang dan jasa di e-katalog sektoral yang terdiri dari 14 pemerintah provinsi, jadi diantaranya adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Banten, DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur serta Provinsi Riau dan lainnya. Kemudian, ada 65 Pemerintah Kota antara lain adalah Blitar, Palangkaraya, Pagar Alam, Surakarta, Gorontalo, Medan, Pacitan, Sidoarjo dan lain sebagainya serta satu instansi Pendidikan yaitu Politeknik Tanah Laut di Kalimantan Selatan.

Bapak, Ibu Anggota Komisi V yang kami hormati dan kami banggakan.

Kami sangat berharap agar ini dapat Bersama-sama mendorong instansi Pemerintah Daerah untuk menggunakan e-catalog sektoral dalam proses pengadaan barang dan jasa, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip PBJ yakni efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, terbuka dan tidak diskriminatif serta akuntabel sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa.

Kemudian, juga ini yang perlu kami sampaikan adalah pada tanggal 16 Maret 2023 telah terbit Inpres No.3 Tahun 2023 tentang percepatan, peningkatan konektivitas jalan daerah, dengan terbitnya Inpres ini diharapkan mampu mewujudkan percepatan capaian target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJM 2020-2024 yaitu mencapai 65% jalan dengan kondisi mantap di daerah, hal ini bertujuan untuk melaksanakan penanganan terhadap keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan daerah yang rusak dan melalui Inpres tersebut Pemerintah Pusat saat ini diharapkan mampu bersinergi dengan OPD di daerah untuk melaksanakan penanganan jalan daerah tersebut.

Saat ini jalan provinsi kabupaten kota telah dialokasikan anggaran 64 triliun melalui APBD ditambah 12 triliun dari dana alokasi khusus dalam pelaksanaan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah ini diharapkan proses tender atau seleksi nantinya dapat dimaksimalkan dengan metode e-catalog sektoral dan sisanya dengan lelang umum. Jadi, dengan menggunakan e-catalog sektoral ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan tender seleksi barang dan jasa.

Bapak, Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati.

Kami melanjutkan paparan kaitannya dengan pemberdayaan penyediaan jasa konstruksi di daerah. Telah terdapat berbagai upaya yang telah kami lakukan untuk memerdayakan pengusaha lokal atau UMKM bidang konstruksi yang salah satunya melalui penerapan berbagai regulasi yang mendukung pemberdayaan pengusaha lokal UMKM dalam pengadaan barang jasa diantaranya regulasi adalah sebagai berikut.

Pemenang tender tidak dibatasi harus berasal dari lokasi pekerjaan di mana Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 5b menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan lebih transparan, terbuka dan kompetitif dan pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi setempat dapat berpartisipasi dalam pelaksana kerja konstruksi untuk pekerjaan dengan segmentasi besar melalui mekanisme sub kontrak menengah, sementara untuk yang menengah dengan mekanisme sub kontrak dan KSO, serta dapat langsung mengikuti tender untuk pekerjaan kecil, ini sesuai dengan Peraturan-peraturan Kepala LKPP No.12 Tahun 2021 baik Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan lebih besar 40% dari nilai anggaran belanja barang ataupun jasa untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana tertera pada Pasal 65 Perpres No.12 Tahun 2021. Untuk pengusaha non kecil yang mengikuti PBJ di Papua dan Papua Barat wajib memberdayakan pelaku usaha Papua baik dalam bentuk Kemitraan KSO atau pun Subkon kemudian yang KSO ini harus dipimpin oleh pelaku usaha Papua dan ini ditetapkan oleh PPK dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan atau MDP, ini sesuai dengan Perpres No.17 Tahun 2019 Pasal 18.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Selain penerapan berbagai regulasi tersebut diatas, pembinaan pengusaha lokal UMKM, Ditjen Bina Konstruksi juga melakukan upaya antara lain, pelatihan ahli pejabat teknis penanggung jawab badan usaha dan pejabat sub klasifikasi badan usaha di daerah, hal ini sesuai dengan keputusan Dirjen Bina Konstruksi PUPR No. 144 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Sertifikasi Badan Usaha Konstruksi di mana salah satu persyaratan tenaga kerja konstruksi, Badan Usaha Konstruksi adalah PJTBU dan PJSKBU, jadi kalau ini tidak mempunyai PJTBU yang keahliannya maka proses untuk perizinannya tidak dapat diproses melalui OSS atau pun *Online Single Submission* untuk mendapatkan NIB nya.

Kemudian yang kedua, adalah pelatihan SMKK, pelatihan ini meliputi pelatihan untuk petugas keselamatan K3 dan ahli K3 konstruksi, karena ini menjadi suatu kebutuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk memenuhi petugas K3 bila ingin mengikuti proses PBJ di APBN di lingkungan Kementerian PUPR. Hingga 4 April 2023 *output* pelatihan petugas keselamatan untuk K3 adalah sebanyak 6952 orang dan ahli K3 konstruksi adalah 3.366 sebagian besar ini sudah dimanfaatkan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di masing-masing daerah dan juga terakhir adalah pemberdayaan OPD atau Organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan OPD, Menteri PUPR mengeluarkan Permen 1 Tahun 2023 tentang Pedoman

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Provinsi baik kabupaten dan kota.

Dan untuk Bapak, Ibu yang terhormat,

Untuk perbaikan proses pengadaan PBJ kami sudah melakukan beberapa *review* kajian dan melayangkan surat Dirjen Bina Konstruksi kepada Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP di mana di dalamnya itu masukan untuk perbaikan dari Perpres tentang PBJ serta Perka LKPP yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, adapun poin-poin yang kami masukan adalah Pokja dapat melakukan klarifikasi secara fisik baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, karena selama ini yang bisa di cek adalah dokumen fisiknya tetapi untuk mengecek apakah peralatan itu betul-betul ada di lapangan dan itu layak, ini tidak diatur dalam Peraturan yang ada di atasnya.

Kemudian yang kedua adalah upaya pencegahan indikasi pinjam bendera, jadi di sini kita juga ingin bahwa yang pinjam meminjam bendera ini dieliminasi tidak akan diberikan ruang untuk dapat pinjam meminjam, jadi di sini untuk yang mengikuti proses PBJ, untuk perubahan akte pendirian termasuk cabang ini harus terdaftar dalam sistem AHU nya, MN Kumham yang dikelola oleh Kumham dan Perusahaan yang berstatus cabang wajib terdaftar dalam OSS, jadi harus dimasukkan dalam *Online Single Submission*, tidak hanya menggunakan akte notaris yang biasa dilakukan selama ini, jadi biasanya pinjam bendera ini akte notaris dibuat sebelum pemasukan penawaran.

Terkait dengan perizinan berusaha juga ini kami mengusulkan agar Pokja tidak perlu melakukan evaluasi terhadap kualifikasi usaha peserta pada pekerjaan yang mensyaratkan SBU spesialis, jadi kalau dia SBU spesialis tidak perlu lagi melakukan evaluasi kualifikasi dan ini sesuai dengan KBLI dan PP No.5 Tahun 2021 serta KBU 2015-2017 dan subklasifikasi KBLI 2020. Kemudian, kami juga mengusulkan untuk mengakomodir penerapan TKDN sehingga untuk tata cara perhitungan dan tabel rekapitulasi TKDN ini diamanatkan dalam Perpres atau pun Perka LKPP sehingga nanti bisa dimanfaatkan sebagai prevensi untuk harga penawaran. Kalau memang TKDN nya tinggi itu bisa mendapat prevensi khusus begitu.

Kemudian, ini juga untuk perubahan ketentuan persyaratan harga, jadi kalau penawaran di bawah 80% ini kami minta agar otomatis digugurkan saja tidak perlu dilakukan evaluasi atau evaluasi kewajaran harga karena ini memakan waktu sehingga lelang cukup lama terutama kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang *item* pekerjaannya cukup banyak seperti di Cipta Karya ataupun Perumahan, jadi memerlukan waktu yang cukup panjang lebih dari 45 hari.

Kemudian, mengusulkan penambahan persyaratan kualifikasi keuangan melalui penilaian laporan keuangan atau sumber modal lain, *offering letter* atau surat keterangan Bank terkait pemberian kredit atau rekening koran 3 bulan terakhir, karena ini PBJ yang sekarang untuk persyaratan ini tidak diwajibkan

sehingga Pokja tidak dapat mengecek kemampuan ataupun kekuatan dari BUJK yang mengikuti PBJ tentunya.

Kemudian, juga usul perubahan ketentuan evaluasi teknis yaitu kewajiban mensubkontrakan pekerjaan kepada penyedia jasa usaha kecil setempat, jadi ada kewajiban, jadi tidak bisa lagi dia boleh atau harus wajib memberikan sub kontrak kepada penyedia kecil lokal, serta usulan terkait beberapa penyesuaian dalam dokumen kontrak dan ini yang terakhir, Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat, Kementerian PUPR ini mendapat peringkat pertama penggunaan produk dalam negeri terbesar kemarin oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Menteri PUPR di Istana Senayan sehingga pada Tahun 2022 ini belanja infrastruktur PUPR yang sebesar 130,44% ini atau senilai 104,98 triliun dari rencana 80,48 Triliun atau 84% di atas dari target dan dari informasi Kepala LKPP, PDN yang sudah masuk e-catalog sebanyak 3,4 juta produk dari sebelumnya yang hanya 50 ribu, tentu ini Bapak Presiden dalam arahnya agar baik itu Kementerian Lembaga, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi kota kabupaten untuk memanfaatkan pembelian PDN melalui e-catalog, jadi kalau sudah masuk jangan hanya dibiarkan menjadi pajangan, harus dibeli dan dibelanjakan, percuma kalau tidak dibeli menurut Bapak Presiden.

Jadi komitmen belanja infrastruktur Kementerian PUPR dengan pemanfaatan PDN untuk Tahun 2023 ini sebesar 95% dari pagu atau kurang lebih 118,94 triliun, ini kami cukup memaksa karena memang kalau mau belanja impor harus ada izin berjenjang dari pejabat tinggi madya di bawah 1 miliar, kalau di atas 1 miliar harus izin Menteri, apabila ada substitusi didalam negeri tidak boleh untuk belanja dari impor dan ini menjadi obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal ada sanksinya. Jadi, PPK atau satker yang tidak membelanjakan PDN akan dicopot oleh Bapak Menteri.

Dan terakhir ini, kami dari Kementerian PUPR pada 16 Februari 2023 juga mendapat KPPU Award yaitu Tropi Madya kategori persaingan usaha tingkat kementerian pusat oleh KPPU yang diserahkan oleh Bapak Wakil Presiden, penghargaan ini merupakan apresiasi atas tata kelola yang baik dalam proses PBJ.

Bapak, Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Sebagai informasi bahwa pada tanggal tersebut juga, kami juga sudah melakukan beberapa upaya-upaya perbaikan terkait dengan Manajemen Anti Penyipuan atau SMAP di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, jadi ini adalah ISO 37001 2016 di mana Tahun 2021 itu kami telah mendapat sertifikasi ISO SMAP itu 8 BP2JK, Sumsel, Sumut, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan Sulsel. Jadi ada standar untuk manajemen anti penipuan bagaimana untuk cara menerima tamu, kemudian penempatan CCTV dokumennya termasuk interaksi dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi, jadi yang bisa diterima di kantor BP2JK ini hanya Kepala Balai dari Unor, jadi kalau seperti PPK atau Satker hanya di ruang khusus atau di ruang pembuktian dokumen.

Untuk Tahun 2022 ini kurang lebih ada 14 dan BP2JK ada 5 BJKW, jadi 9 BP2JK yaitu Aceh, Kepri, Riau, Sulteng, Jambi, Papua, Banten, Kaltim, Sulut serta BJKW Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Makassar. Di 2023 ini kami coba mengusulkan lagi untuk SMAPnya ada 6 dan 6 ini *alhamdulillah* termasuk yang di ujung timur Jayapura, BPJKW Jayapura, Banjarmasin, Lampung, Maluku Utara dan NTB, DIY.

Mungkin itu yang dapat kami jelaskan untuk itu kami harap nanti ada masukan dari Bapak, Ibu untuk upaya perbaikan PBJ ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dapat didiskusikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

*Wabilahi taufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirjen Bina Konstruksi. Untuk mempersingkat waktu ya karena ini bulan puasa ya. Saya tidak ingin mengulas dulu apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen Pak Dirjen sorry, Pak Dirjen Bina Konstruksi kita langsung saja ke pendalaman dari Anggota.

Yang pertama, Pak Hamka dipersilakan. Bersiap-siap Bu Sri Rahayu.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati.
Pak Dirjen dan seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini.**

Izinkan saya menyampaikan beberapa hal Pak Dirjen, apa yang Bapak sampaikan itu secara teori saya kira kita bisa terima, tetapi namun demikian yang memutuskan itu adalah manusia juga Pak, ada hal yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan ini tidak terjadi, sudah menjadi pengetahuan umum di luar bahwa perusahaan-perusahaan yang disewa itu ada yang mengkoordinir dan itu-itu saja, namun saya lihat tadi sudah ada keterangan yang disampaikan bahwa akan mengurangi hal-hal yang seperti ini, ini kita tidak usah munafik Pak di sini, itu sudah menjadi rahasia umum lah, kalau memang itu terjadi ayo mari kita perbaiki, kami yang menentukan anggaran di sini, kami yang menyetujui anggaran tetapi dengan mekanisme yang ada, manusia yang memutuskan Pak dan ada kelompok yang menyetir itu sendiri, kita tidak usah munafik Pak, pasti ada saya jamin itu, semua yang kita hadir P2JK di sini tidak usah munafik deh, kemukakan yang sebenarnya Pak, kalau saya mau bongkar ya saya bongkar juga. Apa yang disampaikan ini teori, bayangkan itu kualitas pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab kalau belum waktunya infrastruktur itu sudah rusak, belum lagi putus kontrak, ini loh Pak.

Pada kesempatan ini Pak Ketua, apalagi nanti ada Inpres mudah-mudahan jadi, kalau secara total kalau bisa setiap case itu kita bentuk Panja untuk menelusuri itu, Pak tolong apa yang Bapak sampaikan itu teori, teorika di sini, narasi Bapak cantik sekali tetapi di pelaksanaannya Pak jujur tidak usah kita munafik dan ada kelompok yang menyetir itu, saya dapat banyak cerita Pak.

Jadi, pada kesempatan ini apa yang dipaparkan itu baik sekali apalagi menuju e-katalog, e-katalog itu perlu kita ikuti dengan baik, saya banyak data si A, si B, si C di sana siapa yang berkoordinasi, siapa yang menyelesaikan di luar, ini Pak tolong jangan kami diberi penjelasan padahal kejadian-kejadian yang ada di bawah itu masih ada dan masih masif Pak, coba bayangkan kalau itu terjadi, kami penonton Pak, tidak bisa intervensi Bapak-bapak. Jadi, sekali lagi saya katakan semua apa yang terjadi tahu Pak ada oknum yang sengaja mengurus untuk itu dan *ending*-nya juga kepada beberapa orang begitu loh.

Jadi Bapak sekalian, Pak Dirjen yang saya hormati dan seluruh jajarannya. Kita berteori di sini menggambarkan yang manis-manis tetapi pelaksanaannya nol, semua bermasalah, ini saya Pak Ketua meneliti ini saya kira perlu kita cermati betul apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi ini bagus tetapi sebagus-bagusnya sistem manusia juga yang menentukan itu jadi apa tidak, perusahaan-perusahaan yang ada sekarang Pak banyak rental-rental, yang mengkoordinir hanya satu, pemenangnya hanya satu pemilihnya, nama perusahaannya berbeda-beda, pemiliknya cuman satu orang karena punya *link* di dalam.

Jadi saya harap di sini tidak usah membuat narasi dan retorika yang baik-baik saja tetapi pelaksanaannya yang tidak jelas, saya ingin mau melihat prosesnya sebenarnya sampai sejauh mana satu keputusan itu, kita tidak terintervensi sampai sejauhmana proses pengambilan keputusan itu berjalan sesuai dengan ketentuan apa tidak, ini sekian banyak uang di Kementerian PU, infrastruktur lagi Pak.

Oleh karena itu Pimpinan, saya lebih banyak lagi punya data dan nanti kita ketemu di lapangan dan kalau perlu kita tidak intervensi, kalau perlu seluruh proses sampai pemenang tender itu kita ikuti tetapi kami tidak mencampuri, prosesnya kita ikuti kalau tidak melanggar aturan, siapa yang memutuskan, jangan dibiarkan begitu Pak, kasihan ini infrastruktur Pak, pilih harga yang termurah, kalau e-katalog ya itu pun juga masih banyak kelemahan yang ada.

Saya apa yang disampaikan secara teori ini dan narasinya semua bagus, mari kita jujur, ayo kita jujur, kita blak-blakan, kita tunjukkan yang sebenarnya tidak ada satupun yang bisa melakukan hal-hal yang tidak benar, periksa diri sendiri, jujur pada diri sendiri.

Saya kira itu Pimpinan yang ingin saya sampaikan, saya tidak mau masuk detailnya, narasinya bagus, penjelasannya bagus, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Catatan saya mari kita ikuti satu proses pengambilan keputusan, jangan dilarang kalau tidak bertentangan dengan

undang-undang, bagaimana proses pengambilan keputusan pemenang itu, harus kita ikuti dan bisa dibuktikan dengan benar.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Hamka.

Selanjutnya saya langsung ke Bu Sri Rahayu, bersiap-siap Pak Soehartono.

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Bismillahirrahmanirrahim,

**Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati,
Pak Dirjen dan seluruh jajaran, seluruh Indonesia yang hadir.**

Pada kesempatan hari ini saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Hamka, data yang Bapak sampaikan keterlibatan penyedia jasa lokal *Alhamdulillah* mudah-mudahan seperti yang diharapkan tadi betul-betul memang 83,6% paket sebanyak 584 ini betul-betul penyedia jasa lokal sehingga terus terang kalau ini betul-betul terjadi ya kita betul tetapi kalau benar atau tidak, apakah yang punya itu orang di luar lokal atau bukan itu yang perlu kita tindaklanjuti, yang kita lihat.

Kemudian, yang saya inginkan yang kedua, berdasarkan data juga dari Bapak yang progres pelaksanaan kontrak di tahun 2022 saya ingin contoh saja satu atau dua penyedia jasa konstruksi dan kemudian sudah melaksanakan di tahun 2022 yang mendapatkan atau yang menang tender prosentase terendah *nggih*, prosentase terendah, setelah Bapak lihat meskipun tugas Bapak bukan di situ tetapi paling tidak tau bagaimana implementasi progres di lapangan dengan kualitas hasil speknnya terpenuhi kualitasnya, demikian prosesnya itu sesuai dengan *schedule*, tolong saya diberikan contoh di mana kemudian prosentasenya berapa dari yang diajukan sehingga dia menang ya, terpenuhi *quality*-nya, kemudian prosesnya sesuai dengan *schedule* tanpa ada tambahan kesempatan sesuai dengan yang Bapak sampaikan.

Nah, kemudian kira-kira yang sudah yang di Tahun 2023 ini kami juga diberikan beberapa contoh di mana yang menang proses tender di Tahun 2023 yang sudah Bapak sampaikan bahwa di sini sudah ada di Tahun 2023, tolong sampaikan informasi ini kepada kami sehingga kami nanti tentu akan melakukan pengawasan di lapangan ketika baik itu melakukan kunjungan spesifik maupun kunjungan reses.

Kemudian yang terakhir Pak, Bapak tadi menyampaikan tentang sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP ini sesuatu upaya yang bagus, Daerah-daerah yang sudah Bapak sampaikan mulai dari yang bersertifikat maupun yang tahapnya masih berproses, mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang bagus untuk di lingkungan Bapak tetapi saya juga ingin tanya

adakah yang sudah ber ISO ini ada *problem* di wilayah Bapak, karena ini semuanya sistem seperti yang disampaikan tadi manusia pelaksananya adalah manusia bukan mesin semua, jadi saya mohon contoh-contoh yang sekiranya saya setuju dengan apa yang disampaikan Bapak ini, ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang kita harapkan tetapi toh kalau pun toh masih ada kebocoran-kebocoran itu di mana sebenarnya kebocoran itu sehingga kita atau Bapak bisa melakukan perbaikan-perbaikan dengan sistem yang ciptakan ini, saya kira itu dari saya Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Sri Rahayu.
Pak Soehartono silakan.

F-P. NASDEM (Drs. H. SOEHARTONO):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu Anggota Komisi V DPR RI.
Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Konstruksi berikut jajarannya.**

Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mengevaluasi penyelenggaraan proses tender, proses tender itu adalah proses pemilihan ketika pemenang ditentukan kemudian hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan atau dengan kata lain putus kontrak itu sebuah kegagalan, karena panitia tidak bisa memilih kontraktor yang benar, *gimana* itu definisinya kontraktor yang benar itu.

Saya membaca ada usulan perbaikan regulasi dari Pak Dirjen dan ini juga bagus ada tambahan usulan tetapi saya ingin menambahkan usulan kepada Pak Dirjen agar proyek-proyek yang bersifat khusus *major item*-nya contoh misalnya jalan dengan pengecoran pakai rigid itu harus disyaratkan kontraktor yang bakal ditunjuk, harus mempunyai alat tersebut dan atau bekerja sama dengan pengusaha yang diperlukan, jadi kalau itu menyangkut rigid itu *bagging plant* kalau itu menyangkut aspal itu namanya *asphalt mixer plant*, dua bidang industri konstruksi itu jangan disamakan dengan industri-industri yang bersifat umum misalnya besi beton, besi beton itu kalau produksi setahun tidak laku tidak apa-apa, dua tahun tidak laku juga tidak apa-apa, tetapi dua bidang ini, dua industri ini baik *bagging plan* maupun IMP itu hanya perlu mingguan atau harian, lebih dari katakan dua hari saja itu produksi sudah hancur atau tidak bisa dipakai, itulah kategori bersifat khusus.

Oleh karena itu, tender-tender masa lalu sebelum ada P2JK ini, sebelum ada ini, itu dulu disyaratkan Pak, ini saya melihat tidak disyaratkan sehingga banyak sekali tender-tender yang diikuti oleh orang di luar area, katakan tendernya di Jawa Tengah yang ikut adalah orang Sumatera, orang Kalimantan dan sebagainya tentu dia tidak akan bisa membawa alat yang bersifat spesifik tadi, jadi *bagging plan* dan IMP itu sangat spesial tidak bisa dikatakanlah saya punya IMP saya pindah, itu tidak bisa, bagaimana proyeknya saja cuman 6 bulan pindah halang.

Jadi hal-hal itulah yang nanti bisa disyaratkan sehingga bisa meminimalisir kegagalan. Tahun ini di dekat daerah saya sudah ada kegagalan proyek, jadi putus kontrak karena apa, karena pemenangnya itu orang jauh yang dari lokasi kemudian *major item* nya itu *hotmix* mereka nggak bisa beli, sudah akhirnya putus kontrak.

Lah kegagalan-kegagalan konstruksi itulah menurut saya bukan sebuah prestasinya Bina Konstruksi, Bina Konstruksi dibentuk itu agar menghindari kegagalan proyek-proyek seperti begitu, karena untuk memenangkan tender itu di undang-undang juga ada Pak, tidak harus harga yang terendah, kategori menguntungkan negara itu bukan harga yang terendah tetapi harga yang bisa dipertanggungjawabkan, *nah*, memilih penyedia jasa yang bisa dipertanggungjawabkan ini yang sangat sulit.

Oleh karena itu intinya saya ingin mengusulkan agar di dalam perbaikan regulasi yang Bapak ajukan ini dimasukkan dua unsur aplikasi atau industri konstruksi yang bersifat khusus tadi baik itu *bagging plan* maupun *asphalt mixer plant* itu Pak Dirjen yang ingin saya usulkan agar kegagalan-kegagalan berikutnya itu tidak akan terjadi lagi.

Kemudian, saya ingin agak teknis itu di sini ada usulan dari Pak Dirjen ya, menurut saya mesti harus tegas ya kan di sini ada usulan penambahan persyaratan kualifikasi keuangan bentuknya kayak apa, itu kan usulan persyaratan kualifikasi keuangan ini kan sangat tidak jelas maunya apa, apakah dengan laporan pertanggung jawaban neraca yang disahkan oleh akuntan publik sah itu yang disyaratkan ini harus jelas Pak sehingga penyedia jasa nanti juga tidak apa tidak kesulitan.

Saya kira itu Pak dari saya, jadi titipan persyaratan dua produksi yang bersifat *major item* itu harus sangat ketat dan jelas. Jadi, kalau tidak punya itu ya sudah *drop* dan kemudian usulan yang 80% ke bawah ini bagus ini Pak, ketentuan persyaratan harga jika ada penawaran 80% APS maka dinyatakan gugur evaluasi harga, itu bagus, bahkan lebih tinggi lebih bagus itu, karena apa? Karena resiko kegagalan pasti berkurang, saya kira demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Soehartono.

Selanjutnya Pak Tamanuri, bersiap-siap Pak Bob Andika.

F-P. NASDEM (Drs. H. TAMANURI, M.M):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pak Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan,
Yang saya banggakan Pak Dirjen Bina Konstruksi beserta seluruh jajaran
dari daerah, ini Pak Roni dari Lampung ya, ya belum kenal kita Pak,
kantornya saja saya nggak tahu nih.**

Saya secara seksama menelaah dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen masalah teori-teori yang akan dilaksanakan dalam rangka kita akan mengadakan tender dan lelang, kalau dari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya *Alhamdulillah* baik dan cukup baik, hanya saja tinggal lagi kita bisa mempertahankan nggak ini, jangan hanya aturan, peraturan, ketentuan tetapi kita tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, terutama tadi menyampaikan bahwa keterlibatan kontraktor lokal, *nah*, ini sangat baik sekali sebab dengan keterlibatan kontraktor lokal dia tahu persis kondisi kontraktor itu dari a sampai z apakah dia itu mempunyai pendukung alat-alat berat dan segala macam atau tidak, ini kan banyak di lapangan itu, yang kawan-kawan kita dari daerah-daerah lain itu ingin mendapatkan kerjaan tidak didukung oleh alat-alat berat yang akan mengerjakan pekerjaan itu, sehingga pada suatu ketika karena antri untuk menyewa alat-alat berat ini terjadilah keterlambatan bahkan pemutusan hubungan, *nah*, kalau sudah sampai disitu, siapa yang bertanggung jawab ya harus kita ulangi lagi kan berarti ini tidak efisien.

Nah, oleh karena itu di samping apa yang sudah kita sampaikan ini tadi pengawasan harus betul-betul dilaksanakan, kalau tidak ya tidak ada artinya, sekarang ini kita kan main kertas saja, permainannya di Jawa Timur situ, yang menawar dari Papua situ, dari mana-mana yang dilihat itu kertas, tidak dilihat secara fisik, apa material pendukung yang harus dilaksanakan dan juga saya harapkan saya adalah di sini masih kurang ini, jangan kontraktor itu mengandalkan uang yang ada di dalam uang muka, ini jangan seperti itu, justru kita harus, dia harus bisa menunjukkan dia punya berapa persen duit, 30% ada di Bank sebagai jaminan dia, sehingga kalau dia pada suatu ketika tidak bisa melaksanakan ini sebagai pertanggungjawaban dia kepada pemerintah. Ini kan kebanyakan seperti itu, begitu dia putus di tengah jalan nggak ada yang bisa pegang. Sedangkan kita sudah dikejar oleh waktu, saya tidak tahu Pak saya orang awam di bidang konstruksi, saya orang pemerintahan, tetapi saya melihat hasil seperti jalan tol itu Pak dari Bakauheni sampai ke tempat saya Bandar Lampung itu tidak satu kilometer pun yang tidak ada rehab, rehab semua, tidak tahu ini bisa sampai beres menghadapi hari lebaran atau nggak, rehab semua.

Kemudian, di jalan negara saya sendiri menyaksikan bahwa baru tiga bulan terhitung dari Nataru sampai 3 bulan saya datang ke situ, sudah amblas,

hancur lagi, ini konstruksinya apa ini, jadi waktu pelelangannya bagaimana ini, *nah*, ini juga kita harus masukkan sebenarnya, supaya mereka-mereka ini diberi denda, jadi kita kasih satu sanksi lah supaya mereka ada rasa bertanggung jawab mereka, *nah*, inilah kira-kira yang saya patut sampaikan pada Bapak, jadi kalau teorinya memang bagus sekali ini, sebab kita orang Indonesia ini luar biasa hebat Pak, Tahun 1965 datang bemo, bemo itu diperkirakan hanya 5 tahun, bisa 30 tahun diutak-atik bisa, begitu juga yang ini, nanti baru satu tahun ini e-katalog ini tahun keduanya wah sudah ndak tahu kita celah-celahnya apa yang harus bisa kita masukkan di situ, saya rasa demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tamanuri.
Pak Bob silakan.
Bersiap-siap Pak Ishak Mekki.

F-PDIP (BOB ANDIKA MAMANA SITEPU, S.H):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V DPR RI beserta seluruh Teman-teman Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Konstruksi beserta seluruh Kepala BP2JK seluruh Indonesia.**

Saya langsung saja Pak, Pak Dirjen sebenarnya kalau di Kementerian PUPR ini Bina Konstruksi inilah ujung tombak suksesnya tidak pembangunan yang direncanakan oleh Pak Menteri, kenapa saya bilang begitu? Karena proses pemilihan dari Bapak itu menentukan bagus tidaknya terhadap pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya Pak, saya langsung saja Pak, berkali-kali saya sudah pernah bilang ke Pak Dirjen mengenai BP2JK di daerah saya Sumut Pak, tadi seperti dibilang Pak Hamka memang betul itu kejadiannya Pak, banyak terjadi kelompok-kelompok tertentu yang bisa menjadi pintu masuk untuk menjadi penghubung untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan tersebut Pak, kenapa saya bilang begitu Pak, contohnya di Dapil saya Pak, itu aspirasi saya Pak, tidak usah saya bilang aspirasi saya di mana tetapi perlu nanti Kepala BP2JK ini saya baru kenal ini Kepala BP2JK perlu nanti Bapak sampai tanya Kepala Balai Jalan di Sumut Pak, pertama aspirasi saya perusahaan itu juga yang mengerjakan itu tidak beres, saya komplain Pak, karena terjadi keterlambatan dan banyak meninggalkan utang di daerah tersebut.

Kedua, dia juga ditetapkan pemenang Pak dan saat sekarang kerjaan itu kena denda dan putus kontrak, ini bagaimana sistem yang Bapak laksanakan ini tetap itu-itu juga pengusaha yang dapat, sudah pertama pun

tidak layak, kedua itu juga ditetapkan orangnya sama dan hari ini Pak, pekerjaan tersebut putus kontrak dan mangkrak, yang efeknya terhadap kami sebagai Anggota Komisi V yang selalu ditanyai masyarakat Pak.

Selanjutnya Pak, tadi saya lihat banyak usulan-usulan perbaikan regulasi PBJ ini, saya rasa ini Pak hanya teori yang Bapak sampaikan kepada kami, kenapa saya bilang seperti itu Pak, kalau saya lihat tadi contohnya Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi secara fisik baik terhadap fisik dokumen maupun terhadap fisik peralatan apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, apakah sarana dan prasarana BP2JK Bapak yang di daerah ini sudah Bapak lengkapi, karena selama ini yang menang-menang di daerah kita ini Pak ini rata-rata dari luar perusahaannya Pak, bagaimana ini sekarang BP2JK Bapak untuk mengevaluasi ini ke luar kota perusahaan-perusahaan tersebut apabila sarana dan prasarannya tidak Bapak lengkapi.

Kedua, Bapak bilang tadi mengusulkan penambahan ketentuan baru sebagai upaya untuk pencegahan indikasi pinjam bendera. Pak, kita sama-sama tahu Pak, ini ada Ketua LPJK, ini pinjam bendera ini Pak, ini sekarang dengan Bapak sampaikan tadi harus terdaftar di AHU Kemenkumham, sekarang sudah pandai para pengusaha ini Pak, ini kan tergabung dalam asosiasi Pak, mereka saling percaya, tidak pun mereka ada di akte notaris saja Pak masuk tetapi kalau mereka saling percaya Pak sipemilik perusahaan ini pasti mengasihkan perusahaan itu tanpa harus ada oper direksi Pak, karena mereka punya pertemanan Pak, ini yang terjadi sekarang Pak.

Jadi, sekarang ini tidak usah istilahnya ini dibaliknamakan pun semua pasti yang punya perusahaan ini pasti akan mengasih perusahaan mereka karena mereka perlu juga perusahaan mereka disewa Pak, karena dapat jasa sewa Pak daripada perusahaan mereka tidak dipakai, tidak dapat kerjaan, ini jelas juga yang mereka kasih perusahaan ini kepada orang yang sudah jelas dapat lampu hijau dari BP2JK Bapak di daerah.

Jadi yang Bapak sampaikan kepada kami ini regulasinya teori semua Pak, teori, karena pelaksanaannya semua itu di staf Bapak, berkali-kali saya bilang Pak di Sumut ini perlu Bapak bongkar, perlu dikeluarkan semua, apa yakin Bapak seorang Kepala BP2JK Sumut ini 24 jam bisa melihat stafnya kemana langkah mereka bisa bertemu dengan pihak-pihak tanda kutip yang ingin coba untuk mendapat pekerjaan tersebut, apa mungkin Bapak rasa Kepala BP2JK ini bisa memantau kegiatan teman-teman staf-stafnya di bawah yang dipercaya untuk menseleksi itu sampai 24 jam tidak mungkin Pak, sedangkan Kepala BP2JK Bapak ini sering ke luar kota.

Jadi, hal-hal tersebut tidak usah dikasih ke kami ini perbaikan-perbaikan regulasi-regulasi yang terlalu banyak teori yang Bapak sampaikan kepada kami, tetapi fakta di lapangan nol saya lihat. Jangan ada buka warung lagi Pak di luar-luar sana, cukup ini Bapak bilang tadi sampaikan setelah tadi kita mendapatkan ISO-ISO itu, itu kan CCTV nya di kantor Pak, kecuali Bapak kasih CCTV ini mereka bawa terus ke mana mereka berada sampai di rumah mereka, tetapi kan tidak mungkin Pak ISO-ISO ini pun Bapak sampaikan tadi kita tidak percaya Pak, karena Bapak tidak bisa memantau staf Bapak sampai 24 jam,

sekarang yang penting Pak bagaimana membenahi ini ke depan apabila sudah terdapat staf Bapak disitu bermain yang Bapak sampaikan, tolong Pak kalau bisa jangan terlalu lama di daerah-daerah tersebut dia ditempatkan, kalau bisa regulasi-regulasinya Pak mereka kalau sudah setahun pindahkan saja Pak, tidak usah mereka sampai buat kerajaan disitu Pak, berkali-kali sudah saya sampaikan kepada Bapak tetapi ini hal terjadi, ini karena aspirasi saya Pak, kalau tadi hal yang lain saya tidak peduli Pak, ini aspirasi saya sendiri, pertama kontraktornya itu tidak siap kerjanya, lewat masa waktunya. Kedua, itu juga mangkrak dan putus kontrak, itu tolong Kepala BP2JK coba tanya kepada Kepala Balai jalan di Sumatera Utara, Bapak seleksi itu staf Bapak.

Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Ketua, saya ucapkan terima kasih.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Makasih Pak Bob. Kemudian Pak Ishak Mekki, siap-siap Pak Eddy Santana.

F-P. DEMOKRAT (Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan yang saya hormati,
Pak Dirjen dan juga BP2JK se-Indonesia yang sempat hadir, Rekan-rekan
Komisi V yang saya banggakan.**

Pertama, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu adalah etikat untuk perubahan yang lebih baik karena saya dapat informasi juga dari para kontraktor ya tahun ini Pak Ishak kita sudah menggunakan e-katalog, jadi tidak harus harga yang terendah, jadi ini adalah suatu bentuk perubahan dan perubahan ini harus dikawal agar betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita, karena kalau tahun pertama saya yakin ini semua akan melaksanakan, tetapi tahun kedua, ketiga ini akan kongkalingkong lagi, akan berkolaborasi lagi, akan lebih diakali lagi bagaimana supaya tender ini bisa didapat orang-orang yang tidak semestinya.

Nah, harapan saya dengan adanya ini tolong kita kawal dan berikan kesempatan kepada BP2JK melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, kalau selama ini saya berikan satu contoh di Sumatera Selatan, seperti proyek penataan sungai labindaro, tahap pertama berjalan baik bahkan ada tersendat-sendat juga tetapi *Alhamdulillah* dapat selesai. *Nah*, tahap kedua itu tidak selesai, pekerjaannya lamban, sudah dikasih waktu tiga bulan tidak selesai, bahkan saya kasih *statement* di lapangan balai harus menentukan sikap untuk tegas bila perlu diputus kontrak, *Alhamdulillah* diputus kontrak, ini sungai Labindaro. *Nah*, anehnya lagi kontraktor ini dapat lagi proyek di *flyover* gelombang Prabumulih dengan memakai bendera atau perusahaan orang lain tetapi saya dengar dia juga yang mendapatkan dan ini sampai hari ini sudah empat bulan tidak bekerja, *nah*, ini tidak bekerja.

Nah, ini saya khawatir akan putus kontrak ini, memang tawaran terendah secara kasat mata, secara menguntungkan negara tetapi setelah berjalan itu merugikan negara karena banyak kendala-kendala, masyarakat lambat menggunakan pemakaian apa yang dilaksanakan, kedua juga akibatnya banyak juga yang dirugikan akibat keterlambatan tersebut.

Nah, tolong ditinjau, diberi teguran khusus yang sekarang ini belum bekerja sudah empat bulan, saya dengar penawarannya terendah dan itu sistem dua tahun, *multiyears*, *nah* tahun pertama konstruksi, *nah*, konstruksi ini dia tawarkan dengan lebih baik harganya, tetapi tahun kedua non konstruksi itu di tahun dengan hancur-hancuran, *nah*, ini sangat khawatir ini strategi daripada pemborong untuk mendapatkan kerjaan, diambil dulu nanti ya putus kontrak tidak apa-apa yang penting tahun pertama sudah saya kerjakan dan menguntungkan, *nah*, ini tolong dievaluasi.

Ketiga, sekarang ini baru pengumuman tender, ini juga aspirasi saya seperti danau telogo, *nah*, aneh ini kan ada perencanaan, ada surveinya, ditawar dari 129 miliar, ditawar 77 miliar, *nah*, saya khawatir ini apa gunanya HPS yang dibuat oleh *owner*, *nah* tolong diperhatikan jangan sampai ini terjadi karena saya khawatir kalau diberikan yang terendah lagi pasti akan membuat kendala dan akan merugikan masyarakat dan merugikan negara, ini saja mungkin dari saya.

Terima kasih.

*Wabilahi taufik wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pak Ishak.
Pak Eddy Santana.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi V beserta Anggota yang saya hormati.
Dirjen Bina Konstruksi beserta seluruh jajaran yang saya hormati.**

Jadi, kalau melihat perjalanan dari dahulu sampai sekarang proses-proses tender ini, saya kira sekarang ini tidak juga lebih baik walaupun ini e-tender katanya, *electronic* tender atau pun nanti menuju e-katalog, saya pernah menyampaikan juga disini, mohon maaf saya ulangi, kalau dulu, dulu penyedia jasa ini ditentukan misalnya hari Senin jam 10 tawaran masuk, masuk kotak gitu, ini sistem lama, bisa sistem dua amplop atau satu amplop, amplop coklat yang dilakban, *nah*, sampai di kantor *owner* katakanlah PU ya, PUPR ini saya contohkan di daerah, karena saya juga pernah kepala dinas, pernah pelaku, yang terjadi apa, misalnya ada 10 disyaratkan 7 kontraktor yang masuk harus,

itu di luar pagar, di luar pagar itu sudah diganggu orang yang mau masuk. Jadi, ada premannya Pak, *nah*, kelompoknya ini kelompok yang bakal dapat yang kira-kira ini mengelompok sendiri tetapi bukan PU yang ngatur, mereka di luar, di luar mereka kompak kalau di luar kami itu kita usir tidak boleh masuk ke pagar PU artinya terjadilah nanti masuk ke ruangan itu kelompok mereka sendiri penyedia jasanya, ya pasti dapat dia, setuju itu punya dia semua, punya teman-temannya, punya kelompoknya jadi bisa diatur harganya, tetapi harganya bagus pasti.

Nah, ini dulu dan dulu juga ada yang namanya *unbizing* artinya kita penyedia jasa itu melihat lapangan, bagaimana mungkin kita mau nawar tidak tahu lapangan, apalagi itu di SDA saya contohkan ini tempat saya di Karang Agung nanti nawar dari mana-mana, ya katakanlah dari Jawa, dari Sumatera sendiri dari Kalimantan dari mana nggak pernah lihat di situ tawar dan menang lagi dan ini yang terjadi sekarang, kalau dulu *aanwijzing* lihat lapangan, lihat peralatannya, panitia bisa melihat peralatan yang disampaikan teman-teman, ada tidak dia AMP nya, ada tidak dia *ready mix* nya untuk beton, kalau tidak ada dengan janji iming-iming bahwa kami akan bisa *install* dalam waktu cepat dari daerah itu hal yang tidak mungkin saya kira atau kerja sama juga kadang-kadang *ecek-ecek itu*.

Jadi hal inilah yang terjadi kalau dulu premannya di luar pagar, kalau sekarang di dalam ruangan premannya Pak, dia bisa mengatur semua itu, ini yang terjadi dan jangan dikatakan BP2JK daerah itu tidak kordinasi dengan Dirjen, koordinasi walaupun ada batasan mungkin, batasan sekian miliar itu keputusannya, kewenangannya di daerah, di atas kewenangannya di pusat penentuan pemenang dan sebagainya, yang terjadi apa? Semuanya juga harus koordinasi.

Saya kira ini yang sekarang, jadi sistem inilah dan sepertinya Pak Dirjen dan teman-teman menyiapkan ini sudah tahu oh ini bakal ditanya ini, jadi kita buatlah yang ini, tadi disampaikan, ini retorika Pak, jadi semua bagus, ini akan kita usulkan perbaikan, itu usulan dan baru lagi usulan ini, perbaikan ini tanggal berapa itu, tanggal 28 Maret 2023 surat Dirjen Bina Konstruksi ini kita akan melaksanakan perbaikan-perbaikan, nanti panitianya, Pokjanya bisa melakukan apa verifikasi fisik dokumen, fisik peralatan kemudian juga ini ada usulan pencegahan imigrasi pinjam bendera, ini yang bagus semua.

Jadi inilah yang harus kita lakukan tetapi tidak dilakukan berapa tahun ini sudah dan kita sampaikan berkali-kali sebagai contoh ada penawaran di bawah 80% itu kita sudah sampaikan dari dulu, memang ada surat Dirjen bahwa kalau ada di bawah 80% itu ada verifikasi khusus, *nah*, ini sudah bagus juga tetapi kenyataannya masih banyak yang 70% bahkan 65%, 60% diberikan dimenangkan juga, bagaimana ke depan ini, bagaimana ini bisa mengerjakan yang disampaikan teman-teman tadi ada *owner estimate price* HPS (Harga perhitungan sendiri) bagaimana *ngitungnya* misalnya 100 miliar, tahu-tahu ditawarkan 7 miliar diberikan, siapa yang salah, bisa yang salah yang menghitung tetapi saya kira tidak mungkin salah hitung karena semuanya sudah *computerized*, ditawarkan 70 diberikan, *nah* hal ini yang terjadi.

Akhirnya apa? Korbanlah konstruksi di lapangan, jalan jembatan, jembatan jarang, jalan yang paling mudah atau di pengairan SDA, dua yang dikorbankan *quantity* dan *quality*, volume sudah dikurangi, kualitas juga dikurangi, maka cepat hancur jalan-jalan, tiga bulan hancur, yang disalahkan ya itu kekuatan jalannya hanya sekian ton, yang disalahkan ODOL lagi, *over dimension*, *over load*, nah, ini yang terjadi sekarang ini. Jadi Pak Dirjen dan jajaran, ini yang pertama.

Yang kedua, ini benar apa data Bapak ini yang lokal diberikan datanya sampai 83%, tolong di tempat saya Pak data detail saya minta Pak di Sumatera Selatan lokal mana yang 80% itu yang dapat paket ini, sedangkan kontraktor-kontraktor lokal mengeluh kami ini gimana caranya mau dapat itu, tidak bisa, mereka katakan tidak bisa kami dapat kalau tidak ada kawalan, jadi pengawalan-pengawalan ini memang terjadi begitu, kita tidak usah inilah, terjadi seperti itu, kalau tidak dikawal tidak bisa dapat APBN ini.

Nah, kemudian, tadi sama yang disampaikan ini, jadi masalah SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) nah, Bapak lihat di Sumsel itu kantornya saja seperti itu, sudah representatif untuk melaksanakan ISO SMAP ini, dilihat kantor nyewa berantakan begitu, kenapa dipercepat saja dibangun baru atau apa, memangnya PU nggak ada uang *gitu*, lahan juga ada, saya dengar mau digabung di Balai Besar Jalan Jembatan, tanahnya luas, bisa saja disitu bersama-sama, sangat tidak representatif, tadi sama kalau SMAP ini dasarnya hanya kantornya saja diberikan semua CCTV dan sebagainya bagaimana kalau orang ketemu diluar, tidak ada yang ketemu Pak di kantor, pasti hal-hal yang seperti ini ketemunya di luar itu dan diam-diam bahkan di luar kotanya.

Nah, yang terakhir Pak, saya juga mohon proses e-katalog ini diberikan tata cara proses ini secara detail Pak, implementasinya bagaimana Pak, karena ini kan penyedia jasa ini mendaftar begitu Pak, nah, saya minta mulai dari situ Pak, mohon jawaban tertulis Pak, mendaftar seperti apa yang disampaikan di sini, yang bisa sudah dilaksanakan e-katalog, seperti alat berat OP SDA, bahan banjir, bahan banjir ini apa, istilah baru saya dengar bahan banjir itu, peralatan atau apa ini dan lain sebagainya, misalnya penjualan beton begitu ya satu kubik berapa begitu e-katalog dengan kualifikasi, kualitas beton yang berapa K175, K225, K350 begitu, nah, ini kan harganya seperti itu. Nah, yang menentukannya siapa e-katalog, yang kliknya siapa, kan di dalam juga artinya kemungkinan besar ada kerja sama juga nanti kontraktor di luar, penyedia jasa dengan yang dalam, tolong klikkan kami saja, ini bisa terjadi seperti itu.

Saya mohon ini diberikan detail implementasi, tata cara penunjukkan e-katalog ini bagaimana, karena ini juga ada persaingan begitu, pasti ada persaingan, beberapa perusahaan memasukkan yang sudah terdaftar di e-katalog, yang sudah terdaftar, tinggal yang dalam tolong klikkan kami tidak bisa terjadi seperti itu, mohon ini diberikan sekali lagi secara detail proses ini Pak, saya setuju dengan Pak Hamka tadi kalau perlu diadakan Panja khusus ini urusan tender kita ini, tender kita ini bagaimana supaya perbaikan ke depan supaya lebih baik, supaya juga pengusaha lokal punya kesempatan ataupun juga yang pernah saya usulkan *zoning* Pak, jadi misalnya Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, Kalimantan, jangan kita ngacak dari

Palembang nanti, dari Sumsel memborong kontrak di Papua sangat tidak mungkin itu Pak saya kira, mereka itu peralatannya bagaimana, sumber daya bagaimana, sumber daya manusianya itu, ini mohon juga kita, saya menyampaikan ini untuk perbaikan kita semua ke depan bagaimana begitu ya, banyak sekali keluhan-keluhan juga termasuk internal sendiri Pak, keluhan dari *unor-unor* sebenarnya, ya mungkin di dalam secara diam tetapi di luar menyampaikan, kami ndak suka mendengarnya dengan apa yang kami hitung, APS yang kami hitung tetapi yang tenderkan orang lain, nanti berikan ke kami lagi dengan harga yang rendah sehingga kami lah yang akan menanggungnya, Bina Marga yang menanggung akibat dari penawaran rendah itu.

Terima kasih saya kira ini Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Eddy.
Senior kita Pak Sudjadi silakan Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan, Teman-teman Anggota dan Bapak Dirjen dan Bapak Taufik.

Saya hanya ingin bercerita tidak apakah dulu baik atau jelek, apakah sekarang baik atau jelek itu tergantung rasa kita mendalami. Jadi, pada waktu zaman Pak Harto itu program tender ini sudah dibagi tiga wilayah, sekian miliar itu pengusaha nasional, sekian miliar itu pengusaha provinsi terus sekian miliar itu kabupaten dan penjanganya hanya satu namanya Gapensi, Gapensi sekti sekali karena bendaharanya meski menjadi bendahara Golkar, ini fakta. *Nah*, sekarang satu-satunya yang menjadi sandungan kita itu bahwa tender tidak dibatasi berasal dari lokasi pekerjaanya Perpres, lah ini yang membuat suatu kontradiksi dan kacau.

Oleh karena itu Pak Dirjen tolong *panjenengan* halo-halo disusun yang bagus, seperti ini contoh pelaku usaha jakon konstruksi kecil provinsi setempat dapat berpartisipasi, ya semua dapat berpartisipasi itu namanya sekarang orang lempar KSO kok, KSO itu yang *nangani sing gede-gede* itu, lah seberapa jauh kalimat ini berpengaruh dengan komponen-komponen KSO yang itu-itu saja, BUMN-BUMN KSO dan sebagainya.

Terus kemudian yang ini Pak, ini saya tidak tau ide atau gagasan, K/L Pemda wajib mengalokasikan 40% dari nilai anggaran barang dan jasa, loh ini kan juga ditenderkan, yang mengikuti usaha mikro kecil boleh, tetapi kan se

Indonesia terus apa bedanya *gitu*, jadi tolong saya menyarankan Bapak panggil yang ahli-ahli itu untuk memperbaiki ini.

Terus kemudian, kelemahannya tetapi saya berterima kasih Jawa Tengah ada perbaikan daripada dulu yang brengsek ada kebaikan, Pokja Bapak itu kan dari a, b, c, sama perumahan kadang-kadang mohon maaf Pak itu orang buangan, loh Balai kan butuh orang hebat-hebat, Balai dimintai aku butuh ini ya kirimkan, kirm yang jelek-jelek sehingga tender itu Pak tidak pernah ada Ketua Pokja itu diskusi dengan Kepala Balai atau Satker ini gimana-gimana, ya mesti bobrok, apalagi Pokjanya tidak pernah mengadakan tender menender anehnya misalnya orang Cipta Karya nenderkan proyeknya pengairan, proyeknya Bina Marga, Iha Cipta Karya kan tidak kenal *bulldozer*, tidak kenal itu-itu kan ngukurnya gimana, ini Pak tolong diperbaiki susunan sementara saya ambil ini, ini Pokja itu yang, kalau Cipta Karya yang pembinanya ya Cipta Karya, kalau pengairan, jadi tidak *nunak nunuk* dan ada kewajiban berkonsultasi, jadi tidak *keblasuk-blasuk*, konsultasi dengan Satker dan Balai. Jadi, nanti kalau ada kesalahan jadi tidak Bapak sendiri, Balai juga ikut tanggung jawab, Satker juga ikut tanggung jawab, PPK juga ikut tanggung jawab.

Nah, terus kemudian yang Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi secara fisik baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan. Coba Pak berapa persen saya mau tanya Pokja-pokja itu yang sering komunikasi dengan Balai, mungkin tidak ada 10%, loh bagaimana Pokjanya *aja* pernah di lapangan kok mau melihat oh itu pemborong peralatannya bagus, ini, ini, ya sumbernya dari itu, bukan melanggar peraturan tetapi yang punya sumber informasi paling baku dan kuat itu PPK, Satker dan Kepala Balai, apalagi Pokjanya orang Cipta Karya tapi yang dilelangkan proyek Bina Marga ya kacau nggak nyambung Pak, wong sekolah Sospol kok urusi di sekolah fakultas teknik sama toh.

Terus kemudian, mengusahakan pinjam bendera, bahasa-bahasa begini sudah kuno Pak janganlah, *wong* namanya itu kerja sama apa namanya tadi KSO saja sudah ini, ini dibuat atur yang betul-betul KSO itu syaratnya harus begini, begini, pertanyaan saya itu wewenang Bapak atau wewenang Sekjen atau wewenang Menteri, KSO itu sudah *ngoyot* Pak, tidak ada pemborong daerah itu berani sama KSO ya *nyuwun sowan*. Jadi kalau dengan BUMN itu rumusnya S3, *sowan, sowan ki* ngadep terus setor baru *suwun*, *suwun* itu di *jaluk* Pak, saya gabung sama ini.

Kemudian, penyesuaian tata cara perhitungan dan tabel itu, saya yakin mungkin tidak lebih dari 10% lembaga itu konsultasi yang efektif dengan balai, karena terutama Cipta Karya yang jadi korban, Cipta Karya proyeknya kecil, proyeknya di tempat saya tetapi yang borong orang Sumedang sana, minggat, ninggal utang, ninggal *iki*, ninggal demenan itu mangsanya jadi mangsa mohon ya tidak (suara kurang jelas) LSM ya, mangsanya teman-teman LSM yang memang mencari-cari itu, jadi saya itu dua Pak ini, sampai Kepolisian dan Kejaksaan, ya karena pemborong minggat, orang itu ninggal utang tetapi saya tidak tahu dia *ninggal* demenan atau tidak, tapi *ninggal* utang itu.

Nah, Pak Taufik saya mohon *tolong* model-model belanda itu dihidupkan kembali, kalau dulu proyek itu mesti ada laporan harian, laporan mingguan, yang membuat dulu tidak ada konsultan tetapi direksi. *Nah*, sekarang harus dalam kontrak itu harus ada laporan mingguan, ada laporan harian yang membuat harus konsultan perencana sama konsultan itu, jadi nanti kalau pemborongnya minggat ini yang di *kuyo-kuyo* bukan PPK, perencana harus ikut bertanggung jawab mana laporannya ini, tegurannya mana ini-ini, jadi saya kira seperti teman-teman banyak yang pemborong minggat itu karena struktur pengawasan peranan pengawas konsultan dan konsultan perencana itu ndak jelas, jadi kalau misalnya nanti ada LSM cari-cari, cari suruh *ngadepi* konsultan sampai ini, ini bukunya ini, ini silakan periksa, saya dua ini, ini masih satu ini, malah polisinya itu kadang-kadang mohon maaf mungkin hanya ini, ini bisa diproses loh Pak, kan ndak bisa tidur, PPK Cipta Karya PPK kecil, 5 miliar lah paling tinggi itu, sudah *mas ini bisa diproses loh*, ndak bisa tidur, mau tanya siapa, konsultannya tugasnya di situ tidak jelas, rencana ini.

Jadi tolong dalam dokumen perencanaan itu betul-betul ada kewajiban itu sehingga tidak dibebankan kepada balai terutama PPK, saya membela Cipta Karya, Cipta Karya itu paling-paling 2 miliar, 1,5 miliar itu, *nah*, kalau yang 100 juta kan Satker PPK dehem saja banyak yang bantu, kalau itu kan ndak, ini faktanya.

Terus penambahan persyaratan kualifikasi keuangan, perubahan, ini tolong Pak dibicarakan dengan kementerian teknis, ndak bisa Bapak ngarang sendiri ini, saya kasihan, jadi sebenarnya tugas Bapak itu maha raksasa, maha bagus, tetapi memang sayapnya tidak sekuat Dirjen yang lain, yang punya otoritas keuangan tapi saya yakin Pak saya doakan karena saya punya pengalaman yang paling bagus dulu BP2JK penjenengan tak *pisu-pisui* tapi sekarang gantinya bagus dari Yogya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pak.
Berikutnya Ibu Estu, silakan Bu Estu.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V dan juga Pak Dirjen ada Pak Taufik juga dan semuanya mitra Komisi V.

Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman, saya memberikan apa penegasan saja berkaitan dengan pemenang atau harga terendah, ini memang menjadi satu permasalahan, permasalahan besar dan ini BP2JK bahkan Balai-balai juga tidak berani protes, tidak berani protes padahal itu sebenarnya

menjadi beban oleh beliau-beliau, menjadi beban karena tidak bisa memberikan kualitas yang bagus bahkan beberapa waktu yang lalu saya dilaporinya ini bukan sekedar dilaporinya tetapi sekaligus ditangisi *aduh gimana ini mbak*, kebetulan ini masih sodara ini, gimana ini Mbak ini kontraktornya lari nggak tanggung jawab bisa tidak dibantu untuk mencari kontraktornya menemui dan lain-lain, jadi ini harus menjadi satu catatan evaluasi bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR yang diwakili oleh BP2JK.

Jadi jangan dengan serta merta nilai terendah itu menjadi pemenang, harus diukur, disesuaikan dengan harga satuan yang sudah dibuat standar oleh Kementerian, jangan tergiur atau terlena ketika kontraktor bilang saya punya peralatan ini, saya punya peralatan ini sendiri dan lain-lain, kalau toh punya peralatan pasti akan dihitung dengan penyusutan daripada peralatan tersebut, tidak mungkin yang namanya kontraktor itu tidak menginginkan ada keuntungan, ini mustahil sekali, kita contohkan saja saya yakin Kementerian ketika menghitung satuan atau harga sebuah *project* katakanlah itu 100 juta, pasti sudah dihitung dengan standar-standar harga satuan-satuan dari material tersebut, tentunya plus-plus dari keuntungan, dari pajak dan lain-lain. *Nah*, ketika kemudian ini harus ditawarkan 80% bahkan 70%, saya yakin, *haqul* yakin bahwa pekerjaan ini nggak akan pernah bagus, karena dengan 80% saja ini paling banyak dikerjakan 50%, paling banyak 50%, kemana yang 30%, ini semuanya sudah pahamlah bahwasannya banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan di luar itu, belum lagi kalau kemudian kalau serwing-serwing ada persoalan tentunya tidak kecil yang harus dikeluarkan, inilah yang akan menjadi kualitas infrastruktur yang kita bangun ini tidak akan pernah bisa bagus ya, ini satu.

Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Dirjen berkaitan dengan sub kontrak untuk pengusaha-pengusaha lokal apabila ada pekerjaan besar, Bapak ini tidak semudah membalikkan tangan, ketika *project* ini saya bercerita di daerah, ketika *project* jalan tol di Jawa Timur bagaimana saya ini menjadi jujukkan teman-teman yang menjadi subkontrak dari perusahaan yang membangun jalan tol dan sampai hari ini ada yang belum terbayarkan, sampai hari ini padahal jalan ini sudah selesai berapa tahun. Mungkin nanti kalau perlu siapa Bu nanti saya kasih tahu siapa ya, sehingga tidak semudah itu, jangankan kok berbicara infrastruktur, ini pengalaman saya dulu ketika saya masih punya usaha, dulu persoalan benih saja bayangkan loh benih itu berapa sih keuntungannya itu bisa dibayar dua tahun baru selesai, kalau dihitung bunga bank *lak yo modar* toh, ya kan *tekor* pasti, *nah*, begitu juga dengan konstruksi ini.

Nah, inilah kerjaan Pak Taufik, tugas Pak Taufik harus melakukan evaluasi juga tentunya banyak teman-teman Pak Taufik yang punya satu orang punya sampai 50, 50 perusahaan loh dan ini saya tahu, mungkin dulu waktu periode yang lalu sebelum Pak Taufik purna saya pernah seperti menyampaikan pada waktu kita membangun lingkaran mojo agung ya, ini salah satu contoh satu orang loh yang dinamakan siapa ada namanya supir, ada namanya karyawan a, b, c, d, e, ini satu orang bahkan dulu ketika pekerjaannya lingkaran mojo agung itu saya *ndilalah* ada yang ngomong Ibu coba *dicek* itu

pekerjaannya, gampang, caranya gimana, Ibu anu aja jejek saja itu aspalnya pasti *mrotoli* dan itu benar begitu loh ya.

Jadi, itu loh Pak Taufik perlu apa namanya diatur dan diverifikasi secara benar, jangan sampai kemudian perusahaan penyedia jasa konstruksi ini ya hanya sekedar untuk bisa mengikuti lelang dengan menggunakan banyak bendera dari satu orang itu saja dan juga yang penting juga adalah konsultan pelaksana tadi disampaikan oleh Pakde, konsultan-konsultan itu ya, konsultan pelaksana ketika saya melihat langsung saya ini kan suka *keluyuran* juga tiba-tiba saja saya melihat pekerjaan dan di sana saya sama sekali tidak pernah melihat yang namanya konsultan pelaksana, padahal itu penting sekali untuk bisa memantau pekerjaan si penyedia jasa konstruksi ini si kontraktor ini benar atau tidak, sudah sesuai spek atau tidak. *Nah*, ketika nanti terjadi sesuatu kemudian saling lempar handuk, nggak mau untuk bertanggung jawab.

Nah, maka dari itu saya pernah menyampaikan di dalam forum rapat yang terhormat ini bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak seharusnya dilelang kalau memang itu bisa dilaksanakan, seperti preservasi jalan untuk pemeliharaan jalan, sepanjang jalan yang kemudian rusak berlubang itu kan sebenarnya bisa dikerjakan sendiri tentunya satu bisa efisien. Dua, kualitasnya jelas, kalau kualitasnya nggak bagus kan langsung tunjuk hidung dari kementerian sendiri, kalau memang itu bisa dilaksanakan sendiri atau tunjuk hidung orang yang dikasih pekerjaan penunjukkan langsung itu, ini kan bisa dilaksanakan untuk meminimalisir terjadinya kalau dibidang kebocoran atau konstruksi yang tidak semestinya.

Jadi, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang tadi saya katakan termasuk pekerjaan ketika tidak selesai, ini yang kena pasti PPK nya, pasti PPKnya, yang digeruduk oleh media yang dicari-cari LSM pasti PPKnya. Kemudian, kalau PPK yang terus-terusan jadi *jujukan*, saya tidak mengenal PPK di Jawa Timur sama sekali, benar Pak KaBalai? sama sekali bahkan menginjak kantornya Pak KaBalai saja ndak pernah saya, jadi saya bersyukur *Alhamdulillah* ketika usulan-usulan program saya masuk bisa dibangun itu sudah bagi saya satu kegembiraan dan kebahagiaan.

Saya katakan PPK kasihan itu benar sekali, ketika nanti ada masalah katakanlah di penegak hukum pasti mereka yang akan dipanggil, maka dari itu kerja sama dari atas dari pusat sampai ke bawah, ini sangatlah penting, kalau memang dibuatkan sebuah sistem, sistem ini harus benar-benar dijalankan, siapa nanti yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya semuanya kalau memang sistem ini sudah dijalankan.

Jadi, saya kira itu yang perlu saya sampaikan Pak Ketua.
Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya srikandi berikutnya Bu Lasmi.

F-P. DEMOKRAT (LASMI INDARYANI, S.E):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V dan Anggota Komisi V.
Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Konstruksi.**

Saya hanya sedikit menambahkan, saya apresiasi jika sudah ada kewajiban mensubkonkan pekerjaan kepada penyedia jasa usaha kecil setempat itu sangat bagus sekali karena memang agar perekonomian di daerah itu juga merata ya Pak, tetapi alangkah baiknya juga memang ada kebijakan yang adil untuk pengusaha-pengusaha kontraktor-kontraktor lokal, kalau saya tadi melihat mungkin tadi Bu Estu mengatakan 80% itu 50% yang dikerjakan, 30% nya kemana, saya rasa mungkin tidak seperti itu Bu Estu. Jadi mungkin pengalaman saya sebelum jadi Anggota DPR RI saya juga pelaku, saya juga tau di dunia konstruksi, jadi 80% itu saya rasa kalau kontraktor luar yang mengerjakan itu nggak masuk akal Pak, 80% itu yang kita pernah alami, itu harus punya alat sendiri, harus punya AMP sendiri, harus punya *butching plant*, harus mungkin membikin saluran air sendiri baru mungkin itu bisa, itu pun hanya untuk bayar karyawan Pak, hanya untuk menghidupi karyawan-karyawan ini agar tidak di PHK.

Jadi kalau misalnya 80% kok yang mengerjakan orang di luar daerah waduh itu saya sendiri tidak tahu bagaimana cara menghitungnya dan apalagi jika memang dibebaskan seperti itu akhirnya sikut-sikutan Pak, yang daerah sini akhirnya pindah ke daerah sana, daerah sana menghajar yang daerah sini dan kalau misalnya tadi misalnya saya bisa mewakili para kontraktor-kontraktor, hati para kontraktor, kalau tadi 80% minimal mungkin kita semua menawar 80 koma nol, nol, nol sekian, akhirnya bagaimana cara penilaiannya Pak, kalau saya rasa itu tadi dan ini banyak juga teman-teman kontraktor karena saya dulu juga pernah disana, jadi saya banyak teman-teman kontraktor, banyaknya proyek infrastruktur ini nyatanya mereka juga banyak mengeluh banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan yang akhirnya mereka harus mem-PHK karyawannya itu tadi karena banyak serangan-serangan dari luar atau mungkin banyak jago-jago yang sudah ditetapkan, mungkin yang saya ceritakan ini anggap saja tidak ada di negara kita, mungkin di negara wakanda Pak, tetapi coba dicek ya, jadi ada loh cerita yang sampai ke saya lelang ulang kok bisa sampai lima kali begitu, itu mungkin butuh di cek Pak kalau ada ya, sudah pemenangnya termurah di ulang kedua kali, diulang ketiga kali, ke empat kali sampai kalah, *nah*, itu yang di nilai seperti apa.

Jika memang ada kontraktor luar yang memang kok *sim salabin roro jongrang* begitu ya dengan 80% terus keuntungannya bagus mengerjakan sendiri, saya mungkin mau tanya dimana begitu, saya yakin misalnya yang menang 80% dari luar itu pasti menyerahkan juga kepada perusahaan lokal, kepada pengusaha lokal akhirnya dikerjakan tidak 80%, itu tadi jadi kapan kita mau mencapai kualitas yang kita inginkan dan misalnya 80% minimal, *nah*, dari yang bikin harga apakah keuntungannya sampai 50% dari 100%? saya rasa tidak, mungkin dulu jaman buyut saya, mungkin proyek itu 50%, jadi kadang-kadang kontraktornya gak ngitung, mau nawar tidak ngitung Pak, wah tawar

saja 70%, tawar saja 65% karena katanya untungnya sampai 50% zaman tahun purba mungkin *gitu*, kalau sekarang saya yakin tidak, yang membikin harga juga paling ya dikasih keuntungan berapa nanti saya perlu tahu dari Pak Dirjen Konstruksi, dari 100% itu kira-kira berapa sih Pak keuntungan yang diperkirakan, kalau 80% itu kira-kira bagaimana kualitasnya, itu mungkin dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Lasmi.
Selanjutnya Bu Sri Wahyuni.

F-P. NASDEM (SRI WAHYUNI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Ketua Komisi V, Wakil Ketua beserta seluruh Anggota Komisi V,
Yang saya hormati Bapak Dirjen beserta seluruh jajaran.**

Saya menambahkan sedikit saja terkait tender dan kualitas ini beberapa Teman-teman sudah menyampaikan soal ini dan ini beberapa kali juga disampaikan pada waktu rapat-rapat yang lalu. Terkait tender ini kita ketahui mesti dicari harga yang pemenangnya harga yang terendah, sedangkan untuk mencapai kualitas yang baik itu kita tahu butuh biaya yang tidak terendah begitu. Jadi, ke depan saya usul saja dicari solusinya bagaimana sebaiknya ini kualitas bisa kita dapat, bisa maksimal, bisa bagus dengan anggaran yang mungkin tidak terendah tetapi juga tidak tertinggi begitu, karena di sini kan maunya terendah kualitasnya baik ya tidak, seperti itu kan. Jadi, ke depan coba dicari solusinya bagaimana begitu.

Selanjutnya, ada pekerjaan jalan di Dapil saya kemarin itu sudah selesai namun ada keterlambatan dari tahun-tahun yang lalu, tahun lalu tepat waktu, namun yang Tahun 2022 kemarin itu ada keterlambatan saya kurang jelas ya kenapa *kok* terlambat kemarin katanya faktor cuaca tetapi tidak mungkin ya cuaca itu satu bulan penuh itu hujan mulu begitu kan, *nah* ke depan saya tidak ingin pekerjaan tepat waktu Pak, jadi tidak ada lagi keterlambatan-keterlambatan.

Selanjutnya, terkait penerapan e-katalog, Teman-teman juga sudah menyampaikan tadi bahwa e-katalog ini dilaksanakan, diharapkan dilaksanakan sampai ke tingkat kabupaten, tetapi masih banyak kendala baik itu teknis atau pun sistem. Harapan kita e-katalog ini bisa berjalan sesuai aturanlah, jangan sampai gembor gembor bahwa e-katalognya sudah siap tetapi begitu dilaksanakan sampai tingkat kabupaten menu-menunya masih

banyak yang belum tersedia seperti itu Pak Dirjen, giliran daerah mau melaksanakan menunya masih ada yang kosong, *nah*, ke depan mungkin ada solusi juga, mungkin perlu sosialisasi terkait apa namanya terkait e-katalog ini kepada kontraktor-kontraktor di daerah, saya rasa itu saja Pak Dirjen dan jajaran untuk bisa diperhatikan.

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Sri Wahyuni.
Selanjutnya Pak Sigit Sosiantomo.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang kami banggakan, Pak Dirjen, Pak Mantan Sekjen yang kami banggakan.

Ada tiga pertanyaan saya mewakili para pembuat Undang-Undang No.6 Tahun 2017, Undang-Undang tentang Arsitek Pak Dirjen. Yang pertama, undang-undang tersebut dibuat Tahun 2017 sudah enam tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu LKPP menegaskan berdasarkan PP 15 Tahun 2001 bahwa STRA dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, itu surat tanda registrasi arsitek Pak, itu boleh digunakan untuk pengadaan barang dan jasa tetapi sosialisasi apa LKPP ini sepertinya tidak masif di lapangan sehingga banyak daerah-daerah yang masih menolak ya, jadi masih belum bisa menerima STRA ya, akibatnya registrasi arsitek ini jadi kurang bisa berperan dalam program-program pembangunan ya khususnya dalam bidang konsultasi untuk barang dan jasa.

Yang kedua, sertifikat badan usaha masih mensyaratkan SKK (Surat Keterangan Keahlian) ya Pak Dirjen, *nah*, ini bagi para pemilik STRA ini menjadi persoalan, mereka tidak mungkin harus mengurus dua hal yang berbeda, mereka sudah mengurus STRA tetapi mereka masih harus pakai SKK untuk sertifikat badan usaha, jadi sekali lagi ini tidak kondusif, di beberapa daerah bahkan Ekindo menolak STRA digunakan untuk mengurus sertifikat badan usaha, saya kira ini perlu menjadi perhatian karena Biro-biro arsitek yang berperan aktif dalam jasa konstruksi jadi mengalami pengurangan peran.

Terus yang ketiga Pak Dirjen, Pak Kepala LKPP sudah ada STRA lebih kurang 3.500 se-Indonesia ya tahun 2023 ini targetnya bisa sampai 5.000 STRA kalau dualisme SKK dan STRA ini masih belum selesai kira-kira nunggu sampai berapa tahun lagi, mohon perhatiannya Pak Dirjen.

Saya kira tahun lalu juga sudah saya sampaikan ini saat ketemu dengan Bu Dirjen Cipta Karya untuk membantu persoalan ini tetapi sampai sekarang masih, ini berita paling baru artinya ternyata dia dulu disampaikan bahwa sudah

tidak ada masalah adanya dualisme ini ternyata masih masalah, mungkin rezimnya Pak Dirjen masih menggunakan SKK, jadi kami meminta karena sudah ada aturan, sudah ada PP nya juga agar ini segera bisa ditindaklanjuti dan dibuat mekanisme yang memudahkan para pemilik STRA untuk bisa mengurus sertifikat badan usaha, begitu ya Pak Dirjen ya saya kira. Pak Dirjen minta tolong pada Pak Sekjen enak ya, minta tolong Pak Sekjen biar segera beres persoalan itu, sudah enam tahun Pak kalau implementasi undang-undang apa namanya sudah tahunan begitu kan kasihan juga, capek juga kita buat undang-undang ya, kapan mau dilaksanakan, kapan dibuat, kapan dilaksanakan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sigit.
Pak Suryadi silakan Pak.

F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Rekan-rekan, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V, Pak Dr. Yudha Mediawan beserta Dirjen Bina Konstruksi Pak Taufik beserta seluruh jajaran secara khusus ada Pak Sofyan yang hadir. Terima kasih Pak, akhirnya ketemu disini Pak.

Karena rapat kita ini adalah mengevaluasi sekaligus juga mencari formula perbaikan dari regulasi kita terkait dengan pengadaan barang dan jasa saya akan memberikan beberapa catatan.

Pertama, saya apresiasi secara normatif Pak Dirjen punya keinginan agar mengkomodir penyedia jasa lokal dan disini 82% tetapi jangan senang dulu kawan-kawan karena ini kan jumlah paket Pak, karena ini bisa menipu data ini, yang diharapkan keberpihakan jasa lokal itu kan nilainya Pak, setahu saya yang 82% ini adalah yang remahan-remahan itu, yang kecil-kecil sehingga kalau kita menggunakan nilai proyek dan berapa jumlah penyedia jasa lokal yang bekerja itu masih sangat kecil, kenapa kita teriak keberpihakan pada lokal ini faktor ekonomi supaya uang itu bergerak di daerah, bukan daftar nama perusahaannya yang banyak tetapi proyeknya sedikit, nilainya sedikit karena ini kan sesuai dengan spirit ya, tidak saja Indonesia sentris yang menjadi target kita yang tadinya jawa sentris, supaya uang itu banyak beredar di daerah, bukan berkas yang banyak beredar di daerah, bukan jumlah pakatnya tetapi nilainya berapa.

Nah, oleh karena itu ini nanti datanya dilengkapi Pak Dirjen dari 82% ini berapa nilainya dan berapa persen nilai yang dikerjakan oleh penyedia jasa lokal karena kita ini faktor ekonomi begitu bukan faktor administrasinya oh jumlahnya sekian paket tetapi nilainya kecil-kecil, tidak apa-apa sedikit pakatnya tetapi yang besar dikasih ke lokal selama mereka punya kompetensi dan kemampuan, jadi ini catatan saya yang pertama ya, jadi saya yakin teman-teman juga kurang lebih begitu datanya, yang remah-remahan itu dapatlah yang lokal di bawah 1 miliar, kalau data 10, 20 apalagi di atas 100 ya sudah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, sebenarnya saya usul Pak Ketua agar rapat khusus dengan Bikon ini bisa dilakukan dan suatu saat dalam rapat tertutup, karena kita tidak membahas norma, norma ini tidak ada masalah sebenarnya walaupun ada beberapa catatan kita tetapi *problem*-nya itu adalah di praktek empiriknya, realisasi pelaksanaan di lapangan, itu yang jadi masalah, yang kadang-kadang kita juga mungkin mengungkap nama orang atau nama lembaga dan seterusnya dan tentu tidak etis kalau dalam rapat terbuka seperti ini, misalnya bagaimana proses pengadaan perusahaan yang tadinya sudah gugur ternyata hidup lagi atau pada saat seleksi bersamaan aspek yang sama karena itu ditarget akhirnya dimudahkan tapi kalau bukan ditarget akhirnya di cari-cari kesalahan, yang seperti ini menurut saya teman-teman tahu dan hampir di semua daerah itu ada.

Maksud saya Pak Ketua nanti kita perlu rapat tertutup ya karena akan banyak menyangkut orang, sekali lagi menurut saya *problem*-nya bukan di norma tetapi di praktek di lapangannya kan itu yang sering diangkat oleh Teman-teman bagaimana Pokja, bagaimana para pihak gitu ya, dan ini kita ingin ungkap masalahnya secara terbuka dalam rapat tertutup lalu kita cari solusinya, formulanya seperti apa, kalau penjelasan normatif-normatif itu kita sudah ngerti lah ya.

Nah, berikutnya terkait dengan beberapa regulasi yang mungkin perlu kita perbaiki ada beberapa catatan saya, pertama saya sepakat ada istilah TKDN ya tingkat komponen dalam negeri dan ini kita terjemahkan lagi TKDD tingkat komponen dalam daerah, ini bisa menjadi poin selain TKDN dalam skala nasional tetapi dalam skala lokal ada TKDD mungkin ini istilah kita ngarang-ngarang tidak apa-apa tetapi yang penting kira-kira itu juga bisa menjadi *item* dalam penilaian kita, seberapa tenaga lokal, seberapa sumber daya lokal, material lokal itu bisa dipakai tidak saja dalam negeri dalam pengertian ekspor dan impor tetapi juga di satu daerah.

Kemudian yang berikutnya, mengenai sertifikasi Badan Usaha, yang mengharuskan Badan Usaha itu harus aktif selama 3 tahun ini sulit untuk dapat legalitas, dapat sertifikat badan usaha mereka harus produktif selama 3 tahun, siapa perusahaan yang bisa berturut-turut kerja dalam 3 tahun kemarin ini begitu, ya tentu mereka-mereka yang punya akses, mereka-mereka yang sudah mapan yang sebetulnya tidak perlu ada afirmatif begitu, yang perlu kita bantu ini kan mereka yang tidak dapat pekerjaan selama tahun kemarin, 2 tahun, selama covid itu kita perlu permudah tetapi justru mereka dipersulit karena dipersyaratkan perusahaan baru dapat sertifikat badan usaha itu

setelah 3 tahun aktif padahal kita tahu perusahaan sangat sedikit di masa Covid-19.

Kemudian berikutnya, tadi Pak Dirjen menyinggung tentang pinjam bendera, ini istilah lapangan, Pak Sudjadi sudah koreksi ya istilah lapangannya pinjam bendera, ada juga pinjam tenaga ahli Pak, karena dari data yang ada jumlah tenaga ahli kita yang bersertifikat itu 411 ribu, jumlah perusahaan badan usaha kita 360 ribu, kalau dalam ketentuan setiap badan usaha itu harus punya satu tenaga ahli teknik dan satu tenaga ahli sub berarti minimal dua, berarti kan harus ada 720 ribu, lalu ke mana mereka ini tetapi kenyataannya begitu ikut dapat semua, punya semua berarti ini pasti terjadi pinjam meminjam saat tenaga ahli dipakai oleh sekian banyak perusahaan karena faktanya begitu.

Jadi, sub kualifikasi harus ada tenaga bersertifikat kemudian penyuluh teknis ada tenaga bersertifikat berarti satu badan usaha itu dua tenaga bersertifikat, kalau dibagi dengan 360 ribu badan usaha kekurangan, *nah* oleh karena itu perlu ditarik langkah agar tenaga ahli-tenaga ahli kita ini punya sertifikat ya, dipermudah ya agar nanti tidak terjadi kucing-kucingan juga begitu ya.

Nah, berikutnya, tentang beberapa yang disampaikan Kawan-kawan masalah HPS dengan realisasi di lapangan, ketika kita menghitung itu kan ada keuntungan kemudian ada juga *overhead*, kurang lebih 10 sampai 15% kan yang harusnya ditawarkan itu keuntungannya yang 10 sampai 15% ini *gitu* ya, tetapi kalau bisa sampai nawar di atas, dibuang 20% berarti kan ambil di spek atau volume, logikanya kan begitu, karena hitung-hitungan kita kan normalnya oh ada *overhead* dan keuntungan 15% atau mungkin 10% begitu, orang berani tawar atau menghemat atau mengambil keuntungan yang bermain disitu tetapi kalau sudah 20% berarti yang 5% lebihnya ini atau bisa 10% itu kan mainnya di spek dan volume akhirnya kucing-kucinganlah terjadilah seperti belum lagi *overhead* yang berupa siluman itu.

Nah, ini perlu ada semacam kebijakan yang lebih detail dalam norma-norma yang kita buat, supaya tidak bermain pada wilayah abu-abu begitu karena dalam kenyataannya juga tidak semua yang menang itu nilai terendah ketika tidak diinginkan ya sudah pasti diulang-ulang, diperiksa, dievaluasi sampai ketemu salahnya, tetapi ketika itu sudah ini ditarget ya bahkan evaluasinya juga tidak terlalu detail, ini yang sekali lagi saya katakan sebagai catatan kita, masalah kita itu bukan di normanya tetapi di praktek empiriknya.

Terakhir Pak Ketua, *alhamdulillah* saya setiap Reses selalu berkordinasi dengan mitra di daerah, saya undang 5 kepala balai dalam rapat kordinasi terbuka karena tugas kami kan selain sebagai wakil dari daerah pemilihan yang bertugas membawa anggaran sebanyak-banyaknya ke daerah sebagai bagian dari advokasi daerah, kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah, katanya kami selalu kordinasi, selalu undang dan kita evaluasi kira-kira apa kendala dan apa yang perlu kita tindak lanjuti, saya sering memfasilitasi kepala balai dengan pemerintah daerah atau dengan kelompok masyarakat ketika ada masalah.

Oleh karena itu, Pak Dirjen agar tetap ada arahan pada semua mitra di daerah ini untuk tetap pro aktif berkoordinasi dengan kami di daerah agar sukses program kita ya sebagai mitra tentu ini menjadi sangat penting, jangan sampai ini sering saya sampaikan Kementerian PUPR merupakan kementerian yang menjadi andalan pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak harus punya budaya organisasi yang pokok, yang kuat, yang mengakar *gitu* ya, tidak tergantung oleh gaya personal, ganti pejabat nanti lain lagi gaya ininya begitu ya, koordinasi dan seterusnya sehingga ini memang perlu dikuatkan bahwa kita ini organisasi yang matang, semua itu harus ikut dalam mekanisme budaya organisasi dalam melaksanakan tupoksi masing-masing supaya tidak ada masalah di kemudian hari, itu Pak Ketua beberapa catatan saya.

Terima kasih, saya usul suatu saat kita rapat tertutup karena kadang-kadang kita perlu menyangkut nama, lembaga dan orang.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Suryadi, tadi ada usul dari Pak Hamka juga ya.

Nanti kita bahas di internal dulu mekanisme rapatnya seperti apa, karena kalau menyangkut orang, badan usaha dan seterusnya kita perlu akuntabel Pak, kalau salah nanti bisa pidana kita, kalau menyangkut orang, badan usaha ini kita harus betul-betul obyektif dan berdasarkan fakta yang ada, kalau tidak nanti kita bisa diperkarakan oleh para pihak, secara setuju nanti kita rapat tertutup kita cari formulasi yang pas bagaimana kita mengurai ini ya.

Baik, selanjutnya Pak Syafiuddin ya, kita sudah mau buka puasa Pak Syafiuddin, singkat-singkat saja ya.

F-PKB (H. SYAFIIDDIN, S.Sos):

Terima kasih Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi V, Pak Dirjen dan jajaran yang saya banggakan.

Tidak banyak sebenarnya sama dengan Teman-teman yang lain, karena di tiap pertemuan kita sebenarnya yang dibahas ya itu-itu saja, artinya bagaimana kekecewaan teman-teman terhadap BP2JK implementasi dari pelaksanaan lelang yang terjadi mulai dari anggaran yang sampai 30% itu dipotong sehingga kembali ke kas dan itu menurut saya juga serta Teman-teman itu sangat rugi karena uang kembali ke kas itu kan tidak berputar juga di daerah padahal kita penting bahwa perputaran uang yang banyak juga akan meningkatkan ekonomi di daerah itu.

Cuman hanya ada satu pesan Pak kalau hal-hal seperti itu yang lain-lain yang tadi saya sampaikan dan juga banyak teman-teman juga sampaikan itu sebenarnya sudah menjadi tradisi lama bagi kita untuk menyampaikan. Namun yang penting bagi saya kalau seumpama ada beberapa program *project* atau kegiatan di Dapil saya seumpama karena stigma negatif terkait Dapil saya Pak bahwa penolakan dan lain-lain seperti yang apa namanya yang dibunyikan di Jakarta ini tentunya itu tidak benar, namun yang saya harap kepada BP2JK, kepada bina konstruksi ini siapa pun yang menggarap di dapil saya tolong seperti yang disampaikan oleh teman dari NTB tadi ada fungsi koordinasi, kami tidak ingin meminta apa-apa, namun stigma negatif terkait dapil saya ini ingin saya ubah begitu artinya adab dan etika itu yang penting bagi orang Madura, jadi kalau memang mau bekerja silakan komunikasi dan kita arahkan nanti, kita arahkan untuk komunikasi dengan beberapa *stakeholder* yang ada apakah itu kepada Bupati, kepada ulama atau tokoh-tokoh yang lain karena sangat sensitif sekali di Madura ini apabila etika tidak dikedepankan, mungkin hanya itu Ketua.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Syaifuddin.
Selanjutnya Pak Robert silakan, Ibu mau bicara silakan Bu Eem.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Om swastiastu.**

Pimpinan Komisi V beserta Anggota yang hadir di sini, dari mitra kerja yang saya hormati dan yang saya banggakan.

Beberapa kejadian yang hampir sama di teman-teman juga di Dapil saya yaitu beberapa pekerjaan yang tidak tuntas, yang sudah tuntas di tahun kemarin, contohnya di antaranya adalah jembatan gantung, mereka PJ nya, penyedia jasanya itu melarikan diri, itu sudah beberapa kali di daerah pemilihan saya, saya yakin itu ada dampak dari ketika tender itu mungkin terlalu murah dan lain sebagainya karena beberapa keluhan yang datang ke saya juga mereka serba bingung ketika mau apa dibanting harga mereka tidak untung banyak, ketika memaksakan agar bisa berputar saja ketika ada kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi mungkin masa-masa konflik lokal dan sebagainya mereka tidak mampu menyelesaikan.

Itu juga kemudian yang terjadi program PUPR yaitu jembatan gantung di daerah Cianjur Selatan, sampai harusnya tuntas di tahun kemarin tetapi sampai hari ini tidak tuntas itu sudah beberapa kali di daerah saya dulu juga

pernah ada Rusunawa seperti itu juga sampai kemudian dianggarkan lagi tahun berikutnya seperti itu, padahal beberapa perencanaan di Kementerian PUPR setiap program itu pasti ada plafonnya itu saya yakin itu sudah dengan kajian, ketika sudah sesuai dengan kajian kenapa kemudian dalam hal proses tendernya justru mencari harga yang murah, terus kenapa justru kemudian ada beberapa anggaran dari jumlah plafon itu harus kembali kepada kas negara, harusnya kan tidak beda jauh, kalau terlalu jauh itu saya kira justru harusnya pertanyaan, kalau mungkin harga yang tidak beda jauh dari kemudian harga yang ada itu yang justru menurut saya sesuai *maise* dengan yang selama ini sesuai dengan perencanaan Kementerian PUPR, lalu apa fungsinya, di mana kemudian standar obyektivitas dari Kementerian PUPR ini, karena menilai suatu pekerjaan ini bahwa plafonnya memang layak dengan nominal yang ada itu, kenapa kemudian banyak terjadi dan ini saya kira tidak hanya di Dapil saya, saya yakin di beberapa tempat di daerah lain pun seperti itu.

Terus kemudian banyak sekali hal-hal yang memang ya kalau kemudian hanya yang dirugikan misalkan apa pemerintahan saja tetapi banyak juga hal-hal seperti itu kemudian pekerjaan-pekerjaan misalkan pekerja lokalnya belum dibayar dan sebagainya itu terjadi, akhirnya pekerja-pekerja yang dia sudah bekerja, sudah mengeluarkan keringat karena PJ nya, Penyedia Jasanya lari akhirnya tidak dibayar seperti itu dan pemerintah pasti tidak bisa ganti langsung pada hari itu karena harus dianggarkan dulu di tahun berikutnya, seperti itu, *nah*, hal-hal yang seperti itu saya berharap itu tidak terjadi lagi, saya sudah beberapa kali sampai kemudian waktu kejadian dulu yang di rapat sampaikan di Pak Menteri itu saya berharap tidak akan terjadi lagi tetapi kemudian terjadi-terjadi lagi sampai kemudian dua kali.

Terus kedua, terkait pengertian pengusaha lokal. Ini sebenarnya pengertian pengusaha lokal itu seperti apa, apakah lokal yang ada di daerah di mana kegiatan tersebut dibangun atautkah lokal itu bisa misalkan dari Cianjur penyedia jasanya dari Makassar, lokal Makassar atau kemudian yang dari Aceh penyedia jasanya dari lokal Bandung atau seperti apa begitu kan, karena ini banyak terjadi, karena menurut asumsi saya begitu kan pengusaha lokal itu kalau pekerjaannya di Jawa Barat misalkan di Bandung maka prioritaskan penyedia jasa yang ada di Bandung karena mereka alat-alat beratnya ada di sana seperti itu.

Tetapi ini yang terjadi ini kejadian nih, kejadian waktu Rusunawa di Dapil saya pekerjaannya di Cianjur tetapi kemudian penyedia jasanya orang Makassar, mereka disubkonkan ke pengusaha Jawa Barat, pengusaha Jawa Barat disubkonkan lagi ke Cianjur, akhirnya apa? bocor ini anggaran ini begitu kan, pasti semua penyedia jasa kan ingin untung, kan memang harus ada untungnya, buat apa kalau kemudian mereka mengerjakan program pemerintah tetapi kemudian rugi kan buat apa, tetapi harus yang standar begitu loh, tidak boleh terlalu rakus.

Nah, ini hal-hal yang kayak gitu loh yang harus kemudian di apa didetailkan begitu, jangan-jangan penyedia jasa lokal itu jangan-jangan lokal di mana saja, bisa bertempat dimana saja karena itu yang kemudian terjadi daerah kami, sehingga terjadilah masalah-masalah yang dialami oleh kami

seperti itu, ini tolong juga diperhatikan Pak dan tadinya saya berharap di tahun politik tidak terjadi lagi hal-hal pekerjaan yang kemudian penyedia jasanya lari dan lain sebagainya, ini kan berdampak juga kepada kita, tetapi kalau dari awal misalkan BP2JK Balai Bina Marga yang terkait dengan program-program, koordinasi dengan kita pasti akan tuntas, jangan kemudian ketika ada masalah barulah kemudian kami dilaporkan dan sebagainya atau pas kita ingin, ini program tahun kemarin sudah selesai, kita ingin tinjauan, lakukan kunjungan, ingin meresmikan tetapi ternyata tidak mau, ternyata masalahnya adalah masalahnya belum tuntas dan terjadi stagnasi pekerjaan, tidak dilanjutkan lagi.

Mungkin itu saja dan itu saya kira tentu tidak hanya merugikan masyarakat, merugikan kita juga karena kita yang kemudian nama kita yang memperjuangkan, maksudnya itu yang membawa kesana terus kemudian pemerintah juga kemudian juga *performance*-nya menjadi jelek seperti itu.

Terima kasih.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan Pak Roberth.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pimpinan.

Saya mewakili Anggota yang belum ya.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati.
Pak Dirjen Bina Konstruksi beserta seluruh jajaran yang hadir.
Para Kepala BP2JK.**

Dari Papua ada nggak? Ini yang baru ya? sudah ketemu saya ya? Oh iya.

Pak Dirjen, harus bersyukur berada di Komisi V ini baik, coba lihat di Komisi VII itu mitra diusir Pak, saya serius, mitra diusir, kami baru berdiskusi Pimpinan, melihat apa yang Pak Dirjen sampaikan laporan ya kalau saya boleh sampaikan kalau saya sih saya suruh pulang dulu, karena ini semua menurut saya pembodohan untuk kita semua yang ada di sini Pak Dirjen ya, ini pembodohan. Karena temuan yang kita dapat dan apa yang disampaikan teman-teman itu realita yang terjadi, maka kalau melihat, membaca presentasi Saudara Dirjen saya tidak terima, saya ingin tolong buat yang menurut dan realita yang ada, harus disampaikan seperti itu, ini kan semua keberhasilan-keberhasilan yang dibuat ya, presentasi ini tidak ada satupun kegagalan yang seperti apa, kegagalan sangat minim ya kan? Kegagalan cuman berapa persen? 3 %.

Saya bisa sampaikan kenapa saya waktu itu sampaikan 2022 di daerah saya 5 kontrak 1 yang berhasil selesai tepat waktu, 4 bermasalah, itu tolak

ukurannya saja, kok ini keberhasilan begitu banyak ya kan, jadi ini kita dibodohin ini ya, keterlibatan pengusaha lokal tadi sudah disampaikan Pak Suryadi hebat benar ini ya kan, ini yang recehan, remah-remah ya, dikasih ini, ini proyek diistilahkan Padat Karya Pak, yang ditunjuk langsung itu, *nah*, itu yang dikasih pengusaha lokal, banyak tetapi nilainya tidak ada apa-apanya. Tetapi bagaimana proyek-proyek yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang kita inginkan kualitasnya akan baik, itu semua, kita boleh bicara jujur kualitas yang ada, tidak. Sangat buruk, saya harus sampaikan itu, sangat buruk ya.

Berapa banyak uang negara rakyat terbuang begitu saja, saya kemarin pulang Reses saya lihat proyek yang bermasalah yang saya sampaikan berhari-hari, kita rapat-rapat di sini terus, bagaimana proyek yang harusnya itu harus program mayoritas sekian karena itu preservasi jalan pengaspalannya harusnya menjadi, karena kelengkapan alatnya belum ada, tidak terini maka pasti terlambat dan putus kontrak, maka dibikin minornya ini *banyakan*, gorong-gorong dibikin panjang galian segala macam untuk menghabiskan duit dulu ya, Saudara Dirjen dan jajarannya enak begitu, habis tanggung jawab selesai melakukan tugas yang namanya kualitas, Saudara-saudara tidak bertanggung, kasihan balai teknis yang tanggung jawab itu.

Bagaimana untuk mengamankan itu? balai teknis ini untuk bisa, yang penting selesai, mengamankan supaya selesai, kualitas urusan nomer sekian, agar ini proyek berhasil selesai, selesai kualitasnya tidak, itu Pak Dirjen, jadi yang harus bertanggung jawab teman-teman, Saudara Dirjen dan jajaran sampai ke bawah yang bertanggung jawab, tadi sudah banyak disampaikan tidak mungkin ya, satu perusahaan ada di Aceh, menang di Papua, bawa AMP dari Aceh ke Papua berapa lama, pasang itu harus ada Amdalnya segala macam, tidak mungkin tetapi itu terjadi ya, dengan satu parameter proyek itu penawaran terendah.

Jadi, negara ada bicara untunglah rendah, tetapi itu bukan untung, kerugian yang sangat besar karena kualitas yang dihasilkan itu akan kerugian yang sangat besar, jangan lihat untung di ujungnya, tetapi lihat bagaimana hasil kualitasnya barangnya, itu yang harus dilihat ya, tidak sebanding keuntungan yang didapat itu dengan penawaran yang itu, ini yang harus ditinjau kembali menurut saya dan ini harus disampaikan oleh teman-teman, oleh Dirjen bahwa ini temuan-temuan ini untuk melakukan perbaikan kita bersama-sama di sini tetapi disampaikan bahwa ini hebat ini, sistem yang ada sekarang yang dilakukan oleh Binkon menjalankan ini hebat sistem ini, negara kembali duit sekian banyak, ini sekian, ini sekian, apa ini bohong semua, ini bohong apa yang disampaikan.

Maka saya sepakat kita harusnya buat ini satu Panja supaya kita bisa bedah ini semua ya apa saja yang menjadi kendala-kendala selama ini dan ini merugikan negara ya, karena hasilnya tidak sesuai, malu kita datang ke daerah, kita lihat proyek yang kami anggarkan di APBN dengan proyek APBD, ini proyek APBD, ini proyek APBN, malu kita lihat. Ini sudah sekian tahun, ini baru sekian tahun hancur *kaya* begini, dan kalau Pak Dirjen mau lihat hasilnya, saya undang kita pergi, saya kasih lihat semuanya hasil kunjungan kami ke daerah kami, di depan mata lihat perbandingannya ada, di satu pada ruas yang

sama ini yang dikerjakan, ini yang baru sistem ini, di depan mata ngelihat ya kan seperti itu.

Jadi, tolong Pak Dirjen kita ini mau memperbaiki bukan mau membenarkan semua yang tidak benar ini, kita ingin memperbaiki ke depan agar ini semua bisa berjalan kembali dengan baik, sistem ini baik-baik katanya tetapi buktinya selama berjalan sekian lama hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, parameternya itu, lihat kualitasnya, ini saya baru ngomong kualitas, bagaimana dengan pemberdayaan perusahaan lokal, ini di bilang perusahaan lokal sekian banyak, lokal yang mana, yang saya sampaikan tadi, lima proyek itu, itu satu lokal, lokal yang itu yang berhasil, yang empatnya bukan lokal Pak, dari luar, bermasalah semuanya *gitu*, yang berhasil satu itu lokal.

Ini contoh yang kita temukan, realita yang ada, bukan kita bicara disini karena kita punya, tidak tetapi karena kita ingin mitra kita, kita ingin infrastruktur yang dibawa kami sebagai Anggota Dewan pengawasan seperti itu apa yang kita semua sepakat untuk kualitasnya lebih baik begitu Pak tetapi kalau apa yang disampaikan sekarang ini menurut saya tidak ada perbaikan, ditambah lagi sekarang ada mau tambah ketentuan baru tentang klarifikasi keuangan, ini kan juga sama untuk memberatkan pengusaha daerah yang modalnya kecil, bawa pengusaha luar yang besar-besar masuk, digugurkan dengan itu nantinya, ini seakan-akan sorotan-sorotan ini bagus dibuat padahal ini jebakan ini, ini sengaja dibuat untuk apa, ini ada peluang lagi supaya pengusaha daerah kan modal kecil, kita serahkan modal sekian, harus ada duit di sana, gugur tambah memberatkan ya Pak Dirjen.

Jadi saya tidak setuju syarat-syarat seperti ini ya kan, syarat-syarat harus tenaga ahli ini, dari dulu juga nggak pakai itu proyeknya baik semua, ini cuma akal-akalan, tadi sudah disampaikan Pak Suryadi, kalau bicara jujur tidak mungkin punya perusahaan berapa banyak, ketersediaan tenaga ini berapa banyak, di tempat saya itu semuanya kontrak itu Pak, beli ijazah ini dari luar, karena tidak mungkin tidak ada di sana, jadi syarat ini cuman buat memberatkan orang daerah begitu Pak, yang lebih saya kecewa itu kenapa Pak, khusus daerah kami itu daerah otonomi khusus, ada payung hukumnya, daerah khusus yang harus di dalam otonomi khusus jelas melindungi orang asli Papua, pengusaha orang asli Papua, pengusaha orang Papua, pengusaha Papua, melindungi mereka, karena ada payung hukumnya, itu harus dilihat.

Saya bicara dapil sekarang, ini harus dilihat, undang-undang ini tidak diberikan ujung-ujug ada masalah besar, makanya undang-undang ini dia hadir Republik ini berikan itu, tolong dihargai itu ya. Ini tidak ada penghargaan soal undang-undang kami, kalau tidak itu ya jangan berikan. Khusus dengan kami kenapa, ada masalah besar yang ingin saya sampaikan itu, itu tolong dilihat masalah itu, makanya undang-undang ini ada, untuk apa? semua harus *protect* itu, harus ikut untuk menjalankan undang-undang itu menjalankan payung hukum bisa untuk semua berjalan di sana di Papua, tetapi buktinya apa? tidak ada seperti itu dan ini yang selalu dituntut ya kan, saya tahu tadi Pak Willem Wandik akan ngomong itu tetapi saya minta jangan biar saya yang ngomong, Pak William ya? itu yang juga Beliau mau sampaikan seperti itu, kami diprotes terus sama pengusaha teman-teman, pengusaha dari Papua, bagaimana untuk

membawakan suara mereka dan ini yang kami sampaikan supaya Pak Dirjen tolong Kepala BP2JK Papua tolong perhatikan itu ya, ada payung hukumnya saya sudah sampaikan beberapa kali ya kan.

Saya berikan apresiasi kepada Pak Menteri dengan adanya e-katalog kemarin saya lihat proyek yang dijalankan yang e-katalog sangat baik saya lihat ini dengan ini e-katalog Pak progresnya bagus, ya karena memang kesiapan alat semua ada di sana *gitu*, dia berjalan ya karena memang itu yang kita harapkan begitu, tetapi bagaimana proyek-proyek yang kita lihat pengusaha dari luar datang ya kan, selalu kalau sampai gagal ini mau subkon pengusaha lokal, sekarang kami sudah minta kepada teman-teman di Papua jangan mau ada yang subkon, biarkan mereka supaya kita lihat dan itu terjadi sekarang.

Ini yang harus kita sama-sama Pak Dirjen Bina Konstruksi saya ingin supaya sama-sama membuat perbaikan melalui Saudara Dirjen dan jajaran harus ada peningkatan kualitas, Pak Dirjen bisa tanya kepada Bina Marga Teknis, Cipta Karya, Sumber Daya Air tanya, jangan terus seakan-akan Bina Konstruksi ini satu Lembaga baru yang *super body*, tidak pusing sama yang lain ya, tak ada urusan, kami ini kalian tanggung jawab, hebat betul memang, saya berdiskusi sama teman-teman Balai ini menurut kamu bisa nggak? pasti, hasilnya tidak baik Pak dan tidak masuk akal ini, ini yang harus teman-teman Bina Konstruksi sampaikan juga supaya yang namanya ketentuan-ketentuan termurah ini bisa dipertanggungjawabkan begitu, tidak itu, tetapi kalau saudara-saudara merasa sudah jadi *super body* di dalam Kementerian ya ini kejadian, Dirjen Bina Marga sama, Kepala Balai-Kepala Balai kami sampaikan iya, kami sudah sampaikan kepada BP2JK tetapi susah sekali untuk berkoordinasi untuk menyampaikan ya kan, Pengusaha-pengusaha yang tidak benar itu semua Kepala-kepala Balai di daerah itu tau ini nggak benar, ini nggak benar ya kan, karena sekarang banyak sekali yang pinjam pakai perusahaan satu orang gagal di perusahaan ini tetapi dia pakai lagi di perusahaan lain ya.

Saya kira Pak Dirjen Bina Konstruksi ini saya sudah berapa kali komplain terhadap Kepala BP2JK di tempat saya, terima kasih sudah ganti baru tetapi Pokjanya Pak, waktu itu saya minta ganti Pokjanya ini sudah sekian lama ini bermasalah semuanya, sudah diganti betul tetapi diganti yang tidak bermasalah, yang bermasalah ditinggalkan, saya diketawain sama pengusaha sana, Pak sudah diganti tetapi yang diganti yang bagus-bagus, justru yang bermasalah itu ditinggali, oh berarti itu orangnya Pak Dirjen makanya nggak diganti, pemikirannya begitu.

Makanya kalau Pak Dirjen nggak ganti, saya akan buat *release* lagi bahwa memang itu orangnya Dirjen, saya akan sampaikan, saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen sudah beberapa bulan yang lalu sejak Beliau diganti, saya minta juga ganti itu Pokja-pokjanya, supaya Kepala Balai masuk dengan Pokja yang baru kita lihat masalah nggak lagi di sana karena ini sindikat, karena saya punya data satu orang pakai perusahaan sekian banyak, setahun dia dapat berapa banyak proyek, saya punya datanya.

Jadi, mohon saya minta perhatian lagi Pak Kepala Dirjen, saya kira itu yang ingin saya sampaikan, terlalu banyak nanti kita marah-marah terus nanti

kita dosa lagi terlalu banyak, ini bulan puasa tetapi saya ingin sampaikan karena kita ingin perbaiki Saudara Dirjen, kami bukan untuk men (suara kurang jelas) Bapak tetapi kita ingin memperbaiki mitra kerja kita agar bagaimana juga pengusaha-pengusaha lokal daerah itu bisa dihargai ya, jangan kita nilai ya, tadi sudah disampaikan Pak Dirjen bahwa pengusaha lokal sekian banyak, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Suryadi jangan kita lihat itu, itu bukan kebanggaan, itu receh-receh itu Pak dan yang paling penting lagi Saudara Dirjen saya ingin sampaikan jangan selalu nilai-nilai yang besar kita lihat, saya sudah protes sama Pak Menteri selalu BUMN itu ke daerah bukan membantu meningkatkan kesejahteraan pengusaha daerah tetapi bagaimana mereka menindas, saya punya bukti juga nilai proyeknya berapa yang dapat, dari pagu anggaran sekian, kontraknya semua sekian, pemenang nomer sekian, bisa naik sampai nomer sekian dapat, dikasih ke pengusaha lokal cuman sekian, padahal dia modalnya cuman administrasi, semua peralatan segala macam di tanggung pengusaha lokal pekerjaan itu.

Padahal kita tahu kemarin ada kenaikan BBM yang begitu tinggi, itupun pengusaha lokal tahu, maka tolong menghargai pengusaha lokal ya, jangan semua, seenak-enaknya saja dari luar ya kan, BUMN apalagi BUMN, ini negara berbisnis sama negara, banyak juga Dirjen yang jadi komisaris di sana, saya kira kemarin dengan adanya pemeriksaan BPK soal jalan tol kan sudah jelas, mudah-mudahan di Dirjen yang lain ngikut, tidak lagi jadi komisaris ya karena pernah saya sampaikan di sini itu komisarisnya Dirjen, bahkan dari nomer pemenang 6 jadi nomer 1 ya, karena ada kepentingan di sana, ini tidak boleh terjadi begitu ya, katanya yang terendah yang menang buktinya penawarannya cuman berapa persen dipotong, nggak sampai 5% dipotong.

Jadi, saya kira hal-hal ini yang menurut saya Ketua kita harus lebih lagi sepakat, harus minimal rapat tertutup dengan Dirjen Bina Konstruksi dengan seluruh jajaran untuk kita membedah lagi agar kita semangat untuk memperbaiki, memperbaiki kinerja daripada mitra kita dan bila perlu kita buat Panja agar lebih lagi luas untuk kita membahas ini, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Ketua kalau ada hal-hal dan waktu yang saya terlalu panjang.

Terima kasih saya kembalikan ke Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Iqbal ya silakan.

F-PPP (MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR:

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi V DPR RI,
Yang saya hormati Pak Yudha, Pak Dirjen beserta seluruh jajaran yang
hadir pada siang hari ini.**

Pak Dirjen, tentu Pak Dirjen diundang kesini ke Komisi V DPR RI karena memang ada persoalan Pak, makanya kita undang ke sini, tentu kita undang kita ingin mencari solusinya yang terbaik kira-kira untuk bangsa ini seperti apa. *Nah*, Direktorat Bina Konstruksi ini kan dibentuk kalau saya berpendapat itu kan untuk tujuan yang baik, di sana kan dianalisa, dikumpulkan kemudian diputuskan, *nah*, persoalan yang memutuskan ini sebenarnya Pak memutuskan inilah baik itu di pusat maupun di BP2JK daerah itu yang banyak menimbulkan masalah, *nah*, kami tentu di DPR RI ini dalam rangka tugas kami pengawasan, pengawasan setelah hasilnya terlaksana Pak, mungkin kami ikut campur dalam hal tender tidak mungkin tetapi hasil yang dinilai oleh teman-teman tadi adalah hasil pelaksanaan, pekerjaan yang sudah dimenangkan itu ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan bersama, tadi rekan-rekan juga banyak yang menyampaikan, banyak hasil pekerjaannya dari sisi kualitasnya itu tidak sesuai, baru saja dikerjakan mungkin setelah beberapa lama kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, *nah*, tentu hal-hal seperti ini Pak Dirjen, Pak Dirjen Pak Yudha sebagai komandan besarnya yang mengepalai bisa menginstruksikan baik itu kepada BP2JK daerah-daerah, kalau ingin memenangkan apa suatu perusahaan, menangkanlah perusahaan yang benar-benar bisa bertanggung jawab Pak, tanggung jawab dalam hal pekerjaannya, itu kira-kira yang banyak disampaikan oleh Teman-teman tadi, karena persoalan ini banyak sekali ini Pak Lasarus Pak Ketua, saya kira saya juga sependapat dengan teman-teman yang lain jika memang diperlukan kita bentuk Panja, kita bentuk Panja ini agar memang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para kontraktor itu, itu sesuai dengan hal-hal yang kita harapkan, saya kira itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Iqbal.
Pak Ridwan silakan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pak Ketua.

**Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Robert, Pak Iqbal dan Teman-teman Anggota Komisi V yang terhormat,
Pak Dirjen Pak Yuda ya dengan seluruh jajarannya.**

Sudah capek Pak Yudha ya? Harus ikut jabatan Pak Yudha ya, dari jam 10.00 ini sekarang sudah setengah dua. Ada beberapa hal Pak Yudha, ada satu hal yang mungkin pertama saya menyampaikan begini, saya merespon dan memberi apresiasi terhadap Pak Yudha sebagai Dirjen karena sudah ada keberanian tadi sudah ada usulan yaitu angka penawaran di atas 80% maka itu adalah tidak lagi dianalisa, ini artinya sebuah keberanian yang saya harus beri apresiasi tentang itu.

Tetapi kalau bisa jangan hanya di sini ada beberapa hal yang diamati Pak Dirjen seperti misalnya pengusaha daerah, pengusaha lokal tadi, pengusaha lokal tidak lagi berbagai apa namanya argumen atau apa namanya prediksi-prediksi bahwa pengusaha lokal itu kayak apa, pengertiannya sudah pasti lokal daerah itu sendiri sebenarnya, fakta yang terjadi lokal itu Indonesia, ini yang terjadi sekarang lokal itu Indonesia, yang lokal Indonesia dan non lokal luar negeri misalnya itu yang terjadi sekarang ini, padahal pengertiannya kalau kita lihat sejak dulu sebenarnya Pak Dirjen itu uang negara dibagi secara merata di seluruh Indonesia, tujuannya agar apa? Agar perputaran ekonomi kita tetap ada di daerah juga, di daerah dan fakta yang terjadi sekarang ini uang itu kembali ke pusat lagi, ke daerah-daerah lain, misalnya katakanlah Sulawesi Tenggara misalnya, yang menang Surabaya misalnya atau yang menang Papua ya pasti ke bawa ke sana, masih baik kalau sekarang ke Indonesia Timur tetapi kalau pakai Jakarta lagi yang menang sama saja kembali ke Jakarta uangnya dan tidak berputar ekonominya daerah kita.

Nah, maksud saya ini adalah mesti ada pemikiran baru, tambahan dari Pak Dirjen bahwa ya tentu didukung Para Kepala Balai seluruhnya yang ada disana Kepala Balai BP2JK, tentu untuk membuat satu kebijakan bahwa pengusaha lokal itu harus misalnya minimal 50 atau 100 miliar dimenangkan pengusaha lokal daerah itu mungkin perlu kebijakan baru, mesti ada kebijakan baru yang harus dilakukan semacam itu, tetapi saya yakin kalau niat baik Pak Dirjen dengan Kepala Balainya semua itu bisa dilakukan itu, bisa dilakukan, saya dapat buktikan itu, saya dapat buktikan dari cerita-cerita yang kita dengar dan fakta-fakta lapangan, para kepala balai ini menentukan pemenangnya ini, bisa ini, siapa bilang para kepala balai tidak bisa menentukan pemenangnya, siapa bilang Kepala Balai-kepala balai tidak bisa memerintahkan Pokjanya untuk bekerja agar memenangkan itu, jadi tanpa merubah aturan yang ada, ada kebijakan-kebijakan Pak Dirjen seperti 80% tadi dengan pemenangan pengusaha daerah 400 miliar misalnya sampai 100 miliar memenangkan pengusaha daerah bisa dilakukan tentang itu Pak, bisa kenapa tidak dilakukan sampai sekarang Pak seperti itu, coba Pak Dirjen kumpullah seperti sekarang ini berapa bicara, yakin Pak ada cara-caranya, yakin kita saja mendengar Pak, kita di daerah mendengar, belum menang orang Pak, belum barisan tender Pak, baru mulai *upload* sudah tahu pemenangnya siapa Pak, kita sudah dengar dan aromanya sudah tahu dan memang benar orang itu yang menang Pak, jadi tolong keberpihakan pengusaha daerah itu harus ada Pak, kasihan mereka yang ada di sana.

Kementerian PUPR Pak Menteri dalam hal ini, dalam perputaran persoalan keuangan menjaga inflasi, membantu masyarakat kita yang ada di daerah, menurunkan padat karya dibagi bekerja satu hari dengan 125 ribu misalnya, dibayar, bagaimana tujuannya? Untuk menghidupkan rakyat yang ada di daerah, untuk membuat perputaran yang ada di daerah tetapi uangnya kecil Pak padat karya, yang ratusan miliar, yang triliunan rupiah uangnya kadang-kadang kembali ke daerah lain, tidak berputar di daerah itu, niatan Pak Menteri begitu besar, *nah*, kalau Pak Dirjennya termasuk Pak Yudha bisa berbuat seperti itu dengan memanfaatkan para Kepala Balainya seperti tadi, karena punya semangat yang sama untuk membesarkan negaranya ini, negara ini milik daerah, saya yakin itu adalah bisa dilakukan Pak.

Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, saya pikir yang lain ndaklah, cukup Teman-teman sudah menyampaikan itu, saya berharap Pak Dirjen bisa, dengan penyampaian yang disampaikan tadi bisa berpikir jauh bagaimana para kepala balai ini adalah benar-benar memihak kepada pengusaha lokal, jangan lagi hanya pekerjaan 10 miliar, 20 miliar, yang menang orang Jakarta gimana ceritanya, kasihan itu pengusaha-pengusaha yang ada di sana, pada akhirnya dilaksanakannya yang kerjakan orang daerah juga pada akhirnya, yang dia sub disana, yang dia dapat cuman ampas-ampasnya Pak Dirjen. Maaf Pak Dirjen, saya tidak marah Pak Dirjen, suara saya sudah seperti itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih. Cukup? Oh Mas Dewo, interupsi ya? judulnya interupsi Silakan.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum saya mengajukan pendalaman, saya ingin tanya LP2JK ini yang diundang Ketuanya saja atau dengan seluruh anggotanya? Sebenarnya yang diundang siapa? Semua atau hanya Ketua saja Bu Nunik? LP2JK ini Pak Taufik ya? LPJK.

KETUA RAPAT:

LPJK Ketuanya saja.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T):

Ketuanya saja, anggota tidak?

KETUA RAPAT:

Sampeyan tanya saya, jangan tanya Bu Nunik.

F-P. GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T):

Nggak, saya berpikir ini jangan-jangan yang diundang semuanya tetapi yang datang Ketua, saya kira ada aksi boikot di LPJK, karena suara yang saya dengar tentang LPJK ini sama sekali tidak sedap begitu loh, sama sekali nggak sedap jadi saya menaruh kecurigaan itu juga ada satu kewajaran.

Pimpinan, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan rapat kali ini? Saya kira nggak ada, karena rapat kali ini kan sudah berkali-kali, kawan-kawan setiap kali rapat dengan B2JK, dengan Binkon itu selalu adanya marah dan marah itu

ada dasarnya memang karena ada fakta, informasinya valid bahkan dilihat secara langsung oleh kawan-kawan bukan hanya sekedar meluapkan emosi, buat apa sih emosi kalau tanpa ada dasar, seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan, saya juga terkejut, Pak Ridwan itu tidak pernah nada tinggi, Beliau itu sangat alim, santun, lembut dan itu memang ya tetapi kali ini kenapa nadanya tinggi sampai marah begitu, cuman tetap ya saya pertanyakan buat apa marah kan begitu dan buat apa rapat seperti ini, saya kira tidak ada perlunya rapat kali ini, nggak ada manfaatnya, sama sekali nggak ada manfaatnya, karena apa? Satu persoalan di depan mata yang itu terjadi terus menerus dan terus menerus pula kita mengingatkan tidak ada perubahan, kalau sampai rapat kali ini tidak ada satu perubahan ya, karena memang dari pihak pemerintah tidak ada satu upaya atau niat untuk melakukan satu perubahan, merespon masukan-masukan dan juga saran-saran dari kita, buat apa sesungguhnya rapat itu buat apa.

Jadi kalau Pak Roberth Rouw, Wakil Ketua Komisi, punya wacana Panja itu jangan diwacanakan terus dari dulu, jangan diwacanakan terus karena memang nggak ada perubahan kok, masa hanya wacana saja, jadi kita ini menyampaikan persoalan pada sesi tender itu tidak bisa parsial, karena pokok persoalannya itu sudah lengkap baik dari sisi regulasi, regulasi itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri bahkan surat Dirjen itu coba kita kaji, banyak sekali kelemahan kekurangan di situ yang tujuan daripada regulasi itu hanya untuk menjustifikasi bahwa apa saja yang dilakukan oleh Binkon adalah satu kebenaran, hanya itu tetapi apakah dalam konteks peraturan perundang-undangan itu benar, belum tentu.

Kemudian, pada saat tahap implementasi ini, regulasi, kita melaksanakan tender, kita cermati bagaimana harganya, kita cermati bagaimana metode kerjanya, kita cermati bagaimana sumber daya manusia dan segala macam di situ, itu juga sudah penuh banyak persilatan, kita nggak bisa, bahkan Binkon ini kalau saya melihat punya kekuasaan di luar batas daripada kekuasaan standar, punya hak veto yang tidak bisa dikontrol oleh siapa pun atau bisa di bilang *super body*.

Jadi kalau dikatakan oleh Pak Ridwan misalnya ada informasi tender bahwa yang akan menang dalam tender itu adalah si A, faktanya memang A, si A tersebut yang menang, jadi rumor di luar bahwa yang mengatakan tender itu tidak mencari siapa pemenang tetapi tender itu mencari, menentukan siapa yang harus dikalahkan, karena pemenangnya sudah ada, ternyata itu bukan rumor begitu loh, itu adalah satu kenyataan tetapi kalau sudah dilakukan dengan berbagai upaya untuk menentukan siapa saja yang harus dikalahkan supaya si A yang menang itu gagal upaya tersebut, langsung ditolak tender ulang, dibatalkan kan begitu yang terjadi, dibatalkan, ini yang saya katakan bahwa ini sudah *super body* begitu, bahwa kekuasaannya tanpa batas, kalau bisa di bilang ini undang-undang elastis, undang-undang karet.

Jadi Pimpinan, kalau memang kita mau melakukan perubahan, perubahan itu tidak untuk kepentingan kita, perubahan itu diharapkan untuk kepentingan bangsa dan negara, oleh sebab apa bangsa dan negara? Dampak daripada pelaksanaan tender ini kualitas pekerjaannya menjadi sangat tidak

bau, iklim usahanya menjadi tidak bagus, usaha itu menjadi satu hal yang tidak sehat, coba bayangkan dia sudah punya usaha bertahun-tahun, berpuluhan tahun mati karena situasi dan kondisi sekarang ini, pelaksanaan yang harusnya dikerjakan oleh *main* kontraktor itu disubkan, sehingga yang di Daerah-daerah itu hanya mendapatkan tetesannya, yang penting bisa karyawannya dan lain sebagainya, semua yang dikatakan kawan-kawan itu tidak perlu saya ulangi lagi bahwa semua yang ada di sana adalah syarat dengan satu persoalan.

Maka saya tidak ada gunanya kok rapat kali ini sebenarnya tidak ada gunanya, betul-betul tidak ada, kita semakin lama dan semakin sering melakukan rapat kali ini, Komisi V DPR RI ini semakin tidak punya harga diri, Komisi V DPR RI ini semakin tidak punya wibawa, tidak ada harga diri, harga diri kita semakin kita banting, jadi jangan sering-sering rapat dengan Binkon Pimpinan, jangan lakukan rapat lagi dengan Binkon, itu saran saya sebagai Anggota, semakin kita tidak punya harga diri, semakin terbanting marwah dan martabat kita tetapi kalau memang rapat kali ini sebagai akhir daripada persoalan besar untuk melakukan satu perubahan, oke silakan, jangan wacanakan Panja, jangan retoritakan, kita ini bukan anak kecil begitu ya, jangan Panja itu dijadikan main-main, terus ada lobi sana-sini barangkali kemudian Panja tidak jadi. Kita ini kan kompak Komisi V adanya semua fraksi jadi satu Komisi V, jangan menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah kita, kalau memang Panja ya Panja karena memang ini realistis untuk kita dalam dari segala aspek, dari segala aspek ini realistis untuk kita dalam, regulasi, implementasinya bagaimana.

Saya makin secara pribadi malu, saya sangat malu sebagai Anggota, setelah ini harus ngobrol, lobi sana, lobi sini untuk ini, seolah-olah kita itu tidak ada harga dirinya, padahal kita itu masukannya ya baik-baik saja, jangan sering-sering melakukan rapat kali ini, semakin terbanting harga diri kita, kalau memang kita itu punya harga diri, punya marwah, punya martabat laksanakan itu Panja, sudah selesai ya, jangan sampai menimbulkan perpecahan, kecurigaan di antara kita sendiri dengan tidak dibentuk Panja ini, saya kira itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Mas Dewo.
Silakan Pak Andi Iwan.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pimpinan tepat waktu.

Yang saya hormati Ketua dan Para Wakil Ketua, beserta Anggota Komisi V dan yang saya hormati Pak Dirjen Bina Konstruksi, Ketua LPJK serta jajaran yang hadir.

Pertama, saya ke Ketua LPJK menyangkut sertifikasi tenaga ahli, tenaga terampil, saya ingin mengetahui seberapa banyak jumlah tenaga ahli, tenaga terampil yang menjadi persyaratan dalam proses pelelangan baik itu konsultasi maupun konstruksi yang sudah Bapak sertifikasi, baik yang ingin diperpanjang atau sertifikasi baru, pertanyaan itu adalah untuk mengetahui apakah jumlah tenaga ahli, tenaga terampil ini sudah mampu mencukupi kuota kebutuhan perusahaan-perusahaan baik konsultan maupun kontraktor dalam hal meliputi proses pelelangan ataupun bahkan proses sertifikasi badan usaha yang Bapak lakukan. Ini untuk memastikan bahwa kita tidak usah jauh-jauh dulu ke proses lelang, kita masuk dulu apakah proses sertifikasi badan usaha ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, mereka mendapatkan kualifikasi ataupun klasifikasi yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan yang mereka mintakan, apakah dia besar, kecil, menengah dan sebagainya, apakah kemudian pengalamannya sudah memenuhi syarat untuk menduduki klasifikasi yang mereka mintakan.

Kemudian, setahu saya untuk mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi ini juga salah satu persyaratannya adalah memiliki tenaga teknik kalau tidak salah seperti itu ya Pak Ketua, jadi saya tidak usah masuk ke proses lelang yang dilakukan oleh pihak konstruksi dulu, saya mau masuk ke wilayah Bapak dulu ini, seberapa banyak jumlah Badan Usaha baik konstruksi dan konsultasi yang saat ini ada di Indonesia, setahu saya mereka semua harus teregister oleh Bapak, baru dapat menjalankan usahanya baik itu sebagai kontraktor maupun konsultan di Kementerian PUPR atau Kementerian-kementerian teknis lainnya perhubungan atau di pemerintah provinsi atau pun pemerintah kabupaten kota.

Nah, berangkat dari situ Pak tentu kita sudah bisa mendapatkan bayangan, tentu Pak Dirjen Bina Konstruksi nanti akan mengetahui berapa jumlah paket kegiatan yang ada di Kementerian PUPR secara total karena seluruh unor yang ada di PUPR ini tentu proses pelelangannya dilaksanakan di Bina Konstruksi, itu baru kita yang mengetahui, nanti kalau boleh Pak Dirjen menyampaikan ke kami total jumlah paket kegiatan yang ada di Kementerian PUPR, kita tidak usah ngomong Kementerian Perhubungan dulu, kita tidak usah ngomong Kementerian-kementerian lain, kita tidak usah ngomong pemerintah provinsi atau pun pemerintah kabupaten kota, ini hanya untuk memberi gambaran bahwa apakah proses lelang yang dilaksanakan ini memang benar-benar sudah menjalankan aturan sebagaimana mestinya atau tidak ataukah kita memakai standar ganda ya, kalau sesuai dengan yang kita inginkan ya kita tutup mata, kita menangkan, kalau tidak sesuai yang kita inginkan ya kita permasalahan hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu ke Pak Ketua LPJK ya dan saya tahu Pak ini menjadi PR kita sejak LPJK ini berdiri sampai sekarang masalah ini belum pernah terselesaikan.

Saya ini sebelum jadi DPR Komisi V Pak, pernah menjadi Dewan LPJK Provinsi, saya Dewan LPJK Provinsi Sulawesi Selatan, dulu waktu LPJK pertama kali dibentuk, saya ini mantan Ketua Asosiasi, saya Ketua Gapensi dan saat ini saya menjadi penasehat di DPP Gapensi, jadi saya paham benar pelakunya, wasitnya bahkan mulai dari pangkal sampai ke hulunya Pak, ini yang mungkin saya tahu persis permasalahan yang ada di LPJK seperti apa, jangan cuman kemudian kita menarik-menarik biaya sertifikasi dari tenaga ahli,

tenaga teknik, biaya sertifikasi dari badan usaha kontraktor maupun konsultan itu duit besar Pak, kami tahu benar di tingkatan provinsi saja uangnya sudah cukup luar biasa yang sebenarnya harus dipergunakan untuk peningkatan SDM atau peningkatan *resource* para pelaku jasa konstruksi, itu Pak dari Pak Ketua LPJK ya.

Selanjutnya, saya beralih ke Pak Dirjen, Pak Dirjen beberapa hal yang banyak saya ketahui tentang persyaratan proses-proses lelang dan sebagainya, dulu-dulu saya kira ada beberapa hal yang tidak berubah semisalkan itu adalah menyangkut kemampuan dasar, sudah adakah data yang Bapak miliki BUMN-BUMN tertentu ini mengerjakan berapa banyak proyek di Kementerian PUPR baik yang *singleyears contract* maupun *multiyears contract* yang mana hal itu akan berpengaruh terhadap kemampuan dasar suatu perusahaan, setahu saya untuk perusahaan besar maksimal menangani paket kegiatan itu adalah 20 paket.

Pertanyaan saya BUMN-BUMN kita ini apakah Bapak ketahui, tidak usah kita keluar dari Kementerian PUPR dulu, di Dirjen Bina Marga misalkan Utama Karya sudah bekerja berapa banyak, di Dirjen Cipta Karya sudah berapa banyak, di Dirjen Sumber Daya Air mereka sudah berapa banyak, ini kan semua harus diketahui kemampuan dasarnya, mereka ini bekerja di lingkup Kementerian PUPR nya saja dulu, belum yang di Kementerian Perhubungan misalkan, belum yang ada di pemerintah provinsi, belum lagi BUMN-BUMN ini bekerja yang untuk *project-project* investasi, itu berpengaruh sama kemampuan dasar dan kemampuan keuangan suatu perusahaan, *nah*, inilah yang kemudian banyak membuat *project-project* kita salah satunya menjadi gagal dan lain sebagainya, karena selain kemampuan dasar, kemampuan keuangan juga kemampuan peralatan beserta kemampuan tenaga ahli dan tenaga terampil yang mereka miliki.

Saya sebelum mendengarkan jawaban dari Pak Ketua LPJK, saya menyakini bahwa jumlah tenaga ahli dan tenaga terampil itu pasti tidak cukup, jauh dari lebih cukup, setengah pun saya yakin belum dipenuhi, pertanyaan saya Pokja-pokja Bapak di bawah Kepala Balai ini dalam menentukan pemenang lelang itu apakah tetap mengacu ke situ atau nggak ataukah pura-pura tidak lihat ataukah pura-pura tidak tahu begitu bahwa tenaga ahli ini sudah terpakai di perusahaan A, kegiatan A misalkan, lantas dimenangkan lagi, dipakai lagi di yang lain, ini ada kasus yang terjadi di Dapil saya Pak, di Kabupaten Wajo untuk pekerjaan pasar tempe, dimenangkan oleh Bina Konstruksi, lantas setelah *project* ini berjalan selama satu tahun diputus kontrak karena proses lelangnya salah, yang salah yang bertanggung jawab siapa kalau seperti itu ya, alasan diputus kontrak adalah tenaga ahli dan tenaga terampilnya duplikasi, loh kan proses lelang dan evaluasi sudah dilaksanakan sebelumnya, sebelum kontrak itu berjalan, pertanyaan saya kok mereka bisa dimenangkan setelah itu ditengah jalan baru diketahui bahwa ada duplikasi tenaga ahli kemudian diputus kontrak atas dasar itu, ini aneh Pak, Bapak boleh cek pasar tempe dan *Alhamdulillah* sekarang baru, dilaksanakan kembali.

Nah, saya ingin bertanya sejauh mana balai BP2JK atau Dirjen Bina Konstruksi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang seperti itu, jadi bukan

kesalahan unor Pak, kesalahannya ada di Bina Konstruksi memenangkan BP2JK memenangkan perusahaan tersebut, lantas berjalan, diprotes terbukti putus kontrak, waktu klarifikasi bagaimana apakah ini dicek benar atau nggak.

Nah, kedua, saya ingin mengetahui hasil evaluasinya bagaimana, seberapa banyak di Kementerian-kementerian PUPR ini yang putus kontrak akibat karena hal yang seperti tadi ataupun hal yang diakibatkan oleh kemurahan harga, banyak sekali Pak, di Dapil saya banyak sekali apalagi yang di Dirjen Cipta Karya sampai sekarang nggak selesai-selesai, saya tidak tahu gimana Kementerian PUPR itu memberi tanggung jawab saat BPK datang, kok mereka tidak ketahuan kalau pekerjaan ini 100% belum selesai pekerjaannya tetapi keuangannya sudah selesai, saya tidak tahu hal-hal seperti itu, ada di Cipta Karya juga saat ini di Makassar *multiyears* kontrak sampai sekarang tidak selesai-selesai, sudah diberi apa namanya kesempatan, bukan lagi perpanjangan kontrak Pak, kesempatan untuk menyelesaikan, untuk mendapatkan denda maksimal tetapi sampai sekarang gak selesai karena mereka semua menyampaikan persoalannya adalah karena kemurahan harga.

Nah, ini kan kontraktor ini, rekanan ini Pak perlu dipahami, mereka ini daripada mati kelaparan ya mending mati keracunan Pak ya kan, kalau tidak banting harga tidak dapat pekerjaan, *wong* banting saja kadang-kadang bisa digugurkan begitu saja kok, saya bingung standar mana yang dipakai, kalau kita selalu berpikir bahwa harga terendah tidak juga Pak, ada yang peringkat ke sepuluh, ada yang peringkat kedua belas, maksud saya ini standar yang mana yang mau dipakai begitu, apa kalau misalkan rekanan yang mau menawar nomer urut satu ini bukan orang yang saya inginkan, saya cari kesalahannya, lantas saya mau menangkan yang peringkat ke sepuluh begitu, lantas kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa diulurkan diambillah yang dibawah, karena rekanan-rekanan ini rata-rata orangnya, pelakunya itu-itu juga Pak, meminjam perusahaan, ikut proses lelang, modalnya hanya modal laptop doang bikin penawaran, memasukkan *approve*, setelah dimenangkan mereka kemudian mencari orang-orang untuk membeli kegiatan itu, kenapa nggak ada aspek pengusur? Kenapa tidak ada dasarnya, maksudnya Bapak cek dong perusahaan ini benar tidak yang bawa itu perusahaan si pemiliknya atau memang hanya dikuasakan begitu kan, yang terjadi banyak sekali Pak, saya cuman susah membuktikan secara terang-terangan karena ini dari mulut ke mulut karena saya ini adalah Ketua Asosiasi dulunya, saya tahu komunitas ini sehingga semua informasi itu sampai ke saya, hanya tentu orang tidak mau yang namanya maling tidak mungkin ngaku maling.

Nah, ini Pak saya ingin Pak, saya waktu itu mengajak Bapak untuk membuat sistem informasi tentang penggunaan tenaga ahli, tenaga terampil, apa pada rapat-rapat tahunan mungkin atau dua tahun lalu saya ingin Pak, kalau Bapak memenangkan perusahaan A, tenaga ahlinya siapa itu dapat di akses oleh seluruh BP2JK seluruh Indonesia bahwa tenaga ahli ini sudah terpakai, jangan lagi kemudian ada perusahaan yang menawar dengan tenaga ahli itu Bapak menangkan begitu loh, sehingga kemudian putus kontrak saja yang dirugikan siapa Pak? Masyarakat kami, seharusnya pasar ini fungsional sesuai waktunya kemudian karena kesalahan lelang terus putus kontrak, kita

kan tidak ingin hal-hal yang seperti itu, orangnya itu-itu terus Pak, Pokja dan beberapa orang-orang, anak-anak kecil yang tidak punya perusahaan, yang tidak punya peralatan itu Pak, itu Pak, itu lagi, bahkan setengah di lingkup Bapak ada beberapa direktur yang punya akses memenangkan perusahaan-perusahaan tertentu, maaf isunya seperti itu, saya tidak tahu benar atau tidaknya ya, ada beberapa orang tertentu yang mampu mengkondisikan dengan komitmen-komitmen tertentu ya, saya nggak usah sebut nama ya di bawah Bapak misalkan, ini kalau kita bersepakat lurus-lurus saja, hanya kami tidak bisa buktikan secara kami bukan aparat hukum yang bisa tangkap tangan begitu dan lain sebagainya, tetapi kalau informasi itu benar-benar nyampai Pak *gitu loh*.

Mohon Pak kalau Bapak memang benar-benar mau menerapkan aturannya, tadi saya minta itu Pak dua tahun lalu kalau nggak salah, saya minta Bapak membuat sistem informasi penggunaan tenaga ahli, penggunaan tenaga terampil ini, karena saya tahu benar Pak, Pak Ketua LPJK nanti akan jawab seberapa besar kesiapan tenaga ahli apakah memenuhi proses lelang, apakah Perusahaan-perusahaan yang ikut lelang itu semua bisa memberikan tenaga ahli yang sudah terverifikasi dan tidak terduplikasi begitu loh.

Kalau Bapak berani buat sistem informasinya si tenaga ahli A, B, C terpakai di kegiatan ini, di perusahaan ini begitu, sehingga tidak dipergunakan lagi di Perusahaan-perusahaan ataupun pada kegiatan lainnya dan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti proses lelang yang batal atau kontrak yang dibatalkan karena proses lelang yang cacat begitu Pak, ini kalau bicara lagi tentang masalah harga-harga yang terlalu jatuh itu ya sudahlah, saya cenderung sudah bosan menyampaikan bahwa rekanan yang menawar di bawah harga pabrik pun dimenangkan, tidak mengerti saya Pak, Dirjen Bina Marga kami tanya kok jalannya ini satu tahun sudah hancur lagi, alasannya apa Pak? Harganya kerendahan, mereka tidak mampu menjaga kualitas pekerjaan, *nah*, ini semua.

Lantas (suara kurang jelas) terakhir bagaimana kemudian tentang pemberdayaan pengusaha lokal, boleh tidak sih ada regulasi-regulasi tertentu dulu kesannya lebih baik Pak, untuk anggaran sekian tidak boleh dari provinsi lain masuk misalkan atau kategori kecil cukup dari provinsi itu, saya pernah berdebat dengan Pak Menteri tentang penggabungan paket-paket kegiatan SD, SMP, SMK yang ada di Cipta Karya, apa urgensinya misalkan saya bertanya Pak, kok satu sekolah dengan sekolah yang lain digabungkan sampai 150 miliar, digabungkan sampai 120 miliar, 70 miliar lantas dikerjakan oleh BUMN, ya ngapain proyek-proyek SMA, SMP, SMA yang cuma 7 miliar, 3 miliar nilainya disatukan lantas menjadi paket besar, dilelang dan dimenangkan oleh BUMN, dikerjakan oleh orang lokal juga, disubkonkan kepada orang lokal.

Pertanyaannya Pak Menteri waktu itu sempat menjawab saya seperti ini Pak, Bapak yang mempekerjakan di ujung sana siapa, Pak Ketua LPJK tahu setiap kabupaten punya perusahaan golongan kecil di situ, lebih gampang mendapatkan perusahaan kecil dibandingkan perusahaan besar, ya kan Pak lebih banyak jumlahnya dan saya yakin setiap kabupaten kota punya jadi tidak usah cari siapa yang mau mengerjakan SMK, di kabupaten mana di ujung pulau

sana, di situ juga ada perusahaan kecil yang bisa diperdayakan, *nah*, ini kan salah kalau kegiatan-kegiatan kecil ini digabungkan menjadi kegiatan besar, seharusnya Bina Konstruksi menolak itu ini jangan disatukan Bu, melanggar misalnya Perpres atau apa dan lain sebagainya, setahu saya itu melanggar aturan, tidak boleh menggabung-gabungkan paket kegiatan yang kecil, jangankan yang berbeda provinsi atau berbeda kabupaten, berbeda kecamatan saja tidak boleh disatukan perasaan Pak, ini kok disatukan satu kabupaten kota, tiga kabupaten kota dan satu paket lantas dia langgar, Bapak selaku Dirjen Bina Konstruksi tolak dong ini ndak boleh (suara kurang jelas) ditolak, ini tidak boleh satukan, karena tidak boleh menyatukan paket-paket kecil untuk mengakomodir paket untuk mengakomodir di perusahaan besar. Begitupun sebaliknya, pekerjaan besar dipecah-pecah untuk menghindari proses lelang setahu saya seperti itu Pak.

Jadi mohon Pak maksud saya seperti Pak Sudewo tadi bilang males ngomong ini berkali-kali *gitu*, tetapi tindak lanjutnya apa, setiap kali kita ketemu di sini kita hanya bisa rayu dia, dia terus, tetapi kalau misalkan ada langkah konkrit, misalkan Pak Dirjen buatlah itu Pak yang saya tantang Bapak waktu itu, mana sistem informasi penggunaan tenaga ahli ini itu ada, kalau itu ada ya kita *fair-fair* an, kalau memang tidak mempunyai standar administrasi atau kualifikasi ya sudahlah turunkan itu standar lelangnya, jadi tidak nanti menggunakan standar ganda dalam proses menentukan pemenang dan lain sebagainya.

Mungkin itu Ketua, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih, tepat waktu datangnya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Wa'alaikumsalam.
Terima kasih Pak.
Pak Irwan silakan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P):

Saya melihat Pimpinan semangat *gitu* jadi pingin ngomong juga. Interupsi Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V serta Rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan.

Yang saya hormati Dirjen Bina Konstruksi beserta seluruh jajaran yang hadir.

Pertama-tama, mungkin saya ingin bertanya kalau BPJK Kaltim hadir nggak melalui Pimpinan? Hadir ya? salam kenal Pak ya. Saya memang sejak dilantik belum pernah ke kantor BPJK Ketua tetapi saya memantau dan pada kesempatan ini saya mengingatkan bahwa apa yang disampaikan teman-teman tadi tentu menjadi perhatian khusus kita, karena sangat erat sekali

kaitannya, kualitas pekerjaan yang diterima, dimanfaatkan oleh masyarakat itu dengan apa yang disiapkan oleh kawan-kawan BPJK mulai prosedur pelelangan dan sebagainya sehingga integritas kompetensi para pengusaha melalui BPJK ini menjadi kunci penting akselerasi dan kualitas pembangunan di daerah.

Nah, dalam hal ini kalau di Kaltim kan sekarang lagi ramai ya termasuk IKN, termasuk juga kita mendorong pembangunan, tentu kami meminta agar benar-benar diperhatikan ya prosedural terkait apa namanya pelelangan ini dan yang paling penting tadi keterlibatan pengusaha lokal itu bukan sekedar angka-angka yang dibuat dalam presentasi, tetapi benar-benar aktualisasi di daerah itu terjadi, karena bagaimanapun mereka juga anak bangsa dan mereka sebenarnya saat diberikan kesempatan juga siap ya, sehingga saya pikir dukungan pada Komisi V saat ini sebagai Kapoksi dari Partai Demokrat tentu kami mendukung kalau ada pendalaman ya terutama tadi diusulkan kawan-kawan melalui Panja saya pikir tidak ada salahnya kalau niatnya memang semata-mata adalah reformasi bagaimana jasa konstruksi di Republik ini.

Mungkin itu Pimpinan karena kalau saya sendiri makanya saya bertanya karena saya belum kenal, namanya pun belum kenal, mungkin bisa memperkenalkan diri Pak.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Seizin Dirjenya seizin Dirjenya

KETUA RAPAT:

Dinda, lewat Pimpinan dinda.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P):

Ya Pimpinan, izin Pimpinan Beliau memperkenalkan diri.

KETUA RAPAT:

Ya silakan, Pak Kepala Balai Kalimantan Timur silakan memperkenalkan diri sama Pak Irwan Peco dari dapil Kalimantan Timur, saya persilakan.

KEPALA BP2JK KALIMANTAN TIMUR:

Mohon izin untuk BP2JK Kaltim saya Joko Ahmad Salim Pak Irwan, salam kenal Pak.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P):

Ya salam kenal Pak. Mari kita bersinergi membangun Kalimantan Timur.

KEPALA BP2JK KALIMANTAN TIMUR:

Siap Pak Irwan.

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P):

Mungkin itu Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kalau saya sih soal kenalannya sih nggak terlalu ini ya, kenalnya di sini agak sedih juga saya dengarnya.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Izin Ketua, interupsi. Saya juga ingin diperkenalkan Pak Kepala Balai Sulsel.

KETUA RAPAT:

Yang mana Sulawesi Selatan, silakan Bu perkenalkan diri Bu, buka maskernya Bu ya.

KEPALA BP2JK SULAWESI SELATAN:

Izin Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Hasnawati Rahim unit BP2JK Sulawesi Selatan, Pak Wakil Ketua yang saya hormati.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Oh kalau Ibu Hasna kenal Pak karena sudah lima tahun kayaknya di sana, kok tidak pindah-pindah? Kasihan Pak, kasih naik pangkatnya Direktur *gitu* atau *gimana* ya Bu ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Waduh ini lebih tajam lagi ini, ya ndak ada lagi yang minta-minta dikenalin, tambah runyam ini.

Baik,

Bapak dan Ibu sekalian.

Saya menikmati rapat hari ini dari Pak Hamka bicara sampai terakhir tadi Iwan Peco, Pak Dewo, semuanya Pak Roberth, saya lihat tadi pembicaraanya sebetulnya berputar tiga hal saja Pak.

Yang pertama, soal kemahalan harga atau kemurahan harga maksud saya, kemurahan harga yang diluar 80%. Yang kedua, soal pemain lokal tidak diberi kesempatan. Yang ketiga, tentu teknis dari pelelangan itu sendiri Pak, kami dari Komisi V ini memang ya saya sendiri sudah 15 tahun di sini tidak memahami betul soal lelang ini, karena memang kita mengukur diri juga soal lelang, konon katanya ini sektor yang tidak boleh di intervensi ya, jadi tentu kita berharap intervensi itu tidak ada dari mana pun begitu, dalam kegiatan apa pun, dari siapa pun.

Pertanyaan saya apakah memang seluruh lelang itu tidak ada intervensi dari siapa pun, dari mana pun, oleh siapa pun, itu hanya Kepala Balai sebagai pelaksana Direktorat Jenderal yang menaungi dan Yang Maha Kuasa yang tahu, ini bicara soal kejujuran, saya bilang ini bicara soal kejujuran, kalau yang disampaikan oleh Pak Yudha tadi menurut saya ya ada beberapa hal memang yang jadi kendala sekarang, saya coba merangkum beberapa hal yang dibicarakan kita hari ini ya.

Yang pertama, masih ditemukan keluhan dalam proses lelang memenangkan peserta dengan lelang harga penawaran yang sangat rendah, seperti yang tadi saya sampaikan di luar batas kewajaran. Saya Pak Dirjen kemarin *tak* telepon Bu Lia ya, BP2JK Kalimantan Barat namanya Bu Lia saya kenal Pak, saya telepon Bu Lia saya bilang kenapa kok ada yang menang 76%, kemudian saya telepon Kepala Balai Sumber Daya Air, kebetulan Sumber Daya Air Pak, Pak kami sudah buat analisa bahwa itu tidak bisa dilaksanakan dengan harga seperti itu, tetapi pertanyaannya diumumkan sebagai pemenang tidak, diumumkan sebagai pemenang juga orangnya, saya bilang Pak ada kewenangan berada pada PPK, kalau memang tidak masuk PPK tolak.

Nah, itu diskusi-diskusi yang tidak selesai-selesai hari ini Pak, salah satu contoh, tetapi tadi Pak Dirjen menyampaikan tidak ada aturan yang melarang orang menang di bawah 80% selama koefisien hitungan harganya masuk, pertanyaan berikutnya ada pada apa, berarti perencanaannya yang tidak benar, *nah*, kalau perencanaannya yang tidak benar kenapa ini berlarut-larut Pak, di internal PU ini kenapa ini tidak diselesaikan, HPS nya bermasalah, kalau HPS nya bermasalah kenapa HPS yang bermasalah ini dibiarkan kok sampai pada kita proses lelang, ini kan di bawah satu naungan kementerian Pak, saya sepakat dengan Pak Iwan, Pak Menteri tidak mungkinlah ngurus hal-hal yang remeh temeh begini, jajaran direktur, Direktorat Jenderal harusnya memperbaiki, ini saya bicara sebagai mitra dulu Pak, sebagai mitra kita kan boleh mengasih masukan dan saran, belum bicara soal kewenangan pengawasan, kalau kewenangan pengawasan tentu kami akan dalam seperti yang tadi kita akan gunakan atau tidak kewenangan itu seperti yang Pak Dewo sampaikan, itu nanti kami akan Rapat Internal dulu ya Pak Dirjen, Mas Dewo kita nanti internal dulu mas, saya nggak mau kejadian revisi undang-undang

lalu lintas dan angkutan jalan tempo hari itu terjadi, dulu revisi Undang-Undang Jalan itu diintervensi Mas kita, intervensi dari atas up, up, up saya bingung Pak Ridwan balik kanan, disuruh balik kanan Pak waduh saya bilang akhirnya saya bilang akhirnya saya sendiri Pak yang tinggal.

Tetapi nanti kita ya, tetapi PKS tinggal cuman harus inisiatif Pemerintah bahasanya, berubah juga Pak dari konsep awal setuju direvisi tetapi inisiatif pemerintah padahal inisiatif Komisi V, ini nggak perlu saya buka, ini urusan dapur Komisi V nanti kita bicarakan di internal kita kalau memang kita harus sampai Panja nanti kita sepakati karena memang mekanismenya seperti itu, pembentukan Panja itu ada di rapat internal ya, tidak perlu kita umbar di sini.

Kemudian, hal yang kedua bahwa permasalahan berikutnya terdapat pola penetapan pemenang lelang tadi saya sampaikan dengan terendah, kemudian terdapat paket-paket pekerja konstruksi yang mengalami putus kontrak akibat dari harga yang tidak wajar, kalau menurut saya ini kan masalah yang sudah berlarut-larut Pak, yang berlarut-larut ini persoalannya, orang yang dimenangkan misalnya tidak punya peralatan, yang dimenangkan tidak punya sumber daya bahan baku di situ tetapi dipaksa dimenangkan atau mungkin terpaksa dimenangkan, ini sistemnya yang belum mendukung, kalau kita tanya sama Pak Yudha pasti bahasanya begitu, sistemnya yang belum mendukung Pak terpaksa kita harus menangkan karena tidak ada alasan untuk kita mengalahkan yang bersangkutan karena dokumennya lengkap, harga koefisiennya masuk dan seterusnya dan seterusnya.

Nah, tetapi ini masalah bukan? Masalah, kalau masalah terus apa yang harus kita lakukan, kan itu kita rapat tadi, saya rasa kalau saya berpikir kita bukan mencari siapa yang salah Pak Yudha tetapi mengurai masalah, letak persoalannya di mana ini, kita ini kan merasa benar semua hari ini, pasti semua merasa diri paling benar hari ini tetapi ada masalah, lalu salahnya di mana aturannya kah, maka disini usulan perbaikan regulasi dari Pak Yudha tadi ya, salah satunya saya bacakan juga disini misalnya Pokja pemilihan dapat melakukan verifikasi secara fisik baik terhadap fisik dokumen maupun fisik peralatan apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan meragukan, ya Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi.

Kemudian, belum ada dukungan regulasi terkait dengan mengusulkan penambahan ketentuan baru sebagai upaya untuk pencegahan indikasi pinjam bendera, ini menurut inventarisasi masalah dari Dirjen Bina Marga. Kemudian, penyesuaian persyaratan dan tata cara evaluasi perizinan berusaha, kemudian penggalan tata cara perhitungan dan tabel rekapitulasi TKDN belum diatur, perubahan ketentuan persyaratan harga jika ada penawaran di bawah 80% HPS maka dinyatakan gugur, belum ada aturan yang menggugurkan ini boleh. Kemudian, belum ada aturan penambahan persyaratan kualifikasi keuangan, belum ada aturan yang mengatur tentang perubahan ketentuan evaluasi teknis yaitu kewajiban, mensubkontrakkan pekerjaan kepada penyedia jasa usaha kecil dan menengah setempat. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan substansi kontrak.

Nah, sebenarnya Pak kami kalau teknis kan ada di Kementerian PU, tidak di sini Pak, kita di sini rapat hanya untuk ketika ada masalah Pak, yang tidak ada masalah tidak perlu juga kita bahas, semua baik-baik saja kok, di sini teman-teman masih menemukan subjektivitas yang tinggi Pak mungkin ya tanda kutip Pak, saya juga tidak mensuudzon dulu, adanya subjektivitas yang tinggi dalam penentuan pemenang lelang, masih ada intervensi-intervensi dalam tanda kutip dari pihak-pihak tertentu baik dari dalam maupun mungkin eksternalnya PU sendiri, pertanyaannya ada atau tidak, saya bilang tidak bisa, kita tidak bisa ngomong, hanya Bapak, Ibu dan Yang Maha Kuasa yang tahu.

Jadi saya sudah 15 tahun Pak diskusi soal lelang ini, ini saja dari dulu Pak Taufik, ya saya masih ingat Pak diskusi kita ini terus tetapi kita tidak kepikiran juga ini waktu kita undang-undang jasa konstruksi dulu ini kita aturan tidak kita masukkan, *nah*, berarti kita kan mengarah kepada revisi Pak, revisi undang-undang, nomor berapa Pak Taufik tentang jasa konstruksi saya lupa, nomor 2 ya Tahun 2017 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, Undang-Undang Pengadaan inisiatif Pemerintah ya, silakan saja Pak nanti soal itu, ini teknis supaya kita tidak bergulat terus di sini, tetapi Pak sebenarnya kalau kita bicara aturan *it's okey* lah, *nah* kan tidak semua tentu aturan itu tidak bisa sempurna Pak Taufik, Pak Dirjen Bina Konstruksi, Pak Taufik ini kan mantan Sekjen, Bapak mantan Kepala Biro Perencanaan, Bapak belum Kepala Biro pun saya sudah di Komisi V Pak sampai Bapak, sampai Bapak Sekjen setelah Dirjen duluan.

Jadi persoalan ini sudah berlarut-larut, sudah lama sekali, dari dulu kita diskusinya soal ini saja, ya kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian, sebenarnya Pak karena aturan tidak sempurna, di sana perlu kebijakan, kebijakannya apa misal, kalau di bawah 80% unor bilang, saya tanya ke unor Pak, Pak kalau dibawah 80% bagaimana, kami sulit Pak, pasti susah kami kerjanya.

Nah, sinergisitas pemerintah bagaimana antara unor dengan P2JKnya bagaimana sinergisitasnya, kenapa ini tidak diselesaikan dari dulu Pak masalah ini, harus kita rapat, harus kita bentuk Panja, ini persoalannya sudah berlarut-larut Pak, kita tidak bisa menutup mata Pak, alasan teman-teman di unor masuk akal Pak, fakta di lapangan seperti itu, dikasih harga di bawah 80%, belum ini, itu segala macam, ya mohon maaf kalau kami Kalimantan Barat bilang jadi tempoyak mereka Pak, putus kontrak, *wong* kita punya kewenangan kok Pak, tidak ada jalan, apakah ada konsekuensi hukum pertanyaan saya, tidak juga, banyak juga lelang yang dibatalkan, Bapak bisa menangkis konon Pak, ini mohon maaf ini, tidak pernah ada yang sempurna Pak, jadi ada lagi istilah ini Pak, mohon teman-teman sekalian tidak ada yang sempurna, yang sempurna itu karena disempurnakan, inilah kadang-kadang menjadi peluang, menjadi kesempatan Pak, sudahlah tadi Mas Dewo bilang katanya si siapa tadi ngomong ini ibarat orang belum lahir jenis kelaminnya sudah ketahuan, orang nunggu ini Pak, ini di sini saya sudah beberapa kali saya masih ingat pernah bicara di forum yang terhormat kami dulu, sudah lama sekali kita intip nih kegiatan di sini, nanti yang menang si *anu*, benar menang juga disitu, belum lelang Pak nanti, dia pasti dapat si anu ini nanti, pergaulan kita baca juga kadang-kadang mas, *wong* kita orang daerah pasti tahu siapa sih Pokjanya,

siapa yang terlibat di dalam, ini pergaulannya bagaimana, saya kan pernah Ketua Asosiasi juga jasa konstruksi di daerah, kita baca sampai sejauh itu Pak.

Nah, sekarang Pak Menteri sudah lakukan perombakan sistem, dulu tidak ada P2JK Pak Taufik, P2JK ini baru, *nah*, analisa dari kementerian apakah setelah ada P2JK ini dengan kita rapat seperti ini semuanya menjadi lebih baik atau tidak menjadi lebih baik, kalau lebih baiknya seperti apa, harusnya di rapat ini tadi itu yang disampaikan Pak Yudha kepada kami setelah ada P2JK ini, apakah ini semakin mendorong terjadinya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, jadi kita tidak bisa jadi orang bijaksana tidak bijaksini Pak, mau jujur sana, tetapi tidak jujur di sini *begitu loh*, kalau mau memperbaiki negara ini saya bilang harus kita sama-sama sesuai dengan kewenangan kita masing-masing kita perbaiki negara ini, dengan posisi kita masing-masing, apakah anda semua sudah melakukannya P2JK yang terhormat, hanya anda dan Tuhan yang tahu, ini bulan puasa ini, doa kita ya toh.

Kalau kita mau benar-benar baik ayo kita perbaiki negara ini, mau saklek, saklek saja sekalian, jangan saklek kepada orang tertentu sesuai selera *gitu loh*, tidak bisa Pak ini alam terbuka apalagi jaman sekarang, semua bisa terbaca, apalagi kami Pak yang di sini sudah kata orang ibarat besi sudah berkarat Pak, sudah 15 tahun kita di sini, tentu semua irama kita baca, saya begitu Pak, saya gitu Pak, saya kadang-kadang kalau tidak penting saya tidak bicara tetapi soal ini memang agak serius kalau saya lihat, soalnya apa dari ujung sampai ujung ngomongnya sama Pak Taufik, berarti ada masalah ini, ada persoalan, saya lihat teman-teman jaga kredibilitas Pak Iwan misalnya tadi, Pak Iwan Peco tanya mana Kepala Balainya tidak kenal sampai hari ini, dia menjaga integritasnya Pak, Andi Iwan Aras Wakil Ketua sampai minta diperkenalkan Kepala Balai sudah lima tahun di sana, sudah lima tahun tugas disana Pak, itu menjaga integritas Pak, saya belum pernah nginjak kantor P2JK itu, Bu sekali pun saya belum pernah nginjak kantornya P2JK Kalimantan Barat, kita jaga integritas Pak, tetapi itu harus kita lakukan sama-sama, anda tidak mau diawasi secara ketat tetapi kerja yang benar dong begitu, contoh di daerah saya tadi saya sampaikan saja ngeluh Pak, nanti tiba-tiba terus nanti putus kontrak kita tidak tahu barang ini pasti tidak bisa kerja, sudah pasti akan putus kontrak, lalu nanti siapa yang disalahkan? Kita nyalahkan perencanaan, kalau perencanaannya salah memangnya yang salah siapa, perencanaan di bawah naungan siapa, dibawah naungan satu kementerian Pak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, satu rumah, beda kamar saja, beda tanggung jawab, kalau memang perencanaannya salah diperbaiki perencanaannya, jangan korbankan rakyat Pak, dengan harga yang dibuang seperti itu terus proyeknya tidak jadi, terus *output-outcome* nya masyarakat tidak dapat, kami kepentingan di situ saja, *output* nya bagus, *outcome* nya bagus.

Jadi, rumus Undang-Undang Dasar itu APBN untuk sebesar-besarnya meningkatkan kemakmuran rakyat itu nyampe Pak, kalau kayak gini gimana, lalu salah siapa pertanyaannya, Bapak sudah kasih kewenangan, suruh pegang APBN sekian banyak, dikelola tidak beres salah siapa.

Jadi saya rasa *it's okey* Pak Dirjen nanti dijawab saja ya, *highlight* Pak ya, kami akan mendalami ini karena saya juga sudah larang Pak Suryadi tadi dan itu menyangkut orang tentu tidak bisa di sini Pak, menyangkut perusahaan, badan usaha tidak bisa kita sebut di sini, itu kita harus punya forum yang pas, walaupun sebenarnya ketika kita bicara disini hak imunitas itu ada pada kita, yang penting dibarengi dengan data yang valid, oleh karenanya hal yang sifat sangat teknis dan prinsip secara hukum, saya minta kepada yang terhormat seluruh Pimpinan, Anggota Komisi V DPR RI nanti kita bahas di rapat tertutup saja, setuju ya? saya rasa demikian dari saya.

Selanjutnya, saya persilakan Pemerintah untuk menyampaikan jawaban sesuai dengan saran masukan.

F- P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ketua, interupsi.

KETUA RAPAT:

Pak Roberth silakan.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Ketua, ini saya ingin juga supaya LPJK, saya ingin supaya LPJK ini juga bisa memberikan masukan karena pasti LPJK ini di dalamnya kan kita tahu para pelaku tenaga ahli semua dihasilkan dari sana, maka tahu nilai kontrak, tahu itu berapa besar nilai proyek itu dengan anggaran sekian bisa menjamin kualitas dan sebagainya, saya kira seperti itu, maka dari tempat BPJK juga harus ada masukan buat kita, jangan sampai saya ingin sampaikan kepada kita semua LPJK ini seperti di dalam kesehatan itu IDI semua dokter itu harus kesana ya kan sama sangat *super body* mengendalikan semua, ini juga yang kita sampaikan, supaya BP2JK ini bisa mengontrol.

Saya ingin mengasih contoh Pak Ketua, bahwa ada satu peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yaitu PMK RI No.189 itu untuk keterlambatan kerja proyek itu jadi diperpanjang jadi 90 hari ya, dengan alasan ada covid, tetapi itu tahun 2022 ya kan, berarti kan ada masukan, ada perbaikan, maka ini kan sudah jalan sekian lama, kalau ada masukan karena ini hasilnya kualitas pembangunan tidak seperti yang kita harapkan maka pasti ada aturan baru yang tidak ada itu ketentuan yang termurah yang diberikan pemenang, harusnya seperti itu, kenapa ini bisa PMK ini tiba-tiba nongol memberikan kelonggaran, karena pasti ada komplain, covid tahun berapa? Tahun 2022 sudah mau habis tetapi ada PMK ini turun untuk memberikan kesempatan perpanjangan ya kan, kenapa ini tidak? Kok ketentuannya itu sangat merugikan kualitasnya, jangan pikir keuntungan yang didapat karena yang termurah.

Ini yang perlu saya minta supaya ketua kita semua juga harus lihat bahwa ini bisa ditangani dan bisa dibuat aturan-aturan lagi kalau memang semangatnya untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, tetapi ini kan

dibiarkan, kenapa ini bisa tiba-tiba nongol ini peraturan Menteri Keuangan untuk melindungi pengusaha di dalam memberikan kesempatan untuk perpanjangan waktu, tidak ada (suara kurang jelas) harus kerja, kenapa yang ada ini yang merugikan begitu banyak kita lihat masalah kualitas-kualitas pembangunan di daerah, infrastruktur dan lain-lain, ini pun tidak ada, diambil tindakan karena ada pembiaran, ada apa ini, jadi saya kira itu Pimpinan, ini saya ingin kasih contoh saja biar supaya kita tahu.

Kembalikan ke Pimpinan, silakan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pak Ketua.

Seizin Pak Dirjen ya Pak Yudha, saya pernah ada sedikit masalah teman saya dari Aceh menyampaikan keluhannya terhadap BP2JK yang ada di sana, saya tidak mau merepotkan Pak Dirjen, saya telepon ke Ketua B2JK nya yang ada di sana, paling tidak saya mau tahu kenapa sampai terjadi seperti itu kira-kira dan saya ingin dia menjawab yang pada akhirnya saya akan menjelaskan kepada orang yang menyampaikan kepada saya, Supriyadi namanya, siapa yang dari Aceh? Izin Pak Dirjen, masih ada Supriyadi? Di telepon, di sms, tidak jawab sedikit pun, masa begitu cara bersahabat sebangsa Indonesia ini, saya tidak minta uangmu Pak, orang mengeluh wajib kita menyampaikan, saya menjawab apa saya tidak tahu, saya mau tanya kepada Saudara, apa jawaban Saudara saya akan jelaskan, rupanya begini kejadiannya, hanya itu yang kita minta, saya sms dia tidak jawab, saya telepon dia tidak jawab, saya *whatsapp*, *whatsap*, *pwhatsapp*.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Mungkin perintah Pak Dirjen baru bisa.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya, mungkin perintah Dirjen baru bisa. Tolonglah ini, kita ini sama-sama kok di sini, kita tidak bermaksud meminta proyek atau apa tidaklah, yang ada kita orang mengeluh kita harus jawab pertanyaan orang mengeluh, kita jawab apa keluhannya kalau misalnya tidak, seperti kemudian dia menang macam ini, dia tidak punya alat, tidak punya apa dan seterusnya, nama perusahaannya A, saya ingin bertanya sehingga jawaban dari BP2JK saya ingin sampaikan kepada yang bersangkutan tetapi Saudara Supriyadi tidak menjawab sedikit pun sampai detik ini.

Terima kasih Pak Ketua.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Interupsi Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya, waduh, *offside* itu, itu *offside*. Salah nomer kali, Bapak pasti nomer dia. Bapak sudah cek namanya? Ndak nomernya mana tadi ? tak sesuaikan, nanti kalau nomernya sesuai ada namanya di sini, kalau namanya sesuai Bapak cukup kasih tahu Ketua.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Sebelum Pak Dirjen menjawab mari kita tanyakan dari hati kecil kita masing-masing ya, saya tahu persis apa yang disampaikan jawaban nanti Pak Dirjen normatif sifatnya, mereka ini Kepala-kepala Balai ini eksklusif semua loh Pak, tidak bisa di-*touch* dan merasa dirinya yang memutuskan, tidak ada yang bisa di-*touch* di sini kecuali Pak Dirjen, kejadian seperti itu, ayo kita mari kita bicara dari hati nurani, jujur ada apa sih sebenarnya, memang ada permainan tidak, ada instruksi tidak, ada intervensi tidak? Tahu kok kita, jadi Bapak Pimpinan lebih bagus tidak dijawab kalau tidak berkata jujur, hentikan saja rapat ini, untuk apa kita mendengarkan jawaban yang sifatnya hanya mendengarkan tidak menyelesaikan masalah, ini yang saya harapkan mereka Kepala-kepala Balai ini takut sama Dirjennya, Sekjennya, Sekditjennya, perintah semua, ini yang lebih bagus berhenti barangkali kita rapat kalau jawabannya nanti normatif saja sifatnya.

Terima kasih Pak Ketua.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Pak Ketua interupsi.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Willem saya memang mau kasih Bapak kesempatan, baru catatan sampai sini Pak Willem. Silakan.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Baik Pak Ketua.

Bapak, Ibu Anggota Komisi V dan juga mitra.

Dari kami sedikit saja melakukan pendalaman, perlu mendapat respon. Memang Kementerian PUPR itu selalu menjadi acuan bagi kementerian/lembaga lain dalam melakukan proses lelang, namun kalau kita perhatikan Pak hingga minggu pertama 2023 ini.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Willem, ini saya lihat banyak yang mau salat, ya silakan Pak karena ini bulan puasa tentu yang mau salat silakan atau giliran, silakan dilanjut Pak Willem. Kita kasih izin yang mau salat silakan, yang belum juga saya lihat dari tadi nggak gerak-gerak buang air kecil pun tidak, silakan Pak Willem.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Baik, hingga minggu pertama 2023 ini

F-PDIP (SRI RAHAYU):

Interupsi Pimpinan izin, izin Pimpinan.

Kalau salatnya jalan nanti Pak Dirjen ini tidak bisa salat dong karena menunggu mendengarkan.

KETUA RAPAT:

Oke sebentar, selesai Pak Willem kita kasih salat dulu, silakan Pak Willem lanjut.

F-P. DEMOKRAT (WILLEM WANDIK, S.Sos):

Baik, Kementerian PUPR ini selalu menjadi acuan bagi kementerian lembaga lain dalam melakukan proses lelang, namun kita perhatikan sampai minggu pertama tahun 2023 ini masih 2.579 paket kontraktual pada pelaksanaan Tahun 2023 ini yang belum lelang. Memang masih ada kendala yang berat sehingga proses lelang PUPR masih terjadi keterlambatan, demikian juga pada pelaksanaan tender lelang di paket khusus untuk IKN Tahun 2023 yang masih ada 22 paket dari 168 paket yang dikontraktualkan, kami harap jangan sampai masyarakat yang sudah terlanjur percaya pada pembangunan IKN ini ternyata masih terkendala dengan perlambatan proses lelangnya.

Yang kedua, terkait dengan Dapil sesuai dengan materi yang telah disajikan di sini bahwa keterlibatan penyedia jasa lokal tingkat provinsi pada paket pekerjaan konstruksi tahun 2022 hampir 82% dan non lokal 17%, apakah penjelasan keterlibatan penyedia jasa lokal yang sudah 82% ini juga sudah termasuk di Provinsi Papua, karena kalau kita perhatikan realitas di lapangan itu lebih banyak penyedia jasa di daerah itu banyak didominasi oleh luar Papua, itu saja Pak Ketua.

Sekian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, karena saya rasa ini rapat juga penting, saya beri kesempatan dulu Pak untuk yang ingin ke kamar kecil dan salat. Kita rehat 10 menit ya, 15 menitlah

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR:

Ketua, sebelum rehat tunggu dulu Ketua, ini Pak Suryadi harus, sudah di Aceh ya, klarifikasi soal Ketua tadi, ini kita semua jangan nanti semua ini kayak begini kita, kita tidak dihargai Pak Dirjen, kita dulu sama Dirjen yang lain kalau sampai balai yang tidak ini kita minta diganti dan itu dilakukan ya. Jadi, kita nanti tanya Pak Ridwan kalau memang itu harus lakukan, ini Pimpinan Pak, Pimpinan tidak dihargai seperti itu, beliau sudah sms, kecuali tidak, kalau saya telpon tidak diangkat, tidak tahu nama saya, kalau saya sms itu kan dengan Wakil Ketua. Itu berarti tidak ada penghargaan sama sekali. Begitu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, catatan Pak Dirjen ya, selama tidak melakukan mufakat jahat itu kan harusnya komunikasi itu tidak boleh putus, kecuali orang ngajak merampok, kan jelas-jelas ngajak ngerampok Bapak tidak mau ya wajarlah, kalau masih nanya saja apa salahnya *gitu*, saya rasa begitu. Mohon maaf silakan dulu kita rehat, yang ingin ke belakang dan mau salat saya persilakan kita skors 15 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 14.35 WIB)
(SKORS DICABUT PUKUL 15.00 WIB)**

KETUA RAPAT:

Baik,

Bapak-Ibu sekalian.

Dari Pimpinan dan Anggota sudah selesai, saya persilakan Pak.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pak Ketua sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Ridwan.

F-P. GOLKAR (Ir. RIDWAN BAE) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Dirjen, tadi *uneg-uneg* saya sudah saya kemukakan soal Suryadi yang Aceh dan Aceh sudah ketemu saya sudah menyampaikan apa namanya ya, katanya bahwa kebiasaan dia menolak kalau belum dikenal atau segala, prinsipnya hari ini bulan puasa, bulan puasa kita saling maafkan. Oleh karena itu, saya sudah maafkan dia dan mudah-mudahan teman-teman yang mau komunikasi jangan ragu-ragu angkat Pak ya dan sekali lagi gak usah ditegur lagi sudah cukup, kami sudah berbaikan Pak.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya ini perintah pindahnya cabut ya?

Baik, saya rasa itu penting Pak komunikasi itu selama membangun, kemudian menghormati posisi masing-masing apa salahnya begitu, penting, itu namanya mitra, nanti kalau *nanya* ke sumber yang ndak benar terus ambil kesimpulan nanti salah lagi kita Pak, *nanya* ke biangnya ya supaya ambil kesimpulan benar dalam rangka melakukan pengawasan, itu maksudnya. Pak Taufik singkat, saya pikir dari Pak Taufik dulu. Singkat saja, mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak dan terakhir dari Dirjen Bina Konstruksi.

Silakan Pak Taufik.

KETUA LPJK (Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc):

Baik, mohon izin Ibu dan Bapak sekalian.

**Yang kami hormati,
Bapak-bapak Anggota Komisi V yang terhormat,
Senior kami Pak Sudjadi.**

Baik Pak, jadi tadi pertanyaan yang terkait dari Pak Pimpinan tadi sebenarnya berapa sih jumlah SKK, kita sebut namanya SKK yang sekarang agak, kami ingin sampaikan faktanya memang jumlah SKK tidak cukup untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan PJS KBU dan PJTBU kalau setiap subklasifikasi harus satu, karena itulah sebenarnya sudah diterbitkan revisi atau relaksasi dengan Permen Menteri No. 8 maka satu tadi tenaga kerja konstruksi bisa digunakan untuk lima subklasifikasi, jadi itu salah satu relaksasinya.

Yang kedua, tadi terkait dengan bahwa waktu pengalaman itu 3 tahun itu sudah di relaksasi juga menjadi 3 kali 3 tahun Pak jadi 9 tahun, harapan kami tentunya hal-hal ini bisa meringankan para pelaku jasa usaha untuk bisa berusaha lebih baik khususnya untuk yang kelas kecil, demikian Pak saya kira itu yang terkait dengan tugas kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya Pak Dirjen Bina Konstruksi silakan.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIWAN, M.Dev.Plg):

Baik Pak, terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati.

Terima kasih Pak atas masukan dan saran-saran yang disampaikan, jadi intinya kami ini mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan apa yang disarankan oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan regulasi yang ada, jadi kalau memang regulasi ini perlu dilakukan revisi atau perbaikan ini yang kita sedang usulkan ke LKPP karena di sini sudah jelas bahwa pembuat regulasi itu untuk pengadaan barang dan jasa adalah LKPP, kami hanya melaksanakan saja.

Kemudian yang kedua, ini di bulan yang baik bulan puasa ini kebetulan berkumpul semua para Kepala BP2JK kami menginstruksikan langsung untuk membuka komunikasi, jadi jangan sampai ada yang seperti kejadian dengan Pak Ridwan ini, kalau saya siapa pun yang me-WA saya kebetulan apalagi kalau ada fotonya, ada nama itu biasanya saya respon kecuali kalau orang-orang yang nggak jelas Pak mohon maaf dan biasanya saya cek juga di *get contact* bahwa ini orang-orang yang benar apa tidak, karena mohon maaf kalau di bagian PBJ ini, pengadaan barang dan jasa ini sangat sensitif segala macam dari segala arah telepon itu bisa masuk.

Kemudian, kegiatan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini Pak memang berbeda dengan unor lain, kita cukup berat di sini yaitu untuk proses PBJ kami sebisa mungkin akan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, jadi tidak mengalahkan yang seharusnya menang atau memenangkan yang seharusnya kalah, itu instruksi kami kepada seluruh Kepala BP2JK dan yang sampai hari ini kami bisa berdiri dengan semangat ini karena pertama arahan dari Bapak Menteri PUPR sangat jelas, beliau sendiri tidak mau melakukan intervensi kepada proses PBJ termasuk kami di jajaran Direktorat-direktur ini menginstruksikan kepada Kepala BP2JK untuk melaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada aturan yang ada, dan ini kita sepakati bersama Pak.

Jadi kalau ada yang memang kriminal, kami sebut kriminal itu artinya mempunyai *mensrea* untuk macam-macam ini sudah banyak yang kita lakukan demosi baik itu Kepala Balai, Kasubag TU dan Pokja dan Pak Menteri juga mengapresiasi untuk Kepala Balai yang tidak kuat intervensi mengundurkan diri, jadi sudah banyak yang mengundurkan diri, Kepala Balai Gorontalo, Kepala Balai BP2JK Sulawesi Utara dan Kepala Balai Papua itu mengundurkan diri, jadi mau minta istirahat, kita mengapresiasi dan kita ganti yang terbaik untuk mengisinya.

Untuk Pokja juga ini kita lakukan, saya sedang proses sudah mencoba mengidentifikasi mana-mana yang berpotensi untuk yang tidak kondusif lah itu kita lakukan rotasi atau pun dicopot tidak dikasih jabatan sama sekali kita pindahkan di tempat yang tidak ada kewenangannya sama sekali, contoh kita taro di BJKW Sulawesi Selatan, kemudian ada di BJKW Jawa Timur, BJKW Palembang ini jadi mereka *grounded* tidak ada mempunyai akses sama sekali, karena kalau di taruh di BP2JK, diputar kalau kelakuannya masih sama biasanya dia melakukan lagi dan memang kami di pengadaan barang dan jasa ini dikasih tukin untuk siap dimarah-marahin Pak, jadi tukin kami memang untuk itu, jadi kalau 10 orang yang ikut pengadaan barang dan jasa itu yang akan mendoakan kami itu hanya 1 dari 10, karena yang 9 ini pasti maki-maki, tidak dapat paket.

Nah, artinya memang cukup berat juga ini untuk proses PBJ ini dan masukan Bapak, Ibu tadi akan kami tindak lanjuti termasuk bagaimana seharusnya untuk pemberdayaan penyedia jasa lokal kemudian termasuk yang penawaran yang di bawah 80%, ini terus terang Pak saya dulu dari lama di DSDA kemudian lama di Cipta Karya, sebenarnya ndak *happy* kalau itu pemenang 80%, karena kita pengendalian kontraknya itu akan sulit tetapi itu harus dilakukan, *nah*, ini untuk EKH ini kami sudah menginstruksikan para Kepala Balai BP2JK karena EKH itu Pokja didampingi oleh tim teknis dari unor untuk memutuskan ini layak atau tidak, jadi harusnya unor tidak boleh lagi bilang wah itu BP2JK cari yang rendah-rendah, harusnya kalau memang di bawah 80% putus saja kalau itu tidak layak digugurkan saja, itu sudah kami instruksikan kepada semua Kepala Balai.

Kemudian, kaitannya dengan untuk alat seperti AMP, *buging plan* yang harus wajib disyaratkan ini dapat disyaratkan sesuai dengan kebutuhan oleh PPK dan dimasukkan dalam dokumen pemilihan, jadi artinya proyek tersebut, usulan dari PPK mensyaratkan harus ada *batching plant* dan ini dipersyaratkan dalam proses PBJ nya sehingga ketika nanti mereka tidak mempunyai alat itu bisa menjadi persyaratan untuk digugurkan, *nah*, ini ada hal yang baik sekarang kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan preservasi yang disampaikan Pak Roberth Rouw tadi yang menggunakan e-katalog, karena kalau e-katalog ini sebelum tayang memang ada *screening* nya yang sama-sama oleh unor dan oleh Bina Konstruksi untuk mensyaratkan dia harus mempunyai AMP misalnya, sehingga nanti ketika dilakukan penunjukkan dalam klik di *dashboard* LKPP itu pemenang kegiatan itu betul-betul mempunyai persyaratan yang sesuai termasuk tenaga ahlinya, peralatannya dan kemampuannya dan harganya harga pasar, itu rata-rata berkisar di antara harga di atas 90% biasanya, karena kalau dia harganya terlalu mahal ini nanti kewajiban LKPP untuk melakukan *freeze* atau *take down* dari *dashboard* LKPP tersebut.

Kemudian, untuk pengusaha lokal yang ditanyakan oleh Pak Eddy Santana di Sumatera Selatan itu kurang lebih sebanyak 73% Pak, 82% ini adalah angka rata-rata nasional, jadi ini data yang kami punya sebanyak 76,3% sementara non lokalnya 23,7% untuk di Sumatera Selatan. Kaitannya dengan

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T):

Interupsi Pimpinan, sedikit saja.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Ya Pak Eddy Santana.

F-P. GERINDRA (Ir. EDDY SANTANA PUTRA, M.T):

Saya minta ininya Pak tertulis nanti itu yang 80% benar-benar lokal apa masih pinjam juga itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Dirjen.

Nanti memang ada kita minta jawaban secara komprehensif itu ada tertulis, silakan Pak dilanjut.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Kaitannya dengan pinjam bendera ini memang diatur dalam Perka LKPP dan dituangkan dalam model dokumen pemilihan, jadi untuk pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia baik sebagai akibat peleburan atau akibat yang lain dan tentu ini kalau memang diketahui itu pinjam bendera itu ada sanksinya, jadi selisih dari apa yang disubkonkan itu harus dikali dua dan itu disetor ke kas negara dan paket itu diputus kontrak serta *black list*, ini dalam Perka LKPP Nomer 12 itu sudah diatur dan data BUJK yang ada saat ini dari 140 ribu itu sekarang tinggal 80 ribu atau SUSBU yang ada di periode kepengurusan LPJK 2019 sampai saat ini, ini merupakan hasil pembenahan juga artinya yang tadinya mungkin bisa rangkap-rangkap penanggung jawab teknisnya ataupun tenaga ahlinya ini tidak dimungkinkan lagi dalam proses perizinan yang melalui OSS atau *Online Single Submission*.

Kemudian, yang ada kaitannya dengan tenaga ahli yang jumlahnya tidak seimbang dengan paket di Kementerian PUPR dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Ketua LPJK bahwa proses sertifikasi ini jalan terus, namun untuk pengalaman kemudian juga pencatatan itu dicatat dalam SIKI dan juga dalam aplikasi simpan, jadi pengalaman untuk personil itu disimpan dalam aplikasi simpan yang akan kita berlakukan di 17 April ini ya Bu Ses ya, sehingga nanti semua BUJK harus meng-*input* karena nanti untuk menghindari duplikasi-duplikasi, kami sudah mulai tegas dalam PBJ ini tidak boleh lagi ada rangkap jabatan untuk personil penanggung jawab teknis, badan usaha ataupun penanggung jawab teknis subklasifikasi dan tentu ini juga berlaku sama semua termasuk di IKN kami lebih ketat ada beberapa BUMN yang kita gugurkan, kita

batalan ketika mau dilakukan penetapan pemenang, karena ternyata tenaga ahlinya merangkap di paket-paket yang lain, ini sudah kami instruksikan untuk seperti itu.

Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan, mungkin ini dengan Kepala Balai BP2JK banyak yang sudah baru dan sudah berkomitmen dengan integritas mereka, ini berharap proses PBJ ini dapat lebih transparan, akuntabel dan lebih baik lagi dan kami juga masukan-masukan dari Bapak, Ibu tadi sudah cukup banyak akan menjadi pertimbangan termasuk ini ada rencana membuat Undang-Undang Pengadaan, ini mohon nanti kalau ada masukannya dari Bapak, Ibu supaya ini bisa terangkut sehingga kami bekerja ini Pokja dengan kaca mata kuda, artinya hanya melihat aturan yang ada, tidak diberikan ruang untuk berimprovisasi, jadi kalau Pokja yang berimprovisasi ini kami malah khawatir dan ini untuk menjaga itu kami selalu melakukan FGD untuk *refreshment* aturan-aturan yang baru.

Kemudian mungkin itu yang sudah sampai dan terakhir ini yang kaitannya komunikasi kurang baik tadi kami mohon maaf ini kepada Pimpinan, kami sudah menginstruksikan bahwa semua *channel* untuk komunikasi dibuka apalagi dengan Bapak-bapak, Ibu dari Komisi V DPR RI sebagai mitra pemerintah, kami ingin juga ada masukan dan mungkin dukungan lah supaya proses pengadaan barang dan jasa ini bisa berjalan dengan baik, sementara mungkin itu yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan STRA tadi karena

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Sudjadi.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Saya usul saja Pak, ada Kepala Balai itu diundang peresmian proyek tidak berani karena tidak ada izin Pimpinan, mohon diinstruksikan kalau ada peresmian proyek itu Kepala BPJK dengan stafnya datang sekaligus melihat *sing tak luluske sing tak menangke ki hasilnya kayak opo toh*, jadi ada lalu memang ndak mau datang karena takut tidak ada izin dari ini, saya tidak bicara dari daerah mana.

Yang kedua, perlunya peningkatan kordinasi dan komunikasi dengan Kabalai Satker itu rutin Pak, ngecek supaya anu tidak banyak yang kecele, ini saran saja, terus honor tukang Pak, *mosok* honor tukang 95, saya berkali-kali sudah usul Bapak, lain-lainnya itu 150, itu kan sebagai hadiah orang desa masa 95 itu, mohon itu, terus saya usul Ketua Pokja nya itu spesialis Pak, kalau tender pengairan ya orang pengairan, kalau cipta karya sehingga Pokjanya itu kalau orang cipta karya dengan pengairan jangan sampai *lhola lholok*, ini untuk kecerdasan dan ketelitian.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nasehat orang tua Pak.

Bapak, Ibu sekalian.

Demikian penjelasan dari Direktorat Jenderal, nanti mohon izin Pak ya tolong penjelasan tertulisnya ada banyak sekali varian-varian yang tadi belum bisa dijelaskan secara detail mengingat waktu nanti kita untuk yang komisi kita sebentar setelah nanti mitra pulang, kita tinggal dulu di sini sebentar ya. Saya rasa itu barangkali.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Roberth.

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Saya ingin tanggapi Pak Dirjen tadi, soal kaca mata kuda Pak Dirjen. Tolong di tempat kami itu susah, Bapak pakai kaca mata kuda karena kami punya otonomi khusus ada juga, daerah kami juga daerah-daerah yang memang susah, kalau pakai kaca mata kuda tidak berlaku diatas sana di daerah pedalaman, daerah pegunungan itu, tidak mungkin akan terjadi, maka itu harus juga melihat situasi di sana, jadi jangan semua lalu pakai kaca mata kuda, jangan-jangan kuda dibunuh lagi di sana, karena daerah kami daerah konflik ya kan dan sangat susah, kalau pakai itu tidak mungkin yang saya sampaikan iya kan, pengusaha baru masuk di daerah sana bawa barangnya naik pakai pesawat segala macam, tidak mungkin dalam jangka waktu sekian dia bisa sampai di sana, hal-hal ini yang perlu juga ada diskresi khusus begitu karena ada sudah yang kerja di atas sudah sekian, memang punya kesiapan semua di sana kan kita mau hasilnya baik, kan bukan cuman kita pakai kaca mata kuda ini berlakukan ini tetapi kan kita ingin hasilnya, kualitasnya, itu proyek itu berhasil ya kan, kalau kita pakai kaca mata kuda banyak yang terjadi di sana sekarang.

Nah itu harus dilihat, saya minta supaya itu dilihat Pak, itu yang saya ingin Bapak bicara jujur sama kita bahwa disana ini, mungkin di tempat lain berhasil semuanya baik, tetapi di Papua bermasalah semua, paling banyak bermasalah semua disana, kenapa? Karena memang daerahnya susah, transportasinya mahal, ininya semua ya kan, jadi kalau pengusaha dari luar masuk ke daerah kami pasti bermasalah, maka itu menjadi satu ada diskresi khusus yang saya sampaikan, itu bisa digunakan ya kan karena memang daerah kami seperti itu. Bapak bilang pakai kaca mata kuda terus, tidak ketemu kita, bagaimana kita juga berkomunikasi dengan Saudara-saudara saya orang

Papua kalau mereka juga pakai kacamata kuda tidak mau, kita tetap minta *end* mati kita, ada toleransi itu makanya namanya otonomi khusus diberikan supaya hal-hal itu bisa teratasi ya, saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya rasa cukup.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Interupsi Ketua, izin.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Iwan.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, tadi mohon maaf Pak Ketua LPJK Pak Taufik, waktu Bapak menjawab saya lagi diluar tetapi saya dengar jawabannya bahwa jumlah tenaga teknik yang dibutuhkan itu tidak mencukupi, jadi Pak Ketua melalui Pak Ketua saya izin, saya ingin Pak Dirjen memberikan sedikit tanggapan apa yang disampaikan oleh Ketua LPJK menyangkut tenaga ahli, tenaga terampil tadi sehingga bagaimana Dirjen Bina Konstruksi melakukan proses pelelangan ya dalam kondisi tenaga ahli dan tenaga terampil yang disertifikasi oleh LPJK itu tidak cukup, mohon sedikit dijawab kalau boleh izin Ketua dijawab secara langsung untuk mengenai hal itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Secara singkat saja Pak.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Jadi, kalau kaitannya dengan sertifikasi yang masih ada *gap* ini, ini kita sudah melakukan beberapa kali relaksasi Pak, jadi artinya yang untuk perpanjangan, kemudian juga proses untuk pengurusannya ini dibuat, diakomodir dalam Permen No. 8 Tahun 2022 di mana relaksasi untuk proses sertifikasi di LSP yang ada dan ini kami juga mencoba termasuk kaitannya dengan pengalaman kerja badan usaha itu juga direlaksasi yang tadinya harus 3 tahun menjadi 9 tahun, jadi efektivitasnya yang dinilai.

KETUA RAPAT:

Iya sudah, Pak Iwan?

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Izin Pak Ketua. Terus terang Pak Dirjen saya kurang puas, kalau dengan mudah kita menjawab menyangkut masalah itu membuat Permen yang tentunya kenapa Permen tentang harga terendah itu dia tidak bisa dikeluarkan kalau misalkan itu mudah diantisipasi dengan cara seperti itu, tetapi intinya Pak walaupun ada relaksasi kan tentu kami butuh data riil, data konkrit kalau memang Bapak sepakat bahwa kita betul-betul melaksanakan proses lelang ini dengan benar, *nah*, itu tadi Pak minimal LPJK juga mengetahui begitu loh bahwa dengan relaksasi itu, kalau persentasenya kekurangannya cuman 20% atau 30% mungkin masih mudah kita relaksasi tetapi kalau kekurangannya sampai 80% tenaga ahli ini relaksasi apa yang dilakukan, bagaimana mutu pekerjaan itu bisa dicapai ya kan.

Ini yang saya kira kalau perlu tidak usah lelanglah Pak, tidak usah buat persyaratan tenaga ahli, tenaga teknis kalau memang seperti itu ya kan karena kita sama-sama sepakat, jadi sepakat bahwa tidak dipersyaratkan, *nah* ini yang saya maksud kalau boleh saya mengacu kesitu, pernah ada *statement* saya menyatakan bahwa lelang yang Bapak lakukan itu lelang abal-abal semua, karena konteksnya Bapak subyektif melihat permasalahannya, karena tidak betul-betul konsisten mau menegakkan aturan atau peraturan yang Bapak sendiri buat begitu loh, *nah*, ini yang kalau jawaban seperti itu, kan itu jawaban ngambang Pak, saya butuh data-data yang betul-betul akurat Bapak sampaikan ke kami sehingga saya yakin Pak bahwa proses lelang ini tidak benar, minimal dari tenaga ahli, tenaga terampil ini pasti tidak di-*cover* betul.

Nah, inilah, saya tidak ingin ada kejadian yang sama seperti yang pasar tempe ini Pak, sudah berjalan, dia putus kontrak karena proses lelang, harus ada sanksilah Pak, ya kan, karena kemudian *output* yang kita harapkan masyarakat itu tidak bisa mendapatkan apa yang selama ini kita janjikan, belum lagi yang mohon maaf saya sedikit menambahkan yang terlalu rendah Poros Bone Wajok jalan itu tiga kali lelang Pak baru bisa selesai, *nah*, ini semua maksudnya ini bisa jadi PR kalau hanya dijawab hal seperti itu relaksasi, kalau relaksasi sekitar kekurangan 20-30% bolehlah kita toleransi tetapi kalau kekurangannya begitu banyak gimana relaksasinya.

Mungkin itu Ketua, saya cuman mau men-*stressing* bahwa proses lelang ini sebenarnya dilakukan tidak betul-betul mengikuti tatanan aturan yang ada, saya mau kesimpulannya disitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya rasa sudah tambah jelas Pak ya, ini masih ada bolong di sana, sini, kemudian juga yang paling banyak dikeluhkan itu Pak Dirjen itu soal BMN ini banyak sekali dikeluhkan, misalnya pada saat waktu tadi saya tanya Pak Iwan, pada saat tahun berjalan kontrak berapa maksimal menangani paket, katanya 20 ya? Tadi saya tanya aturannya ada Pak ya?

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Sisa kemampuan menangani paket.

KETUA RAPAT:

Sisa kemampuan menangani paket, itu bisa benar obyektif tidak kan pertanyaannya itu, saya lihat kan kalau BMN ini di mana-mana masalahnya Pak, maka dulu kita atur BMN jangan main paket yang kecil-kecil, ini di bawah 200 masih banyak BMN yang kerja begitu loh, saya melihat Pak jadi begini, ini saya pernah tanya ini apa sih kesulitan Teman-teman BMN, rata-rata kesulitan *cash flow* Pak, jadi *cash flow* nya tidak muter, terpaksa biar muter ya ngejar paket yang diatas 100 di mana pun, apa pun kegiatannya, pertanyaan kan ada Batasan tadi yang boleh lebih dari kemampuan menangani paket, ini juga aturannya ditegakkan atau tidak begitu loh, *nah*, ini ada tidak daftarnya, harusnya LPJK tangani itu Pak Taufik, diingatkan, ada tidak kombinasi yang digunakan atau sistem yang digunakan oleh LPJK dalam hal ini Binkon, kalau di sana tidak boleh lagi dia ikut lelang karena dia sudah menangkan 20 paket, di sana tidak boleh dia ikut lelang, sistem itu yang dibangun di internal, Binkon ada tidak? jadi sehingga Kepala Balai itu dengan sendirinya sudah tahu oh ini muncul kita gugurkan, ini muncul kita gugurkan karena memang di sistem dia sudah kelihatan, dia sudah melebihi kemampuan dia menangani paket dalam kontrak berjalan.

Ini saran saja Pak, yang sudah berlalu mau diapakan, yang ke depan tolong diperbaiki, karena begini Pak kita harus jujur juga pada fakta di lapangan, saya pernah ngomong di sini Pak Dirjen, banyak masyarakat ngadu ke sini, tagihan kepada BUMN-BUMN, Pak kami sudah dihutangi sekian lama, kami sudah dihutangi sekian lama, banyak Pak yang ngadu ke sini, tetapi di satu sisi kan kita maunya sebenarnya prinsip apa sih yang kita mau kejar dari semua ini Pak, terutama perbaikan infrastruktur pasti, membangun infrastruktur itu kan perbaikan infrastruktur, yang kedua apa? Meningkatkan ekonomi masyarakat ya toh? Meningkatkan ekonomi masyarakat apa? APBN ini punya kemampuan untuk melakukan relaksasi ekonomi, bagaimana dia bisa merelaksasi ekonomi? nanti azas pemerataan Pak, orang punya kesempatan untuk bekerja, punya kesempatan untuk berusaha, punya kesempatan untuk menjual produk, *nah*, ini bagaimana mengatur ini secara baik di internal? ini adanya di Binkon loh Pak, suka tidak suka Binkon ini yang punya kewenangan soal ini, gimana coba, aturan soal seperti tadi Bapak bilang belum diaturnya soal wajib untuk Subkon kepada daerah dan seterusnya.

Nah, kalau memang belum ada kan bisa bikin Kepmen atau Permen atau apa dibikin, kan banyak juga Permen yang dibuat oleh Kementerian dan juga dipatuhi kok Pak, dipatuhi Pak, melanggar Kepmen, melanggar Permen, dipatuhi, *nah*, kenapa ini tidak dilakukan, jadi seolah-olah kita kadang-kadang untuk kasus A kita seperti ini tetapi untuk kasus B kita begini loh Pak dan kami yakin Pak Menteri tidak mungkin memikirkan ini semua sampai detail Pak, ini kan tugas-tugas dari Dirjen, direktur-direktur ini, akhirnya nanti kalau ini menjadi panas, misalnya kita bentuk Panja segala macam, ke Menteri Pak jatuhnya, Dirjen-dirjen, Direktur segala macam, Kepala Balai tidak bisa jaga, tidak bisa menjaga marwah Bapak punya institusi.

Jadi kita kadang-kadang tidak konsisten begitu Pak, ketidakkonsistenan ini terjadi ya itu tadi Pak karena kita tidak obyektif melihat persoalan, kita masukkan subyektivitas di sana, *nah*, kalau subyektivitas sudah masuk di antara Bapak-bapak Kepala Balai ini percayalah Pak tiap rapat pun kita rapat di sini ya begini, karena Bapak mendukung subyektivitas di bawah, merusak kinerja kementerian, memelihara oligarki-oligarki di tempat masing-masing, ini Pak Dirjen kalau menurut saya pengawasan internal ini diperkuat Pak, Bapak perketat lagi, saya setuju itu tetapi ya itu tadi Pak betul-betul obyektif, memang tidak mudah Pak, ini pekerjaan saya tahu Pak Dirjen, saya tahu Pak Yudha ini orang baik, saya tahu Bapak ini orang baik, tidak pernah kita kontak Bapak tidak jawab, tetapi memang sulit Pak mengawasi sekian banyak orang tidak mudah, kami paham Pak.

Itulah kita rapat hari ini untuk menguatkan juga Pak Yudha bahwa kami tahu bagaimana yang terjadi di Balai-balai, kalau kami sudah puluhan tahun di sini ngapain saja Pak, duduk, melongo, mendengar saja sudah banyak ilmu yang kita dapat Pak, tidak usah kita baca buku lagi, 15 tahun di sini, dari Sabang sampai Merauke saya biasa telaah siapa di sana itu, siapa, bagaimana, ini bagaimana, pastilah kita ingin tahulah Pak sebagai Pimpinan Komisi pasti kita ingin tahu bagaimana Kepala BP2JK nya di sini, ini bagaimana Kepala BP2JKnya di sini, ini bagaimana Kepala BP2JK nya di sini.

Ya saran saya Pak Dirjen yang sudah lama-lama Bapak mesti puter Pak, menurut saya ini saya mesti bicara walaupun menyangkut nasib orang ya, kami tidak wajib untuk menyampaikan tetapi BP2JK di satu tempat itu tidak boleh terlalu lama saya setuju itu, kalau terlalu lama nanti terbangun emosionalnya dengan keadaan lingkungan, ini manusia Pak dan godaannya gede sekali Pak Dirjen, setangguh apa Bapak punya anak buah menghadapi godaan? Sulit Pak kita menterjemahkan, agak sulit, itu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain kepala, lain isinya Pak, lain orang, lain kemampuan mengatasi masalah yang satu ini.

Oleh karenanya, saya rasa sistem yang harus memperbaiki ini, ini kami kasih saran saja Pak, Teman-teman di PU sebenarnya punya pengalaman lebih dari cukup, maka saya bilang tadi kalau kita mau memperbaiki negara ini ayo bareng-bareng kita benahi Pak, jangan gajah di apa namanya, semut di seberang sungai kelihatan tetapi gajah di pelupuk mata kita ndak nampak, tidak bakalan baik Pak negara ini kalau kita seperti itu, kita harus mulai dari diri kita masing-masing, integritas kita kemudian tanggung jawab yang kita emban,

obyektivitas yang Bapak, Ibu ambil di lapangan, karena pada akhirnya kan nanti kita hakimnya adalah aturan.

Saya rasa itu barangkali yang dapat saya tambahkan dari ini semua, Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V nanti selesai ini kita langsung ke kesimpulan, mohon nanti kan banyak catatan itu, Bapak catat semua, nanti dijawab secara detail apalagi hal-hal yang teknis yang tadi Pak Iwan sampaikan, yang tadi Pak Hamka sampaikan, saya rasa itu.

Sekarang kita menuju ke kesimpulan rapat, ini draf kami coba buat ya Bapak dan Ibu sekalian, karena tidak mungkin kita tanya satu-satu, nanti kalau ada saran, masukan silakan disampaikan, pertama untuk ditanggapi oleh teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi V.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR
SELASA, 11 APRIL 2023**

1. Komisi V DPR RI mendesak Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan terhadap setiap proses lelang sampai penetapan pemenang dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi utamanya penelusuran *track record* peserta lelang serta persiapan material dan peralatan sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
2. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuap atau SMAP dan memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum BP2JK yang tidak profesional dalam proses penentuan pemenang lelang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR agar mengoptimalkan penerapan sistem e-katalog dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih transparan dan akuntabel.
4. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan dan mensosialisasikan aturan surat tanda registrasi arsitek atau STRA sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Teman-teman Komisi? Pak Iwan? Ya Baik setuju, silakan dari Pak Dirjen ada tanggapan mewakili?

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Izin Pimpinan, jadi yang nomor 1, 2 dan 3 kami bisa menerima tetapi yang untuk nomer 4 itu untuk mensosialisasikan STRA itu adalah kewenangan dari Asosiasi Pak, jadi bukan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan sesuai dengan kondisi yang ada sampai saat ini bahwa untuk mengikuti PBJ itu adalah menggunakan SKK, SKK itu adalah untuk tim kompetensi kerja untuk

tenaga ahli, *nah*, tetapi karena kemarin kita sudah sepakat dengan IAI bahwa STRA itu bisa digunakan untuk mengikuti lelang, tetapi bukan menjadi syarat mutlak, jadi kalau dia sudah mempunyai SKK atau mempunyai STRA dan habis itu mengurus SKK untuk proses PBJ, jadi kami ingin yang nomer 4 ini kalau bisa tidak perlu di draf kesimpulan Pak.

KETUA RAPAT:

Nomer 4 di *drop*, saya sudah tanya juga ke ahlinya sebelah kanan ini setuju di *drop*. Setuju di *drop*, setuju Pak di *drop* nomer 4

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

SKK itu sertifikat keahlian ya Pak?

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Ya keahlian.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Ya oke.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Kok dihapus ?

KETUA RAPAT:

Ya karena itu

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Bukan kenapa dihapus gitu lho ?

KETUA RAPAT:

Ya itu tugasnya tugas asosiasi Pak, asosiasi jasa konstruksi.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Pengimplementasiannya saja barangkali Ketua, mensosialisasikan karena bukan, pengimplementasian aturan.

KETUA RAPAT:

Ya coba coba ditampilkan sebentar, Komisi V DPR RI meminta Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan aturan surat tanda registrasi arsitek atau STRA sesuai dengan, coba Pak Iwan.

F-P. GERINDRA (H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Kalau saya Pak, maksud saya memang benar bahwa harus diimplementasikan, disosialisasikan tetapi tidak sebatas STRA saja, sertifikat keahlian itu bisa mengganti atau sederajat dengan STRA ini dalam proses lelang, jadi kalau misalkan kalau merujuk satu asosiasi saja itu membatasi Pak, tetapi maksud saya kan sudah banyak asosiasi lain yang kira-kira punya kewenangan memberikan sertifikasi sehingga tidak harus secara khusus kepada arsitek ini saja, karena ada juga kegiatan-kegiatan yang tidak mempersyaratkan untuk bidang arsitek mungkin hanya sipil dan lain sebagainya begitu sehingga STRA ini memang salah satu kelengkapan tenaga ahli, tenaga terampil tadi yang sebenarnya kita pertanyakan, jadi mungkin begitu Pak Hamka kalau dari

F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Pimpinan, saya cuman ingin apa yang tadi disampaikan sama Pak Dirjen, ini yang menurut saya nanti menjadi masalah di daerah-daerah kita bahwa syarat ini itu mutlak, tadi sudah disampaikan ada BUMN yang tidak punya ini karena dobol dan sebagainya. Karena terus terang kami di Papua itu banyak pengusaha daerah menyampaikan bahwa ini mereka sangat berat, karena ini nanti tidak ada terpaksa mereka beli dari luar, mereka beli sertifikat itu, sedangkan itu tidak menjamin proyek itu, itu cuman syarat saja yang tidak menjamin kualitas proyek, tidak menjamin itu, cuman syarat saja yang memberatkan pengusaha daerah banyak sekali mereka protes soal itu. Harus saya sampaikan karena ini suara dari pengusaha di daerah kami, syarat-syarat ini terpaksa kami harus beli dari luar, karena syarat saja ya kan.

Jadi mohon Pak Dirjen itu yang tadi saya sampaikan kalau kita memakai kacamata kuda, daerah-daerah yang sangat perlu pembinaan, perlu ini, kalau memang syarat itu bisa meningkatkan kualitas ayo, tetapi kan selama ini tidak dan ini yang saya takut seperti kejadian yang kita lihat ribut di IDI karena ini, begitu ini dokter semua harus ini, lama-lama nanti ada satu badan semua harus punya sertifikat dari sana, semua arsitek atau ini harus masuk ke sana untuk dapat itu ya kan. Jadi sudah seperti *superbody* yang harus diberikan sertifikat itu untuk bisa.

Jadi itu Pak Dirjen menurut saya ini yang perlu juga nanti menjadi koreksi bahwa itu bukan satu syarat mutlak, karena ada tempat-tempat, sekarang seperti yang tadi sudah disampaikan kebutuhannya sekian banyak, yang ada cuman sekian, kalau besok tidak terjadi duplikasi itu dilakukan maka kami di ujung sana yang pasti sengsara mencari itu dan pasti beli dengan harga yang mahal karena kita tahu kebutuhan banyak, ketersediaannya sedikit, ilmu

ekonominya ada di situ, nilainya akan tinggi. Jadi, saya kira itu untuk Pak Dirjen catatannya.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Ketua

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin Pimpinan

KETUA RAPAT:

Sebentar sebentar dulu sebentar, ini saya mendalami sama Pak Iwan, jujur saya belum terlalu mendalami soal sektor yang satu ini, jadi tadi Pak Iwan sudah sampaikan letak masalahnya di mana saya tanya sama Pak Iwan SKA itu, kenapa jadi sulit? *Nah*, ternyata kesulitannya itu kan untuk mendapatkan SKA itu memang persyaratannya tidak mudah, *nah*, kalau persyaratannya tidak mudah sehingga SKA ini sulit didapatkan dan seperti barang langka ini kewenangan siapa, LPJK kan Pak ya? Kewenangan LPJK kan? Regulator, pelaksanaanya LPJK kan? LSP? LSP ini di bawah?

KETUA LPJK (Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc):

Jadi LSP ini dibentuk oleh Asosiasi yang terakreditasi dan LSP ini mendapat lisensi dari BNSP Pak.

KETUA RAPAT:

Berarti asosiasi? yang mengeluarkan SKA ini siapa?

KETUA LPJK (Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc):

LSP

KETUA RAPAT:

LSP, berarti kan bentukan dari asosiasi-asosiasi.

KETUA LPJK (Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc):

Bentukan dari Asosiasi terakreditasi dan mendapatkan lisensi dari BNSP.

KETUA RAPAT:

Oke sudah paham Pak kita.

Berarti kan asosiasi, kalau dah asosiasi kan sudah di dunia usaha itu kan Pak, ya ya diserahkan kepada dunia usaha. Jadi, saya setuju kalau begitu, *nah*, sekarang bagaimana Pak menurut Pak Taufik, mumpung ini kita ngomong soal

ini, bagaimana kita mendorong supaya SKA ini, kan saya rasa Indonesia ini tenaga ahlinya sudah banyak Pak, tetapi tidak semua tersertifikasi, memiliki SKA (Sertifikat Keterangan Ahli) sesuai bidangnya.

Nah, jadi saya rasa Pak posisi ini harus kita dorong sebanyak mungkin proses ini bisa dikejar oleh kita, tentu tidak melanggar aturan Pak, karena kalau melanggar bahanya ini, bahayanya apa? Contoh ini dikasih kesempatan menang suatu perusahaan terhadap proyek bangun gedung misalkan, *nah*, bangun gedung ini lantai 50 atau lantai 30 ini kan strukturnya harus khusus, kalau struktur khusus punya keahlian khusus, *nah*, kalau tenaga ahlinya tidak terkawal roboh nanti gedung ini, kan *gitu*. *Nah*, oleh karenanya saya setuju Pak, cuman memang harus kita cari jalan ke luar ini Pak Taufik, silakan Pak. Silakan.

KETUA LPJK (Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc):

Baik, jadi kami ingin sampaikan tadi jumlah tenaga ahli atau SKK yang terbit sekarang adalah 389.798 yang dimiliki oleh 330 ribu orang 330.931 TK, jumlahnya memang jauh lebih kecil dari jumlah tenaga kerja konstruksi, saya setuju Pak Aras, maaf Pak Iwan dan untuk tadi untuk tenaga ahli sekarang ini dengan LSP yang ada kami optimis grafiknya bisa terpenuhi, maksudnya produktivitasnya bisa memenuhi untuk tenaga ahli yang masalah nanti tenaga kerja konstruksi untuk yang level tukang ke bawah, karena apa? Karena dulu tukang-tukang ini kan di *back up* pembiayaan dari Bina Konstruksi dan lain-lain dibiayai orang tetapi kalau tukang ini sertifikatnya habis dia kan susah Pak, uang buat makan saja susah, ini yang mesti harus dipikirkan bagaimana memfasilitasi untuk level tukang ke bawah, kembali kepada yang tadi apa yang harus kita lakukan, yang kita lakukan adalah dan sudah kami lakukan mempercepat terbentuknya LSP-LSP ini segera operasi oleh BNSP Pak, saya kira itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, sudah jelas berarti cocok nomer 4 kita hapus Pak. Baik Pak, dengan hilang nomor 4 setuju ya Pak Yudha? Baik, saya ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu sekalian.

Dengan tercapainya kesimpulan rapat kita pada sore hari maka selesailah rapat kita pada hari ini, saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan kepada Dirjen Bina Konstruksi untuk menyampaikan kata-kata penutup.

DIRJEN BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PUPR RI (Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg):

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI.

Kami mewakili Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan dari pagi sampai sore hari ini dan tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan tindak lanjut apa yang memang bisa memungkinkan dan sesuai dengan Tusnya bahwa untuk regulasi kami hanya bisa memberikan masukan kepada LKPP untuk melakukan ada revisi baik itu Perka ataupun Perpres dan untuk turunannya dalam bentuk SR Permen itulah ada yang menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan ya bila komunikasi dari rekan-rekan kami yang ada di daerah dan ini menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua agar dapat berkomunikasi lebih baik lagi ke depannya dan menjadikan motivasi untuk perbaikan kinerja, mungkin itu yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wabilahi taufik walhidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Saya juga atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi V menyampaikan mohon maaf kalau dalam Rapat ini ada hal-hal yang kurang berkenan, sebelum saya akhiri seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V nanti kita jangan bubar dulu, saya minta waktu 5 menit saja ya.

Bapak, Ibu sekalian.

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah* saya menyatakan rapat ini selesai dan saya tutup.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB)

JAKARTA, 11 April 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002